

# PERINGATAN HARI KONSTITUSI DAN HUT KE-79 MPR RI

MEDIA INFORMASI DAN KOMUNIKASI KONSTITUSI



# MAJELIS

MPR RUMAH KEBANGSAAN

EDISI NO.09/TH.XVIII/IX/2024



ISSN 0854-6371  
9 770854 637158

**18** Nasional  
DPD Harus Menjadi Jembatan Menuju Tingkat Nasional

**34** Kajian MPR  
Mencari Titik Temu Pengaturan Hubungan Pusat dan Daerah

**39** Majelis Khusus  
Kiprah Pimpinan MPR RI Periode 2019-2024

**62** Sosialisasi  
Pentingnya Wawasan Kebangsaan Bagi Generasi Muda



# Daftar Isi

EDISI NO.09/TH.XVIII/IX/ 2024



## 08 BERITA UTAMA

### Sidang Tahunan MPR RI 2024

Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR- DPD, serta Sidang Paripurna DPR dengan agenda penyampaian RAPBN 2025 beserta Nota Keuangan digelar pada Jumat, 16 Agustus 2024. Agenda kenegaraan dengan tema “Nusantara Baru, Indonesia Maju” merupakan agenda kenegaraan terakhir bagi Pimpinan dan anggota MPR/DPR/DPD dan juga bagi Presiden dan Wakil Presiden periode 2019-2024.



## 18 Nasional

### DPD Harus Menjadi Jembatan Menuju ke Tingkat Nasional



## 62 Sosialisasi

### Pentingnya Wawasan Kebangsaan bagi Generasi Muda



## 47 Majelis Khusus

### Peringatan Hari Konstitusi dan HUT ke-79 MPR RI



## 78 Wawancara

### Saleh Partaonan Daulay

Pengantar Redaksi .....	04
Perspektif .....	06
Kolom .....	24
Aspirasi Masyarakat .....	29
Gema Pancasila .....	30
Kiprah Pimpinan MPR RI .....	39
Varia MPR .....	66
Figur .....	80
Ragam .....	82
Dari Rumah Kebangsaan .....	84
Rehal .....	86



## COVER

Edisi No.09/TH.XVIII/IX/ 2024

Kreatif: Jonni Yasrul - Foto: Istimewa

## Sidang Tahunan MPR di Akhir Masa Jabatan MPR Periode 2019-2024

**M**AJELIS Permusyawaratan Rakyat (MPR) telah menggelar Sidang Tahunan MPR Tahun 2024 pada Jumat, 16 Agustus 2024. Sidang Tahunan MPR ini digelar dalam satu rangkaian dengan Sidang Bersama DPR-DPD. Sidang Tahunan MPR Tahun 2024 adalah Sidang Tahunan MPR terakhir untuk Pimpinan dan anggota MPR masa jabatan 2019-2024. Pada akhir September 2024, MPR menggelar Sidang Akhir Masa Jabatan yang menandai berakhirnya masa bakti MPR periode 2019-2024. Pada awal Oktober 2024 akan dilakukan pelantikan anggota MPR periode 2024-2029, hasil Pemilu 2024 lalu.

Bagi Presiden Joko Widodo, Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD ini juga merupakan penyampaian pidato terakhir di akhir masa jabatannya. Begitu pula, penyampaian RAPBN Tahun 2025 beserta Nota Keuangan pada Sidang Paripurna DPR merupakan pidato terakhir Presiden Joko Widodo yang sudah dua kali memangku jabatan sebagai presiden (periode 2014-2019 dan 2019-2024). Pada 20 Oktober 2024, MPR akan melantik Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih hasil Pemilu 2024.

Pelaksanaan Sidang Tahunan MPR di akhir masa jabatan MPR periode 2019-2024 ini masih sama seperti Sidang Tahunan MPR sebelumnya. Agenda Sidang Tahunan MPR yang dirangkai dengan Sidang Bersama DPR-DPD diawali dengan penyampaian pidato pengantar dari Ketua MPR Bambang Soesatyo. Kemudian, bergantian Ketua DPR Puan Maharani menyampaikan pidato pengantar sekaligus mempersilakan Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato Sidang Tahunan MPR yang memuat kinerja lembaga-lembaga negara, dan pidato kenegaraan menyambut HUT Ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia.

Satu poin penting pidato Presiden Jokowi di akhir masa jabatannya dalam Sidang Tahunan MPR ini adalah penyampaian permohonan maaf kepada seluruh rakyat Indonesia. Presiden menyadari selama 10 tahun masa peme-

rintahnya belum sepenuhnya bisa menyelesaikan permasalahan bangsa. Dia pun mengakui keterbatasan sebagai manusia dan adanya kekurangan dalam setiap langkah kebijakannya. Karena itu, dengan penuh ketulusan, Presiden Jokowi menyampaikan permohonan maafnya kepada seluruh rakyat Indonesia, terutama bagi mereka yang kecewa atau harapannya belum terpenuhi.

Memang, tak ada perubahan mendasar dalam pelaksanaan Sidang Tahunan MPR Tahun 2024 ini. Presiden Jokowi sebagai Kepala Negara menyampaikan laporan kinerja lembaga-lembaga negara secara umum dan tidak detail. Padahal, penyelenggaraan Sidang Tahunan MPR dimaksudkan sebagai sebuah forum bagi lembaga-lembaga negara untuk menyampaikan laporan kinerjanya masing-masing kepada rakyat Indonesia sebagai bentuk keterbukaan informasi publik dan akuntabilitas lembaga negara.

Untuk itu, seperti disampaikan Wakil Ketua MPR Prof. Dr. Ir. Fadel Muhammad dalam wawancara dengan *Majelis*, pelaksanaan Sidang Tahunan MPR ke depan sebaiknya terpisah (tidak dirangkai) atau tersendiri dan tidak bersamaan dengan Sidang Bersama DPR-DPD. Dalam Sidang Tahunan MPR yang tersendiri, atau misalnya diselenggarakan sehari sebelum pidato kenegaraan menyambut HUT Kemerdekaan Indonesia, pimpinan lembaga negara bisa menyampaikan laporan kinerja lembaganya secara langsung dan komprehensif kepada rakyat Indonesia.

Selain tulisan Sidang Tahunan MPR Tahun 2024 sebagai Majelis Utama (berita utama), Majalah *Majelis* edisi ini juga menurunkan laporan dan reportase mengenai dua agenda kenegaraan penting lainnya yang dilakukan MPR dalam laporan khusus ("Majelis Khusus"), yaitu peringatan Hari Konstitusi pada Ahad, 18 Agustus 2024, yang dihadiri Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin, dan peringatan HUT MPR RI Ke-79 yang digelar pada Sabtu, 31 Agustus 2024. □



### PENASEHAT

Pimpinan MPR-RI

### PEMIMPIN REDAKSI

Siti Fauziah

### REDAKTUR PELAKSANA

Anies Mayangsari Muninggar

### KOORDINATOR REPORTASE

Djarot Widiarto

### FOTOGRAFER

Tim Medvis

### TIM AHLI

Syahril Chili, Jonni Yasrul,  
Ardi Winangun, Budi Sucahyo,  
Derry Irawan, M. Budiono

### STAF DISTRIBUSI

Amelia Rubinta, Ikhwani Bimo F

### ALAMAT REDAKSI

Biro Hubungan Masyarakat dan  
Sistem Informasi,  
Sekretariat Jenderal MPR-RI  
Gedung Nusantara III, Lt. 5  
Jl. Jend. Gatot Subroto No. 6,  
Senayan, Jakarta 10270.  
Telp. (021) 57895237, 57895238,  
57895251 Fax.: (021) 57895237  
Email: pemberitaan@setjen.mpr.go.id



## Transformasi Ekonomi dan Urgensi Meningkatkan Kompetensi SDM

**K**OMPETENSI sumber daya manusia (SDM) Indonesia patut mengalami penyesuaian dan peningkatan, karena alasan kebutuhan maupun perubahan zaman. Bukan semata-mata karena perkembangan teknologi, tetapi penyesuaian dan peningkatan kompetensi SDM Indonesia menjadi pilihan tak terhindarkan karena relevansinya dengan momentum transformasi ekonomi nasional.

Ketika aktivitas dan mekanisme produksi memasuki era Industri 4.0 dengan dukungan artificial intelligence (AI), tuntutan bagi peningkatan kompetensi SDM atau angkatan kerja menjadi keniscayaan. Kecenderungan itu tak hanya dihadapi Indonesia, melainkan juga angkatan kerja pada semua negara di dunia. Dalam konteks Indonesia, peningkatan kompetensi SDM patut dipahami sebagai kebutuhan mendesak, terutama bagi generasi muda yang akan memasuki dunia kerja. Urgensi tentang peningkatan kompetensi itu menjadi semakin nyata karena relevansinya dengan kehendak mewujudkan transformasi ekonomi nasional.

Komitmen untuk mewujudkan proses transformasi ekonomi itu telah dipertegas Presiden terpilih Prabowo Subianto dalam beberapa kesempatan baru-baru ini. Komitmen itu dia tuangkan dalam tulisan opininya di *Newsweek* pada pekan kedua Juni 2024, dengan judul 'The Road Ahead for Indonesia-One of the Fastest Growing Economies in Asia'. Sebelumnya, di Qatar Economic Forum di Doha, Prabowo juga menegaskan tema yang sama. "Hilirisasi industri wajib dilakukan untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri," ujarnya saat itu.

Visi dan tekad Prabowo mewujudkan proses transformasi ekonomi nasional harus dipahami sebagai jawaban terhadap perubahan zaman. Proses transformasi ekonomi yang lebih bersungguh-sungguh dan terencana harus dimulai dari sekarang. Sebagai sebuah proses yang berkelanjutan, transformasi ekonomi yang dimulai sejak sekarang menjadi warisan dari generasi orang

tua yang akan diteruskan oleh generasi milenial, Gen-Z dan generasi Alpha. Maka, pada waktunya nanti, para ahli yang ditunjuk Prabowo diharapkan semakin intensif menyosialisasikan tema transformasi ekonomi itu untuk membangkitkan kepedulian generasi muda.

Kehendak merealisasikan transformasi ekonomi nasional dimulai ketika dunia sudah menapaki era industri 4.0 dan semakin meluasnya pemanfaatan AI. Berbasis kekayaan negara-bangsa, disepakati bahwa perekonomian Indonesia akan bertransformasi dengan hilirisasi ragam sumber daya alam (SDA). Prabowo bertekad memperluas kebijakan hilirisasi hingga mencakup 12 komoditas. Semua elemen bangsa diharapkan mendukung agenda transformasi ini.

Sangat penting dan juga sangat beralasan untuk bersikap realistis ketika menetapkan bagaimana dan darimana transformasi ekonomi itu akan dimulai. Paling utama adalah kesadaran bersama tentang adanya tantangan. Utamanya tantangan yang berkait langsung dengan kompetensi SDM. Transformasi dengan agenda hilirisasi SDA menuntut perubahan pola pikir (mindset) pada aspek tata kelola SDA. Dan, agar transformasi dan hilirisasi bisa berproses dengan efektif, semua institusi negara yang terkait harus didorong untuk responsif dengan gagasan dan inisiatif yang relevan.

Perhatian terhadap urgensi meningkatkan kompetensi SDM Indonesia harus masuk skala prioritas, sebab faktor paling utama dalam hilirisasi SDA adalah SDM lokal yang kompeten untuk kerja pemrosesan, produksi dan rekayasa material. Pada waktunya nanti, semua pihak tentu berharap hilirisasi SDA tidak lagi mengagendakan kebutuhan akan tenaga kerja asing.

Tantangan lain yang wajib untuk dikalkulasikan adalah fakta bahwa hilirisasi SDA memiliki ketergantungan akan barang modal berharga sangat mahal yang harus diimpor. Itu sebabnya, investasi untuk proyek hilirisasi saat ini sangat mahal. Maka, perlu dilakukan eskalasi bagi kegiatan penelitian dan pengembangan (Litbang) di dalam negeri,

## Dr. H. Bambang Soesatyo, SE., SH., MBA.

Ketua MPR RI



baik untuk keperluan memproduksi barang modal serta peningkatan maupun perluasan nilai tambah setiap komoditas SDA.

Dalam konteks itu, pemerintah dan para ilmuwan hendaknya semakin komunikatif dan memberi ruang lebih leluasa bagi para periset dan inovator. Dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) pun diharapkan tampil dengan ide dan temuan-temuan baru yang relevan.. Misalnya, terkait dengan mekanisme baru untuk optimalisasi proses produksi yang ramah lingkungan, aspek pengelolaan limbah, aspek mutu produk hingga strategi meningkatkan partisipasi masyarakat lokal.

Hambatan klasik berupa ego sektoral harus dihilangkan, karena hilirisasi SDA menuntut koordinasi lintas institusi yang efektif, termasuk koordinasi pusat-daerah. Presiden dan kabinetnya patut menggarisbawahi aspek ini agar tidak ada institusi yang mengambil peran minimalis. Utamanya berkait dengan peningkatan kompetensi SDM. Tentang kompetensi SDM seperti apa yang sangat dibutuhkan untuk transformasi ekonomi itu bisa dirumuskan oleh para tenaga pendidik berdasarkan masukan dari periset dan inovator.

Dalam konteks itu, sektor pendidikan nasional pun didorong untuk segera memberi tanggapan. Ketika negara-bangsa mulai melakukan percepatan transformasi ekonomi dengan program hilirisasi SDA, sektor pendidikan diharapkan aktif mengidentifikasi keahlian apa saja yang paling dibutuhkan. Jangan ragu untuk melakukan penyesuaian kurikulum demi menghasilkan generasi

muda yang berkeahlian sesuai kebutuhan.

Hilirisasi, *at all cost*, harus dilaksanakan dengan konsisten. Konsistensi diperlukan agar sektor industri Indonesia terdorong melakukan pendalaman, dengan mengolah ragam komoditas SDA menjadi produk akhir bernilai tambah tinggi dan kompetitif di pasar global. Selain itu, hilirisasi SDA akan menumbuhkembangkan ragam sub-sektor industri di dalam negeri. Berkembangnya keanekaragaman sub-sektor industri itu sudah barang tentu akan membuka sangat banyak lapangan pekerjaan.

Mata rantai hilirisasi SDA akan menghadirkan manfaat berlipat ganda, karena dimulai dengan proses pengadaan bahan baku untuk kemudian diolah industri manufaktur menjadi barang jadi dengan nilai tambah yang tinggi. Kalau mata rantai hilirisasi terwujud di sektor pertambangan, pertanian, perkebunan hingga sektor perikanan, akan terbuka puluhan juta lapangan kerja.

Perubahan zaman menghadirkan momentum yang sungguh menguntungkan bagi Indonesia, karena sejumlah komoditas SDA sangat dibutuhkan pasar global; dari emas, tembaga, bauksit, nikel, timah, batu bara, kelapa sawit, karet, kelapa, kopi, kakao, rumput laut, teh, dan rempah-rempah lainnya. Bertekad tidak lagi menjual bahan mentah, perekonomian nasional segera bertransformasi dengan hilirisasi SDA guna memperbesar nilai tambah semua komoditas SDA itu.

Momentum sekarang ini hendaknya jangan disia-siakan. Kepemimpinan Prabowo Subianto diyakini mampu mewujudkan transformasi ekonomi nasional demi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. □

## Sidang Tahunan MPR RI 2024

# Inilah Sidang Tahunan MPR Terakhir Periode 2019-2024



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD, serta Sidang Paripurna DPR dengan agenda penyampaian RAPBN 2025 beserta Nota Keuangan digelar pada Jumat, 16 Agustus 2024. Agenda kenegaraan dengan tema “Nusantara Baru, Indonesia Maju” merupakan agenda kenegaraan terakhir bagi Pimpinan dan anggota MPR/DPR/DPD dan juga bagi Presiden dan Wakil Presiden periode 2019-2024.

SETIAP menjelang peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia yang jatuh pada 17 Agustus, kompleks Parlemen selalu besolek. Pada tahun 2024 ini, kompleks Parlemen dipercantik dengan ornamen bertema Merah Putih. Bendera Merah Putih panjang membentang mengelilingi pagar, mulai dari pintu masuk yang berada di Jalan Gelora, hingga pintu masuk di bagian depan di Jalan Jenderal Gatot Subroto. Di bagian dalam, nuansa Merah Putih dan batik Nusantara semakin terasa di setiap sudut Gedung Nusantara.

Nuansa Merah Putih membuat suasana di Gedung Nusantara dan sekitarnya menjadi tampak meriah. Di halaman Gedung Nusantara hingga air mancur juga terdapat hiasan bunga dalam nuansa Merah Putih, mempercantik pemandangan. Bunga-bunga sudah tersusun rapi di sisi kanan dan kiri jalan menuju pintu masuk Gedung Nusantara, tempat Sidang Paripurna. Hiasan bendera dan bunga, seperti Kastuba, tampak di dalam ruang sidang maupun di luar.

Sejumlah bunga sedap malam juga ditempatkan di sejumlah sisi agar tercium harum oleh peserta maupun tamu undangan. Karpet merah pun sudah dibentangkan di sepanjang lantai marmer yang akan dilewati Presiden dan Wakil Presiden, serta tamu undangan. “Untuk ornamennya tahun ini kami menggunakan batik Nusantara

dan ornamen-ornamen Nusantara,” kata Sekretaris Jenderal DPR RI, Indra Iskandar, beberapa hari menjelang agenda kenegaraan di Komplek Parlemen.

Komplek parlemen di bilangan Senayan, Jakarta, atau kompleks legislatif yang terdiri dari tiga lembaga negara (MPR, DPR, dan DPD), bersiap menyambut tamu yang mengikuti agenda kenegaraan setiap menjelang peringatan HUT Kemerdekaan RI. Sama seperti tahun-tahun sebelumnya, agenda kenegaraan di Kompleks Parlemen jelang peringatan HUT Ke-79 Kemerdekaan RI pada tahun ini adalah Sidang Tahunan MPR yang dirangkai dengan Sidang Bersama DPR – DPD, dan Sidang Paripurna DPR untuk mendengarkan RAPBN 2025 dan Nota Keuangan yang disampaikan Presiden Joko Widodo.

Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD, serta Sidang Paripurna DPR dengan agenda penyampaian RAPBN 2025 beserta Nota Keuangan digelar pada Jumat, 16 Agustus 2024. Agenda kenegaraan ini digelar dengan tema: “Nusantara Baru, Indonesia Maju,” merupakan agenda kenegaraan terakhir bagi Pimpinan dan anggota MPR/DPR/DPD dan juga bagi Presiden dan Wakil Presiden periode 2019-2024. Kegiatan kenegaraan ini berpusat di Gedung Nusantara atau sering disebut Gedung Hijau, dan ada pula yang menyebutnya Gedung Kura-Kura. Gedung ini seperti sudah



merupakan sebuah ikonik, khas kompleks Parlemen di Senayan, Jakarta.

Sejak pagi hari, Jumat 16 Agustus 2024, petugas keamanan sudah bersiaga mulai dari pintu masuk ke kompleks Parlemen hingga di pintu-pintu di setiap gedung. Untuk mengamankan jalannya Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD tahun 2024 ini, Polda Metro Jaya mengerahkan sebanyak 4.457 personel. Kabid Humas

Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ary Syam mengungkapkan, dari jumlah personel gabungan itu, sebanyak 3.137 personel berasal dari Polri, 223 personel dari TNI, dan 97 personel dari Pemda. Pengamanan dilakukan di sekitar Gedung MPR/DPR/DPD, Bundaran HI, dan Patung Kuda.

Secara khusus, pengamanan di Gedung Nusantara, lebih diperketat. Personel pengamanan yang menjaga akses masuk ke

Gedung Nusantara lebih banyak dibandingkan area lain. Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) sudah berada di akses pintu masuk Gedung Nusantara. Pengamanan dalam (Pamdal) DPR juga terlihat berjaga di sekitar Gedung Nusantara. Beberapa kendaraan taktis (Rantis) dan ambulance ditempatkan di beberapa titik. Selain itu, dua buah helikopter kepresidenan berwarna Merah Putih juga standby di halaman (lapangan bola) dekat Gedung Nusantara.

Dalam konferensi pers, Ketua MPR Bambang Soesatyo mengungkapkan, Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD Tahun 2024 dihadiri kurang lebih 2.022 tamu undangan. "Dihadiri kurang lebih 2.022 undangan yang terdiri dari 1.222 undangan di dalam Gedung Nusantara dan 800 tamu undangan yang ditempatkan di area Plaza Gedung Nusantara IV," kata Bamsoet, sapaan Bambang Soesatyo.

Dia merinci para tamu undangan tersebut, antara lain Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin, Presiden dan Wakil Presiden terpilih hasil Pemilu 2024 Prabowo Subianto, mantan presiden dan





FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

mantan wakil presiden, mantan Ketua MPR/ DPR/DPD, pimpinan lembaga negara, seluruh anggota MPR RI, menteri Kabinet Indonesia Maju dan pejabat setingkat menteri, ketua lembaga pemerintah non-kementerian dan badan-badan, pimpinan Komisi Kajian Ketatanegaraan (K3) MPR RI, ketua organisasi masyarakat (Ormas) keagamaan, dan perwakilan teladan dari seluruh Indonesia.

### Pakaian Adat

Komplek Parlemen sudah ramai sejak pagi hari itu. Di saat bersamaan, para aparatur sipil negara (ASN) Sekretariat Jenderal MPR, DPR, dan DPD, di kompleks Parlemen, tetap masuk seperti biasanya. Beberapa di antara mereka pun sempat berfoto di depan Gedung Nusantara yang telah dihias dengan nuansa

Merah Putih, khas Hari Kemerdekaan Indonesia. Pada hari Jumat itu, seragam pakaian para ASN adalah bercorak batik.

Tamu undangan dan anggota MPR mulai berdatangan. Tampak kedatangan sejumlah pejabat negara ke Gedung Nusantara, antara lain Menko Marinvet Luhut Binsar Panjaitan, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Luhut Binsar Panjaitan tiba sekitar pukul 08.10 WIB. Luhut terlihat mengenakan setelan jas lengkap. Kemudian Airlangga Hartarto tiba sekitar pukul 08.40 WIB. Airlangga sempat melambaikan tangan ke awak media sebelum memasuki gedung.

Kemudian datang berturut-turut, Menhub Budi Karya Sumadi, Menteri LHK Siti Nurbaya, Mensesneg Pratikno, Mendagri Tito Karnavian, Seskab Pramono Anung, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Investasi Bahllil

Lahadalia, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menparekraf Sandiaga Uno, hingga Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita.

Selain itu, tampak pula kedatangan di Gedung Nusantara, Wapres Ke-6 Try Sutrisno, Wapres Ke-10 dan 12 Jusuf Kalla, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Jaksa Agung ST. Burhanuddin, Ketua KPU RI Mochammad Afifudin, Plt. Ketua PPP Mardiono, Imam Besar Nasarudin Umar. Namun, Presiden Ke-5 Megawati Soekarnoputri yang dinanti kedatangannya mengikuti agenda kenegaraan ini tidak terlihat di antara para undangan.

Sekitar pukul 08.40 WIB, Wakil Presiden K.H. Ma'rif Amin didampingi istri, Hj. Wury Ma'rif Amin, tiba di Gedung Nusantara. Wapres Ma'rif Amin mengenakan busana adat khas "Wong Kito" Palembang, Sumatera Selatan. Ia tampak berwibawa mengenakan jas berwarna hitam, senada dengan celana panjang dan sepatunya. Sedangkan sarung songket yang melilit bagian pinggangnya berwarna ungu dengan hiasan benang emas, selaras dengan warna Tanjak atau ikat kepala yang dikenakannya.

Berbeda dengan Wapres, Hj. Wury Ma'rif Amin memilih memakai pakaian adat Betawi. Istri K.H. Ma'rif Amin ini tampak anggun mengenakan kebaya hijau motif bunga-bunga dipadu dengan kerudung warna senada dan selendang putih.

Di lobi utama, Wapres disambut oleh Ketua MPR Bambang Soesatyo, Ketua DPR Puan





FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

Maharani, dan Ketua DPD AA. Lanyalla Mahmud Mattalitti. Selanjutnya, Wapres menuju ruang tunggu utama untuk menanti kedatangan Presiden Joko Widodo.

Sekitar pukul 08.57 WIB, iring-iringan kendaraan Presiden Joko Widodo tiba di pintu masuk utama Gedung Nusantara. Karpet merah menuju pintu masuk sudah terbentang. Presiden Joko Widodo didampingi istrinya, Iriana, keluar dari mobil. Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Jenderal MPR, Siti Fauziah, menyambut kedatangan Presiden Joko Widodo dan Iriana, lalu mengiringinya masuk ke dalam Gedung Nusantara.

Tampak Kepala Negara tampak memakai baju adat Betawi berwarna hitam dilengkapi dengan peci hitam. Sementara itu Ibu Negara Iriana Joko Widodo memakai kebaya panjang warna *broken white* yang dipadukan dengan kain warna senada sebagai bawahan. Presiden Jokowi sempat melambaikan tangan ke awak media sebelum masuk ke lobi utama Gedung Nusantara.

Di lobi utama sudah berdiri Ketua MPR Bambang Soesatyo, Ketua DPR Puan Maharani, dan Ketua DPD La Nyalla Mattalitti segera menyambut kedatangan Kepala Negara dan Ibu Negara. Setelah itu dilakukan sesi foto bersama. Usai foto bersama, Presiden didampingi Ketua MPR, Ketua DPR, dan Ketua DPD, singgah sejenak di ruang

tunggu.

Sekitar pukul 09.27 WIB, Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin memasuki Ruang Sidang Paripurna. Para anggota MPR berdiri menyambut kedatangan Presiden dan Wakil Presiden didampingi Ketua MPR, Ketua DPR, dan Ketua DPD. Setelah semuanya berada di kursi masing-masing yang telah disediakan, berkumandang lagu kebangsaan, Indonesia Raya. Dan, dilanjutkan dengan mengheningkan cipta dipimpin Ketua MPR Bambang Soesatyo.

### Permintaan Maaf

Sekitar pukul 09.35 WIB, Ketua MPR Bambang Soesatyo membuka Sidang Paripurna dalam rangka Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR- DPD. Bamsuet, sapaan Bambang Soesatyo, kemudian menyebut sebanyak 528 anggota MPR/DPR/DPD RI hadir dalam sidang paripurna. "Sesuai catatan daftar hadir yang disampaikan sekretariat jenderal saat ini telah hadir 528 anggota dari 711 anggota MPR/DPR/DPD RI," ujarnya.

Bamsuet mengatakan, jumlah kehadiran



itu telah memenuhi syarat (kuorum) untuk sidang paripurna. “Dengan demikian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat 5 Peraturan Tata Tertib MPR, dan Pasal 281 ayat 1 Peraturan Tata Tertib DPR, serta Pasal 256 ayat 5 Peraturan Tata Tertib DPD, sidang telah memenuhi syarat untuk dibuka,” sambungnya.

“Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, Sidang Tahunan MPR tahun 2024 dan Sidang Bersama DPR dan DPD tahun 2024, dengan agenda laporan kinerja lembag-lembaga negara yang akan disampaikan oleh Presiden dan pidato kenegaraan Presiden dalam rangka memperingati HUT Ke-79 RI, kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum,” tuturnya.

Bamsoet kemudian menyampaikan pidato pengantar Sidang Tahunan MPR. Dalam pidato pengantarnya, Bamsoet menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan K.H. Ma’ruf Amin, yang terus mendorong Indonesia bergerak maju dan membuktikan sebagai negara yang besar. “Ini sejalan dengan visi Trisakti Bung Karno bahwa sebagai bangsa yang besar, kita harus mampu berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan,” ujarnya.

Bamsoet juga mengucapkan selamat atas terpilihnya Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI terpilih periode 2024-2029. “Selain ucapan selamat atas mandat yang diberikan oleh rakyat Indonesia, kami juga mengharapkan kesinambungan pembangunan nasional. Momentum tersebut perlu terus kita jaga dan pelihara bersama. Tugas ini tentu tidaklah ringan, karena tantangan akan terus datang, baik dari dalam maupun dari luar,” katanya.

Dalam pidato pengantarnya, Bamsoet menekankan sejumlah poin penting di antaranya mengenai kedaulatan pangan, ketahanan keamanan siber di Indonesia, hingga pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Kepada anggota MPR dan para undangan, Bamsoet juga mengungkapkan bahwa MPR telah menyusun rancangan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN). Rancangan PPHN ini akan disampaikan dalam Sidang Akhir Masa Jabatan MPR RI periode 2019-2024 untuk menjadi rekomendasi pembahasan dan putusan bagi

MPR RI periode selanjutnya.

“Insya Allah dengan adanya PPHN akan menghasilkan penataan dan pengaturan penyelenggaraan negara yang harmonis, demokratis, dan berkualitas, karena PPHN akan menjadi pokok panduan bagi seluruh penyelenggara negara. Dengan haluan negara sebagai kompas kita, Indonesia akan terus maju, menggapai bintang-bintang dan menyongsong hari esok dengan penuh keyakinan dan kebanggaan,” katanya.

Setelah menyampaikan pidato pengantar, Bamsoet mempersilakan Ketua DPR Puan Maharani untuk menyampaikan pidato pengantar Sidang Bersama DPR-DPD. Dalam

nya sebagai manusia dan kemungkinan adanya kekurangan dalam setiap langkah yang diambilnya selama ini.

“Sepuluh tahun bukanlah waktu yang cukup panjang untuk mengurai semua permasalahan bangsa. Saya sangat menyadari bahwa sebagai pribadi yang jauh dari kata sempurna, sebagai insan yang tumbuh dalam keterbatasan, dan sebagai manusia yang jauh dari kata istimewa, sangat mungkin ada yang luput dari pandangan saya. Sangat mungkin ada celah dari langkah-langkah yang saya ambil. Dan, sangat mungkin banyak kealpaan dalam diri saya,” ujar Presiden Jokowi.



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

pidato pengantar itu, Puan Maharani mempersilakan Presiden Joko Widodo menyampaikan pidatonya yang juga memuat Laporan Kinerja lembaga-lembaga Negara, dan pidato kenegaraan menyambut HUT Ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia. Inilah pidato kenegaraan terakhir Presiden Joko Widodo yang akan mengakhiri masa jabatan Presiden periode 2019-2024.

Pidato tersebut menjadi momen emosional ketika Presiden Jokowi, yang telah memimpin Indonesia selama sepuluh tahun, menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh rakyat Indonesia. Dalam penutup pidatonya, Kepala Negara menyadari bahwa sepuluh tahun kepemimpinannya mungkin belum cukup untuk menyelesaikan semua permasalahan bangsa. Dengan penuh kerendahan hati, ia mengakui keterbatasan-

Dengan penuh ketulusan, Presiden Jokowi juga menyampaikan permohonan maafnya kepada seluruh rakyat Indonesia, termasuk kepada mereka yang mungkin merasa kecewa atau harapannya belum terpenuhi. Ia menekankan bahwa segala upaya yang dilakukan selama masa jabatannya adalah yang terbaik yang bisa diupayakan untuk bangsa dan negara.

“Saya dan Prof. K.H. Ma’ruf Amin mohon maaf. Mohon maaf untuk setiap hati yang mungkin kecewa, untuk setiap harapan yang mungkin belum bisa terwujud, untuk setiap cita-cita yang mungkin belum bisa tergapai. Sekali lagi, kami mohon maaf. Ini adalah yang terbaik, yang bisa kami upayakan bagi rakyat Indonesia, bagi bangsa dan negara Indonesia,” ungkap Presiden. □

DER/MBO/BSC

# 12 Pantun Pidato Pengantar Sidang Tahunan MPR Tahun 2024

Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo, menyelipkan 12 pantun dalam pidato pengantar Sidang Tahunan MPR Tahun 2024 di Gedung Nusantara pada tanggal 16 Agustus 2024. Pantun-pantun itu bernada riang, mengundang senyum, dan ada di antaranya yang bermuatan politis.



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

**S**IDANG Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD sudah digelar di Gedung Nusantara, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, pada Jumat, 16 Agustus 2024. Sidang paripurna ini dihadiri Presiden Joko Widodo yang mengenakan busana adat suku Betawi dan Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin yang memakai pakaian adat Palembang. Sidang Tahunan MPR juga dihadiri Wapres RI Ke-6 Try Sutrisno, Wapres Ke-10 dan 12 Jusuf Kalla, serta Wapres RI ke-11 Boediono. Tercatat 528 anggota dari 711 anggota MPR RI hadir dalam Sidang Paripurna MPR RI tersebut.

Sidang Tahunan MPR dibuka Ketua MPR Bambang Soesatyo sekaligus menyampaikan pidato pengantar. Dalam pidato pengantar selama hampir 40 menit, Bambang Soesatyo menyisipkan sejumlah pantun di antara pidatonya. Pria yang menulis puluhan buku ini menyampaikan sejumlah pantun yang bernada riang, mengundang senyum, bahkan ada di antaranya yang bermuatan politis. Pantun adalah salah satu budaya tradisi lisan yang mengakar kuat dan berkembang sejak berabad silam di Nusantara, terutama Pulau Sumatera. Tradisi lisan ini kemudian berkembang menjadi produk sastra lama Nusantara.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pantun merupakan bentuk puisi Indonesia-Melayu yang tiap bait berbentuk kuplet terdiri dari empat baris atau larik, bersajak berakhiran a-b-a-b. Pada tiap larik biasanya terdiri atas empat kata, baris pertama dan kedua biasanya untuk suatu tumpuan atau sampiran saja. Sedangkan pada baris ketiga dan keempat merupakan isi, umumnya peribahasa atau semacam "sindiran", yang sekarang ini dapat berkembang menjadi pujian.

Dalam pidato pengantarnya, Bambang Soesatyo yang biasa disapa Bamsuet menyoroti beberapa poin penting, antara lain



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

ucapan Dirgahayu RI, pesan dan harapan kepada Presiden terpilih, serta perkembangan masyarakat saat ini. Dalam pidatonya, Bamsuet menyelipkan total 12 pantun yang dibaca sejak awal hingga akhir pidato.

Pantun pertama dan kedua dalam pidato Bamsuet itu terkait ucapan selamat Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia dan selamat datang kepada para undangan. Kedua pantun itu dibacakan pada bagian awal pidato pengantar Sidang Tahunan MPR RI.

**Pantun 1**

*Bunga kenanga kuncup Terbuka  
Burung Berkicau di atas batu  
Sudah 79 tahun Indonesia merdeka  
Mari wujudkan Nusantara Baru Indonesia Maju*

**Pantun 2**

*Buah durian dari Medan  
Makan di bawah pohon beringin di pinggir jalan*

*Selamat datang para tamu undangan  
Dalam sidang tahunan*

Pantun ketiga dan keempat disampaikan berkaitan dengan terpilihnya Prabowo Subianto sebagai Presiden RI periode 2024-2029. Pantun ketiga dan keempat ini mengungkapkan betapa perjuangan Prabowo Subianto dalam pemilihan presiden 2024 dan harapan atas terpilihnya pasangan Prabowo – Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden.

**Pantun 3**

*Dari Kertanegara ke Istana  
Melalui Perjuangan yang tiada tara  
Semoga visi misi Prabowo-Gibran terlaksana  
Untuk Indonesia Emas 2045*

**Pantun 4**

*Pergi ke Solo makan soto  
Pulanginya ke Senayan  
Selamat kepada Bapak Prabowo Subianto  
Menjadi Presiden Indonesia kedelapan*

Pada saat membahas tentang pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), Bamsuet kembali menyelipkan sebuah pantun.

**Pantun 5**

*Berpindah alamat ke hutan belantara  
Menapak langkah membangun asa  
IKN jadi Ibu kota negara  
Semangat baru untuk Indonesia Raya*

Kemudian, Bamsuet kembali membacakan tiga pantun berikutnya berturut-turut untuk mengapresiasi para pemimpin bangsa Indonesia, mulai dari Presiden Soekarno hingga presiden terpilih Prabowo Subianto. Setiap pemimpin bangsa mendapat pujian dalam pantun itu.

**Pantun 6**

*Bunga melati mekar berseri  
Warna putih harum mewangi  
Penghargaan untuk para pemimpin negeri  
Merah putih tetap tegak berdiri*



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

**Pantun 7**

*Soekarno proklamator yang cerdas berani  
Soeharto pembangunan dimulai  
Habibie teknologi dibangun tinggi  
Gus Dur pluralisme lestari*

**Pantun 8**

*Megawati konstitusi tegak berdiri  
SBY demokrasi yang murni  
Jokowi infrastruktur terintegrasi  
Prabowo legacy kebangsaan terpatri*

Menjelang akhir pidato pengantarnya, Bamsoet membacakan pantun yang khusus ditujukan kepada Joko Widodo, Presiden RI

periode 2014-2019 dan periode 2019-2024 yang akan segera mengakhiri masa jabatannya, dan pantun khusus kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto yang akan dilantik pada 20 Oktober 2024 dan memangku jabatan Presiden untuk periode 2024-2029. Begini pantunnya.

**Pantun 9 untuk Presiden Jokowi**

*Dari Solo ke Istana Negara lewat tol Cipali  
Jangan lupa membawa serabi  
Terima kasih untuk Pak Jokowi  
Langkahmu akan dilanjutkan Pak Prabowo  
dalam membangun negeri*

**Pantun 10 Untuk Presiden terpilih Prabowo Subianto**

*Terbang tinggi burung merpati  
Hinggap lama di pohon mahoni  
Kami titip NKRI  
Agar rakyat hidup nyaman dalam harmoni*

Di akhir pidato pengantar Sidang Tahunan MPR Tahun 2024, Bamsoet kembali membacakan dua pantun yang ditujukan kepada para calon menteri dan petinggi partai yang hadir sebagai tamu undangan dalam agenda kenegaraan itu.

**Pantun 11**

*Kupu-kupu terbang bersama kumbang  
Hinggap di dahan pohon beringin yang rindang  
Para calon menteri tak perlu bimbang  
Berbaik-baiklah kepada presiden yang sekarang dan yang akan datang*

**Pantun 12**

*Burung merpati terbang di atas sawah  
Purnama datang dari negara sebelah  
Koalisi calon kepala daerah masih bisa berubah  
Kotak kosong jangan sampai membuat kita terbelah*

Lalu, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menutup pidato pengantar Sidang Tahunan MPR tahun 2024 dengan ucapan: Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua. Amin. □





FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

Prof. Dr. Ir. Fadel Muhammad, Wakil Ketua MPR RI

## Sebaiknya Pimpinan Lembaga Negara Menyampaikan Laporan Kinerja Masing-masing

**M**AJELIS Permusyawaratan Rakyat (MPR) telah menggelar Sidang Tahunan MPR Tahun 2024 pada Jumat, 16 Agustus 2024. Seperti tahun sebelumnya, pelaksanaan Sidang Tahunan MPR dirangkaikan dengan Sidang Bersama DPR-DPD. Sidang paripurna itu agendanya mendengarkan pidato presiden mengenai kinerja lembaga-lembaga negara pada Sidang Tahunan MPR dan pidato kenegaraan dalam rangka HUT Ke-79 Kemerdekaan Indonesia dalam Sidang Bersama DPR-DPD.

Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD tahun 2024 dibuka Ketua MPR Bambang Soesatyo. Dihadiri oleh Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin, para mantan Wakil Presiden yaitu Try Sutrisno, Jusuf Kalla, dan Boediono, para menteri Kabinet Indonesia Maju, para Wakil Ketua MPR, Wakil Ketua DPR, dan Wakil Ketua DPD, serta pimpinan lembaga negara, diikuti sebanyak 528 anggota dari 711 anggota MPR.

Sidang Tahunan MPR tahun 2024 ini menjadi Sidang Tahunan MPR terakhir bagi Pimpinan dan anggota MPR masa jabatan 2019-2024. Begitu pula penyampaian pidato pidato Presiden di kedua agenda tersebut merupakan pidato terakhir Presiden Joko Widodo yang akan mengakhiri masa jabatan pada 20 Oktober 2024.

MPR sudah menggelar Sidang Tahunan MPR sejak tahun 2015. Artinya, MPR sudah menyelenggarakan 10 kali Sidang Tahunan. Dari penyelenggaraan Sidang Tahunan MPR sejak pertama kali hingga saat ini formatnya tidak pernah berubah, yaitu Presiden sebagai Kepala Negara menyampaikan pidato yang memuat kinerja lembaga-lembaga negara setahun terakhir. Padahal, idealnya, penyelenggaraan Sidang Tahunan MPR dimaksudkan sebagai forum bagi pimpinan lembaga-lembaga negara untuk menyampaikan secara langsung — bukan diwakilkan pada Presiden sebagai Kepala Negara — kinerja lembaganya masing-masing kepada rakyat.

Bagaimana evaluasi pelaksanaan

Sidang Tahunan MPR ini? Bagaimana pelaksanaan Sidang Tahunan MPR pada MPR periode mendatang (MPR masa jabatan 2024-2029)? Untuk menjawab pertanyaan ini, Majelis mewawancarai Wakil Ketua MPR Prof. Dr. Ir. Fadel Muhammad usai pelaksanaan Sidang Tahunan MPR Tahun 2024 pada Jumat, 16 Agustus 2024. Berikut penuturan Wakil Ketua MPR dari Kelompok DPD ini:

**MPR telah menyelenggarakan Sidang Tahunan MPR yang dirangkai dengan Sidang Bersama DPR-DPD dengan agenda pidato penyampaian laporan kinerja lembaga-lembaga negara dan pidato kenegaraan menyambut HUT Ke-79 Kemerdekaan Indonesia pada Jumat, 16 Agustus 2024. Bagaimana evaluasi Bapak terhadap pelaksanaan Sidang Tahunan MPR ini?**

Alhamdulillah, pelaksanaan Sidang Tahunan MPR kali ini berjalan lancar. Sidang Tahunan MPR yang berlangsung pada hari Jumat, hari baik bagi umat Islam, merupakan

Sidang Tahunan MPR terakhir bagi Pimpinan dan anggota MPR masa jabatan periode 2019-2024. Selama periode lima tahun ini, kita memiliki Ketua MPR yang sangat baik. Dan, tadi dalam Sidang Tahunan MPR, beliau (Ketua MPR) menyampaikan pidato pengantar dengan bagus sekali.

Begitu pula dengan Presiden Joko Widodo. Sidang Tahunan MPR (dan Sidang Bersama DPR-DPD) tahun 2024 ini merupakan pidato penyampaian laporan kinerja lembaga-lembaga negara dan pidato kenegaraan menyambut HUT Ke-79 Kemerdekaan Indonesia terakhir bagi Presiden Jokowi. Tahun depan, Sidang Tahunan MPR dihadiri presiden dan wakil presiden terpilih hasil Pemilu 2024. Karena itu, presiden menyampaikan banyak hal dalam pidatonya tadi.

**Dalam pidatonya pada Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD, Presiden Joko Widodo menyampaikan permintaan maaf kepada rakyat Indonesia, termasuk kepada mereka yang merasa kecewa atau harapannya belum terpenuhi. Bagaimana tanggapan Bapak terhadap pidato presiden dalam Sidang Tahunan MPR ini?**

Memang betul, dalam pidatonya, Presiden Joko Widodo dengan segala kerendahan hatinya menyampaikan permohonan maaf, setelah menjabat sebagai presiden selama dua periode. Selain itu, Presiden Jokowi juga telah berhasil mengantarkan estafet kepemimpinan dengan baik, yaitu kepada pemimpin baru, presiden dan wakil presiden terpilih hasil Pemilu 2024.

Menurut saya, setidaknya ada tiga poin penting yang disampaikan Presiden Jokowi pada pidato dalam Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD. Pertama, selama lima tahun terakhir, pembangunan berjalan dengan lancar, kondisi pemerintahan dan situasi politik stabil dan aman-aman saja, sehingga pemerintahan berjalan dengan baik.

Kedua, pembangunan yang telah dijalankan selama ini menyebabkan pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan yang lebih baik bagi rakyat, meski ada catatan, yaitu terkait kurangnya pemerataan kesejahteraan. Dan, ketiga, selama lima tahun terakhir ini rakyat bisa menjalani kehidupannya dengan aman dan damai.

**Dalam Sidang Tahunan MPR, Presiden sebagai Kepala Negara menyam-**

**paikan laporan kinerja lembaga-lembaga negara. Apa yang menjadi catatan Bapak terkait pidato presiden mengenai laporan kinerja lembaga-lembaga negara ini?**

Saya melihat laporan kinerja lembaga-lembaga negara yang disampaikan Presiden masih jauh dari harapan, karena masih bersifat umum. Barangkali karena persoalan keterbatasan waktu sehingga Presiden tidak bisa menyampaikan laporan kinerja lembaga-lembaga negara secara detail dan baru bisa disampaikan secara umum, biasa-biasa saja, dan formalitas.

Itulah sebabnya, Pimpinan MPR ingin dalam Sidang Tahunan MPR, kalau bisa, setiap lembaga negara menyampaikan



laporan kerjanya masing-masing secara langsung. Tapi, harapan itu sampai saat ini belum bisa terwujud.

Sekali lagi, kita mengharapkan atau sebaiknya pimpinan lembaga-lembaga negara menyampaikan laporan kerjanya masing-masing dalam Sidang Tahunan MPR agar masyarakat mendapatkan informasi lebih lengkap dari masing-masing lembaga negara. Katakanlah setiap pimpinan lembaga negara menyampaikan laporan kinerja lembaganya selama 30 menit kepada rakyat di depan forum Sidang Paripurna MPR.

**Kalau melihat pelaksanaan Sidang Tahunan MPR selama ini, yaitu Sidang Tahunan MPR yang dirangkai dengan Sidang Bersama DPR-DPD, bagaimana penilaian Bapak?**

Memang pelaksanaan Sidang Tahunan

MPR yang dirangkai dengan Sidang Bersama DPR-DPD ada plus dan minusnya. Plus-nya, agenda kenegaraan itu tidak memerlukan waktu yang lama dan menjadi lebih singkat. Sedangkan minusnya, informasi yang diperoleh menjadi tidak banyak, terutama bagi masyarakat yang berhubungan dengan lembaga negara tersebut. Meski, mungkin, lembaga negara itu sudah menyampaikan laporan kinerja melalui website mereka masing-masing, tapi kita perlu laporan kinerja lembaga negara secara komprehensif di Sidang Tahunan MPR dan menjadi agenda kenegaraan.

**Jika situasi dan kondisinya seperti itu, apakah Sidang Tahunan MPR tetap digelar untuk tahun-tahun berikutnya?**

Sidang Tahunan MPR masih tetap diperlukan. Kita mengharapkan, dalam Sidang Tahunan MPR ke depan sebaiknya laporan kinerja lembaga-lembaga negara disampaikan oleh masing-masing pimpinan lembaga negara sendiri. Bila perlu Sidang Tahunan MPR dilaksanakan secara terpisah menjadi sidang tersendiri, dilakukan satu hari sebelum pidato kenegaraan Presiden menyambut HUT Kemerdekaan Indonesia.

**Bagaimana agar harapan seperti itu bisa terwujud?**

Sesuai dengan ketentuan di MPR, tata cara Sidang Tahunan MPR sudah ada dalam Tata Tertib MPR. Masing-masing pimpinan lembaga negara menyampaikan laporan kinerja lembaganya masing-masing dalam Sidang Paripurna MPR. Sebenarnya tinggal dilaksanakan saja. □

Perbincangan Rumah Podcast Pemuda

# DPD Harus Menjadi **Jembatan** Menuju ke Tingkat Nasional



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

Wakil Ketua MPR RI, Prof. Dr. Ir. Fadel Muhammad berharap, DPD hendaknya fokus mengurus rakyat di daerah. “DPD bicara dengan kepala daerah, gubernur, dan bupati,” katanya.

**M**ASA periode pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) 2019-2024 berakhir pada September 2024. Wakil Ketua MPR, Prof. Dr. Ir. Fadel Muhammad, berharap, pimpinan dan anggota DPD yang baru, periode 2024-2029, hendaknya fokus pada pembangunan, kepentingan, dan masalah-masalah yang dihadapi daerah.

“DPD harusnya fokus pada pembangunan daerah. Kalau ada masalah-masalah yang dihadapi daerah, DPD harus menjadi jembatan untuk menyambung ke tingkat nasional. Jadi, tantangan ke depan adalah bagaimana mengubah DPD ke arah sana. Itulah harapan saya buat anggota DPD yang terpilih dan dilantik pada Oktober 2024 ini,” kata Fadel Muhammad dalam perbincangan Rumah Podcast Pemuda, Podcast-nya para pemuda Indonesia, di Roemah Pemoeda, Jl. Kramat Raya 108, Jakarta, Senin (12/8/2024).

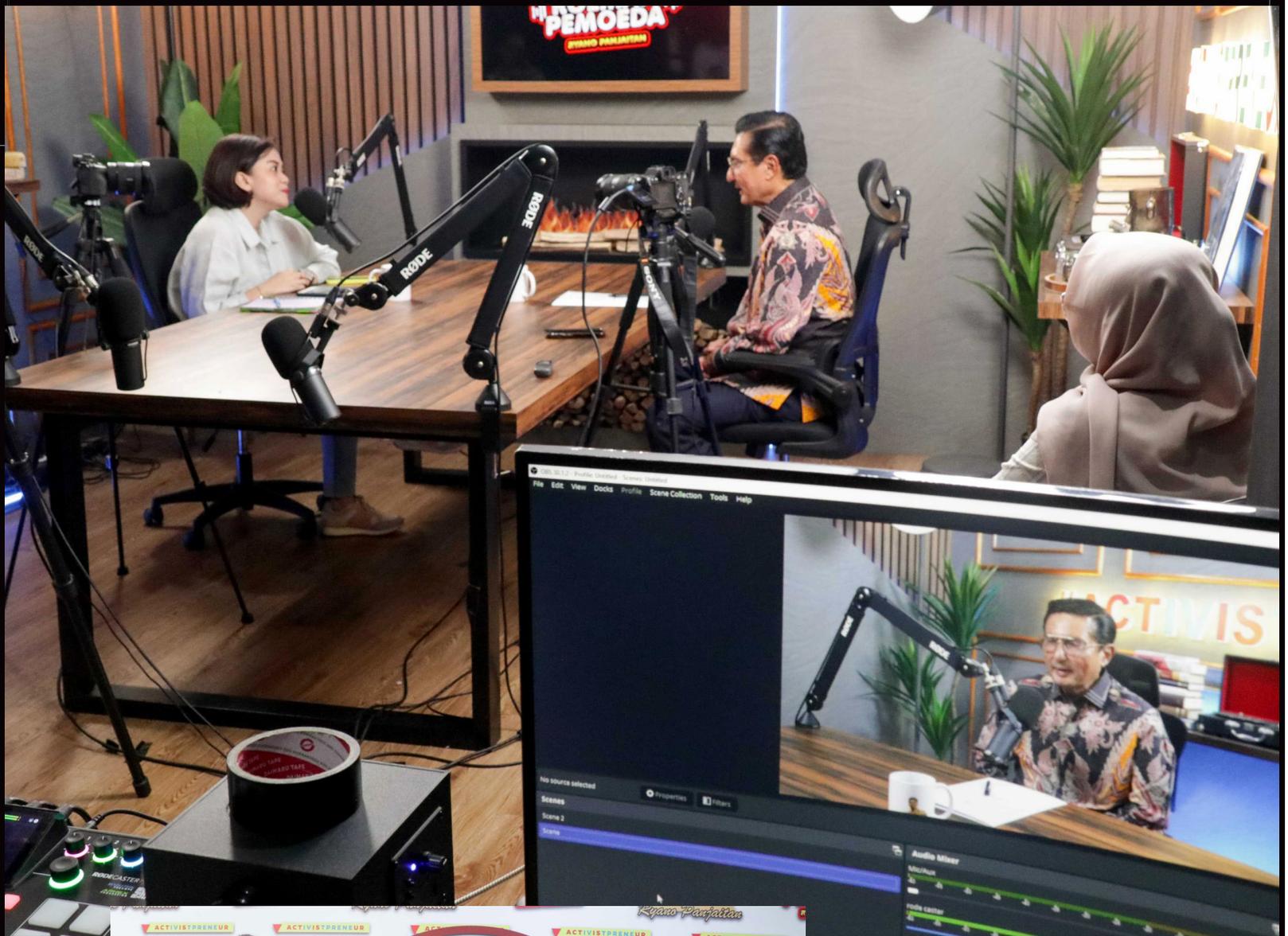
Fadel Muhammad berharap, pada periode mendatang DPD bisa berubah, tidak seperti sekarang, posisi DPD adalah *side by side* dengan DPR. “Seharusnya DPD sepenuhnya hanya mengurus pembangunan daerah. Sedangkan DPR mengurus hal-hal yang berkaitan dengan masalah-masalah nasional, dan lainnya. Sebaliknya, DPD harus mengurus rakyat di daerah, kepentingan di daerah, dan pembangunan di daerah. DPD bicara dengan kepala

daerah, gubernur, dan bupati,” katanya.

Wakil Ketua MPR dari Kelompok DPD ini menyebutkan, sekarang ini DPD malah lebih banyak mengurus masalah nasional. Bahkan, ada keinginan dari DPD untuk mendorong perubahan UUD kembali ke UUD 1945 yang asli. “Padahal kita sudah melewati masa 25 tahun, satu masa yang panjang, yaitu reformasi. Pada saat reformasi, UUD 1945 sudah mengalami empat tahap perubahan. Kita jangan kembali lagi ke awal. Kalau ingin perubahan UUD maka dilakukan perubahan kelima UUD. Dan, itu adalah tugas MPR, bukan DPD,” jelasnya.

Bagaimana agar DPD bisa berubah? Fadel Muhammad menjawab, pola pikir atau mindset anggota DPD harus berubah. Anggota DPD harus berpikir tentang pembangunan daerah. “Kepada anggota DPD yang baru perlu diberi penjelasan bahwa tugas utama DPD adalah pembangunan daerah. Kalau ada masalah-masalah daerah kita bawa ke tingkat nasional. Itu yang ingin saya kedepankan,” tuturnya.

“Karena itu, tantangan DPD periode mendatang adalah bagaimana agar mendapatkan pimpinan DPD yang concern dan mau untuk melakukan perubahan-perubahan buat kepentingan dan kemajuan daerah,” sambung Fadel Muhammad yang yang terpilih kembali menjadi anggota DPD dengan meraih 36,5% suara rakyat Provinsi



Gorontalo.

Berbicara tentang pemuda, Fadel Muhammad mengatakan, ada tiga hal jika anak-anak muda ingin maju. Pertama, anak muda harus inovatif. Kedua, anak muda harus berani membuat terobosan atau sesuatu yang baru. Dan, ketiga, anak

muda harus mempunyai network yang kuat. "Ini yang harus dimiliki anak-anak muda sekarang ini," ujarnya.

Untuk itu, lanjutnya, pemerintah harus mendorong pemuda agar kreatif dan inovatif. Para pemuda jangan hanya terbuai dengan kemajuan teknologi informasi (TI),

tetapi sebaliknya kemajuan TI bisa memacu pemuda untuk kreatif dan inovatif. Fadel Muhammad mencontohkan ketika menjadi Gubernur Gorontalo, dia selalu memberikan penghargaan kepada mereka, termasuk pemuda, yang berhasil melakukan inovasi dan terobosan baru. "Mereka diseleksi oleh Tim Penilai untuk mendapatkan penghargaan," kata mantan Gubernur Gorontalo dua periode ini.

Karena itu, Fadel Muhammad mengharapkan para pemuda harus menguasai IT. Penguasaan IT ini sudah menjadi keharusan dalam kehidupan saat ini dan masa depan. Selain itu, para pemuda juga harus menguasai bahasa asing, seperti Inggris, Arab, China, dan sebagainya. Penguasaan bahasa asing akan menaikkan level para pemuda sehingga tidak minder di forum-forum tertentu.

"Anak muda Indonesia punya masa depan yang bagus, karena potensi Indonesia ini sangat besar. Untuk itu, mereka harus terus belajar dan belajar," pungkasnya. □

Terima Penasihat Presiden Palestina Mahmoud al-Habbash

# Bamsoet Tegaskan Dukungan Bagi Kemerdekaan Palestina

Indonesia konsisten menyuarakan dukungan terhadap perjuangan bangsa Palestina untuk memperoleh kemerdekaan dan kedaulatannya secara penuh.



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

**K**ETUA MPR RI ke-16 sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo menerima Supreme Judge/Penasihat Presiden Palestina Urusan Agama dan Islam Dr. Mahmoud Sudqi Abdurrahman al-Habbash, yang menyampaikan informasi terkini di Palestina. Bangsa Palestina memperjuangkan kemerdekaannya lebih dari 100 tahun, kondisi saat ini lebih memprihatinkan dan lebih sulit dari tahun-tahun sebelumnya.

Melalui berbagai forum internasional, seperti PBB, OKI, hingga Gerakan Non Blok, Indonesia konsisten menyuarakan dukungan terhadap perjuangan bangsa Palestina untuk memperoleh kemerdekaan dan kedaulatannya secara penuh. Selama ini Indonesia juga rutin mengirimkan bantuan kemanusiaan hingga siap mengirimkan Pasukan Perdamaian ke Jalur Gaza apabila diminta oleh Dewan Keamanan PBB.

“Selain bantuan kemanusiaan, ke depannya akan coba ditingkatkan dengan

menggalang pengusaha Indonesia, khususnya pengusaha muslim, berinvestasi di Palestina. Melalui kerjasama *business to business* maupun dalam bentuk kerjasama ekonomi wakaf yang hasilnya bisa dimanfaatkan oleh warga Palestina untuk

meningkatkan kesejahteraan,” ujar Bamsoet.

Dalam tahap awal, katanya lebih lanjut, kerjasama business to business bisa menasar pada sektor wisata religi, dengan membuka kerjasama kepada agen travel perjalanan wisata di Indonesia dan Palestina

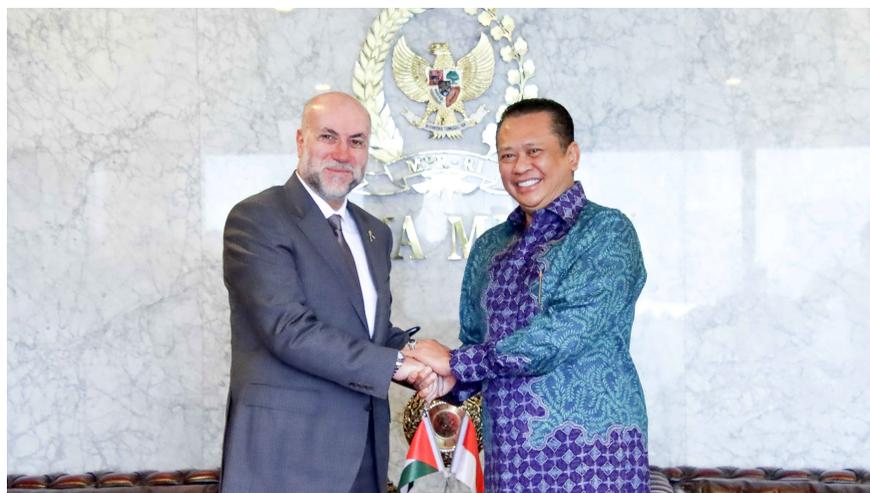




FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

untuk mempermudah kunjungan wisata ke Masjidil Aqsa,” ujar Bamsuet usai menerima H.E. Dr. Mahmoud Sudqi Abdurrahman al-Habbash, di Jakarta, Jumat (9/8/24).

Hadir, antara lain Wakil Ketua MPR RI Fadel Muhammad, Duta Besar Palestina Dr. Zuhair Al-Shun, Ketua PBNU Ulil Abshar Abdalla, dan Ahmad Suaedy, serta Wakil Sekjen PBNU Sidrotun Naim dan A. Ginanjar Sya’ban.

Ketua DPR RI ke-20 dan Ketua Komisi III DPR RI ke-7 bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, keberadaan Masjidil Aqsa sangat penting bagi umat Islam, karena terkait dengan peristiwa Isra Mi’raj Nabi Muhammad SAW. Perjalanan mi’raj Nabi Muhammad SAW menuju langit ketujuh terjadi di Masjidil Al-Aqsa. Setelah sebelumnya, Nabi Muhammad SAW melakukan perjalanan Isra dari Masjidil Haram menuju Masjidil Al-Aqsa.

“Banyak kaum muslim Indonesia yang

ingin melakukan wisata religi ke Masjidil Aqsa, namun kesulitan mencari akomodasinya. Peluang ini bisa dimanfaatkan untuk semakin meningkatkan kerjasama ekonomi antara Indonesia dengan Palestina. Dengan banyaknya kunjungan umat Islam ke Masjidil Aqsa, secara otomatis akan memberikan pesan tersendiri kepada dunia, sekaligus memberikan support tersendiri bagi penduduk lokal disana,” jelas Bamsuet.

Ketua Dewan Pembina Depinas SOKSI (Ormas Pendiri Partai Golkar) dan Kepala Badan Polhukam KADIN Indonesia ini menerangkan, hubungan Palestina dan Indonesia memiliki akar kesejarahan yang sangat erat, dimulai 80 tahun yang lalu. Tepatnya 6 September 1944, ketika seorang mufti besar Palestina, Syekh Muhammad Amin Al-Husaini, menyatakan pengakuan atas kemerdekaan Indonesia secara de facto, bahkan sebelum Indonesia

memproklamkan kemerdekaannya.

Di sisi lain, Indonesia pun menjadi salah satu negara pertama yang mengakui dan mendukung kemerdekaan Palestina setelah dideklarasikan 15 November 1988 di Aljazair, yang dilanjutkan penandatanganan Komunike Bersama Pembukaan Hubungan Diplomatik pada 19 Oktober 1989.

“Bahkan Presiden Pertama sekaligus founding fathers Indonesia, Soekarno, menegaskan dalam salah satu pidatonya di tahun 1962, bahwa selama kemerdekaan bangsa Palestina belum diserahkan kepada orang-orang Palestina, maka selama itulah bangsa Indonesia berdiri menentang penjajahan Israel. Hal ini sesuai dengan semangat konstitusi Indonesia yang menyatakan bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan,” pungkas Bamsuet. □



Delegasi Pengurus KB PII

# Bamsoet Dorong Peningkatan Ketahanan Pangan Nasional

Masa depan Indonesia bukanlah berada di pusat bisnis perkotaan, melainkan berada di desa sebagai penyedia utama pertanian.



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

**K**ETUA MPR RI ke-16 sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Bambang Soesatyo, menekankan pentingnya program makan bergizi gratis yang digagas Presiden Terpilih Prabowo Subianto dalam mengatasi kelaparan dan malnutrisi di Indonesia. Mengingat laporan Global Hunger Index 2023 hasil kerjasama organisasi Welt Hunger Hilfe (WHH) dan Concern Worldwide, menempatkan Indonesia berada di peringkat ke-77 dengan skor 17,6.

Angka itu menunjukkan bahwa tingkat kelaparan di Indonesia berada pada level moderat atau sedang. Sekaligus menempatkan Indonesia masih termasuk negara dengan indeks kelaparan tertinggi di ASEAN. "Selain mengatasi kelaparan, program makan bergizi gratis juga bisa mengatasi

berbagai permasalahan gizi buruk," ujar Bamsoet usai menerima jajaran pengurus Keluarga Besar Pelajar Islam Indonesia (KB PII) di Jakarta, Kamis (1/8/24).

Lebih lanjut Bamsoet menjelaskan, pada tahun 2024 diperkirakan sekitar 6,5% dari populasi mengalami kekurangan gizi atau undernourished, yang melibatkan kurang lebih 17,7 juta orang. "Atas dasar data itu menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan jumlah penduduk kurang gizi tertinggi di Asia Tenggara," ujar Bamsoet dalam pertemuan yang dihadiri jajaran KB PII, antara lain Waketum Ahmad SKJ dan Marfuah, Sekjen Asep Efendi, Wasekjend A. Toha Almansur, dan Sekbid. Kerjasama Ahmad Syarifudin.

Ketua DPR RI ke-20 dan Ketua Komisi III

DPR RI ke-7 bidang Hukum & Keamanan ini menjelaskan, persoalan pangan tidak bisa disepelekan. Pada tahun 2008, misalnya, dunia sempat mengalami krisis pangan global. Saat itu Food and Agriculture Organization (FAO) mengestimasi naiknya angka kelaparan global mencapai 40 juta jiwa. Perserikatan Bangsa-Bangsa melaporkan, pada tahun 2016 sebanyak 815 juta orang di dunia menderita kelaparan. Jumlah tersebut sama dengan 11% populasi penduduk dunia.

"Catatan akhir tahun 2022 menyajikan data krisis pangan yang memilukan. Diperkirakan, sekitar 345 juta orang penduduk dunia mengalami kelaparan akut, di mana 19.700 orang diantaranya meninggal dunia setiap harinya. Artinya, setiap empat

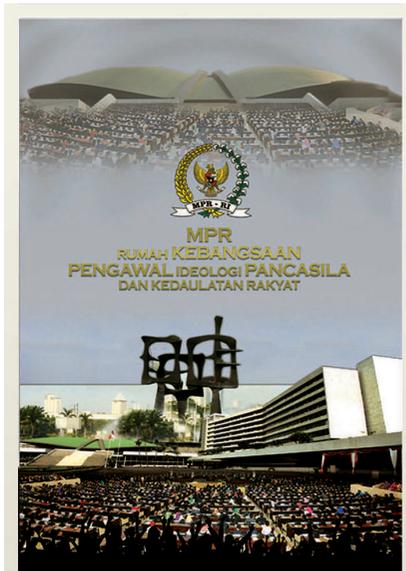


FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

detik, tercatat satu orang meregang nyawa karena kelaparan,” jelas Bamsuet.

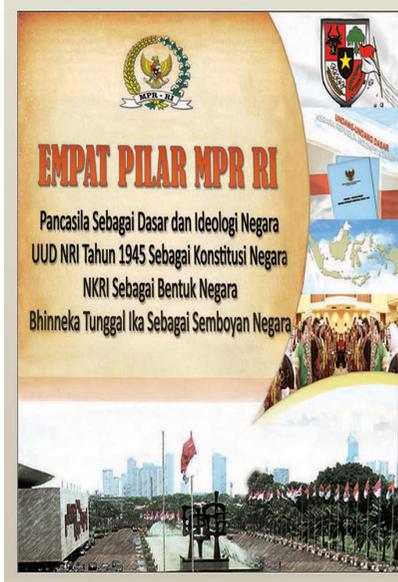
Ketua Dewan Pembina Depinas SOKSI (Ormas Pendiri Partai Golkar) dan Kepala Badan Polhukam KADIN Indonesia ini juga menekankan, masa depan Indonesia bukanlah berada di pusat bisnis perkotaan. Melainkan berada di desa sebagai penyedia utama pertanian. Pandemi Covid-19 harusnya telah membuka mata semua pemangku kebijakan, mulai pemimpin daerah hingga pusat, untuk menyadari bahwa kedaulatan terhadap pangan harus diutamakan.

Menurut Bamsuet, kita tidak boleh lagi bergantung kepada impor. Mengingat Indonesia dianugerahi tanah yang subur untuk pertanian, laut yang luas untuk perikanan, maupun udara segar untuk perkebunan. Tidak ada yang tidak bisa ditanam di sini. Tinggal bagaimana kita mengelolanya secara bijak. “Agar kedaulatan pangan bisa terwujud, pemerintah perlu mengajak serta berbagai kelompok masyarakat. Semakin banyak kelompok masyarakat yang terjun dalam usaha pangan, semakin baik bagi masa depan pangan nasional,” pungkasnya. □



### Implementasi Sila-sila Pancasila

-  - Berhenti saling menyakiti, mulailah saling menghargai
- Berhenti saling merendahkan, mulailah menghormati perbedaan
- Berhenti takabur, mulailah bersyukur
-  - Stop marah-marah, mulailah bersikap ramah
- Berhenti memaki, mulailah memakai hati
- Berhenti curiga, mulailah menyapa.
-  - Berhenti berseteru, mulailah bersatu
- Berhenti memaksakan, mulailah berkorban
- Berhenti mencari perbedaan, mulailah bergandeng tangan
-  - Berhenti silang pendapat, mulailah mencari mufakat
- Berhenti besar kepala, mulailah berlapang dada
- Berhentilah beristidradat, mulailah bermusyawarah
-  - Berhenti malas, mulailah bekerja keras
- Stop diskriminasi, mulailah toleransi
- Berhenti menang sendiri, mulailah berbagi





**Dr. K.H. Jazilul Fawaid, S.Q., M.A.**

Wakil Ketua MPR RI

## Nusantara Baru, Indonesia Maju

**T**AHUN 2024 menjadi momentum bagi Indonesia untuk melesat menjadi bangsa dan negara maju. Pertama, 2024 menjadi tahun sakral pembangunan infrastruktur fisik IKN di Kalimantan yang menjadi tonggak penting bagi pembangunan untuk tahap-tahap selanjutnya. Kedua, proses sirkulasi kepemimpinan di Indonesia berjalan dengan mulus dan tanpa konflik, penuh dengan spirit persatuan dan nuansa perdamaian. Hal ini menjadi penanda bahwa elit-elit politik yang berkompetisi pada pemilu semakin dewasa dalam bersikap. Ketiga, 2024 menjadi tahun yang penuh konsolidasi bagi elit pemerintah dan masyarakat untuk meningkatkan kapasitas kebangsaan di segala lini kehidupan guna mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Oleh karena itu, peringatan Hari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 2024 di IKN akan menjadi momen peringatan yang penuh makna. Nusantara Baru (baca; Ibu Kota baru) diharapkan menjadi modal dasar bagi terwujudnya cita-cita Indonesia maju di masa akan datang.

### Kunci Sukses

Keberhasilan suatu bangsa dan negara untuk menjadi negara maju tidak dicapai secara instan, melainkan melalui sebuah proses yang terencana dan dijalankan secara solid dan partisipatif oleh elemen-elemen di dalamnya. Amerika Serikat tumbuh menjadi Pax Americana menggantikan Pax Romana dan Pax Britannica pada periode pasca PD II (1945) dengan dukungan dari segenap elemen bangsa dalam menyuarakan jargon-jargon demokrasi, kebebasan sipil, dan kesetaraan hak asasi manusia. Pada masa itu, jargon-jargon ini masih seperti barang asing di tengah berkecamuknya realisme politik negara-negara Barat dalam mengejar dominasi ekonomi dan kekuasaan politik.

Amerika Serikat semakin menancapkan posisinya sebagai hegemoni dunia ketika elit-elitnya mampu mengawinkan antara hard power (baca; kekuatan militer) dan soft power (baca; keunggulan sosial, ekonomi, dan budaya), sehingga Amerika Serikat keluar sebagai negara dengan pertumbuhan

ekonomi yang progresif, kekuatan militer pilih tanding, dan banyak memiliki proksi-proksi politik di berbagai kawasan untuk menopang hegemoninya.

Kita juga perlu mencermati kebangkitan Tiongkok yang diprediksi akan menjadi imperium baru bernama Pax Sinica. Lesatan kemajuan Tiongkok di bidang militer dan ekonomi sungguh progresif. Adalah Deng Xiaoping, bapak modernisme Tiongkok, yang meniupkan ideologi pragmatisme kepada seluruh masyarakat. Tidak peduli kucing hitam atau kucing putih, yang penting bisa menangkap tikus. Inilah dasar megatrend politik dan ekonomi yang melanda Tiongkok dalam beberapa dasawarsa terakhir.

Tiongkok sangat menyadari bahwa mereka adalah bangsa bahari. Oleh karenanya, pembangunan kekuatan militer diarahkan pada pembangunan kekuatan maritim. Dengan kekuatan militer yang tangguh, Tiongkok tak sungkan untuk berkonflik dengan negara lain dalam menancapkan pengaruhnya. Salah satunya adalah konflik di Laut Cina Selatan yang masih berkobar hingga hari ini. Dengan kebijakan Belt Road Initiative dan Silk Road, Tiongkok berupaya menancapkan pengaruhnya di dunia melalui pendekatan ekonomi. Tiongkok menjelma menjadi alternatif pilihan dalam hal pinjaman ekonomi bagi negara-negara berkembang atau dunia ketiga yang selama ini merasa hanya diperbudak oleh Amerika Serikat melalui instrumen IMF dan Bank Dunia.

### Keunggulan Kompetitif

Indonesia memiliki modalitas yang besar untuk tumbuh berkembang seperti halnya Amerika Serikat dan Tiongkok. Pertama, Indonesia memiliki keunggulan geografis yang meletakkannya pada jalur strategis perdagangan dunia. Kedua, Indonesia mengalami surplus penduduk usia produktif yang dapat diberdayakan dalam menjalankan pembangunan nasional. Ketiga, Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah, baik sebagai negara agraris, maritim, maupun negara dengan potensi energi baru dan terbarukan paling prospektif di dunia. Keempat, pola diplomasi Indonesia di panggung internasional dilandasi oleh prinsip yang luwes atau

fleksibel, yakni diplomasi bebas dan aktif. Indonesia tak akan kesulitan mengoptimalkan semua relasi dalam mendukung kepentingan nasionalnya. Kelima, Indonesia memiliki keunggulan dalam hal khazanah budaya bangsa, yakni keragaman dalam hal suku, adat istiadat, agama, bahasa, dan lain-lain, yang notabene belum tentu dimiliki oleh negara lain.

Berbagai keunggulan komparatif tersebut perlu dikonversi menjadi keunggulan kompetitif agar bisa dimanifestasikan dalam bentuk capaian-capaian yang konkret dan bermanfaat bagi masyarakat. Kuncinya adalah pada aspek kepemimpinan. Indonesia membutuhkan kepemimpinan visioner (visionary leadership) yang kuat, mampu melihat persoalan secara luas dan memiliki gambaran besar mengenai quo vadis Indonesia di masa depan. Kepemimpinan Indonesia hari ini sejatinya sudah berada pada kriteria tersebut, demikian pula harapan kita pada kepemimpinan selanjutnya. Pemancangan visi Indonesia Emas 2045 dipandang sebagian kalangan pesimistis sebagai visi yang utopis dan lebih bermuatan selebrasi dan festivalisasi. Tapi bagi kalangan yang optimistis, visi Indonesia Emas 2045 tersebut merupakan bentuk komitmen seluruh elemen bangsa untuk menjadikan Indonesia sebagai bangsa dan negara emas, yakni negara dengan prinsip dan praksis kesejahteraan yang mampu memenuhi kebutuhan hidup rakyatnya akan sandang, pangan, dan papan dengan harga yang terjangkau, negara yang demokratis, serta negara yang berlandaskan pada koridor hukum di semua aspek kehidupannya.

Guna mewujudkan visi Indonesia Emas 2045, langkah yang ditempuh hari ini menjadi tolok ukurnya. Salah satu yang perlu kita cermati adalah pemindahan ibu kota negara dari DKI Jakarta ke IKN di Kalimantan. Pemindahan ibu kota negara ini didasari oleh spirit untuk mewujudkan pemerataan hasil pembangunan, serta pemerataan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Model pembangunan yang terjadi selama ini memang mampu memacu pertumbuhan ekonomi. Akan tetapi, hasil pembangunan lebih banyak terkonsentrasi di Pulau Jawa, lokasi ibu kota berada. Hasil pembangunan tidak menetes (trickle-down) ke daerah-daerah pinggir, khususnya kawasan Timur Indonesia. Alhasil, wilayah-wilayah seperti Aceh dan Papua, yang notabene merupakan wilayah kaya sumber daya alam, terjerembap sebagai provinsi termiskin di Indonesia. Papua bahkan bergejolak menuntut kemerdekaan sampai hari ini. Melalui pemindahan ibu kota negara ke wilayah tengah negara, dalam hal ini Pulau Kalimantan, diharapkan dapat lebih mewujudkan pemerataan. Pola seperti ini juga telah diterapkan oleh negara-negara lain yang melakukan

pemindahan ibu kota seperti Brazil, Kazakhstan, Turki, hingga Australia. Pemerintah bahkan memiliki visi yang lebih optimistis dengan menempatkan IKN sebagai pusat gravitasi nasional (center of gravity). Yakni, sebagai pusat pemerintahan, pusat ekonomi dan perdagangan, serta pusat pertahanan dan keamanan.

### **Soliditas Kebangsaan**

Pembangunan IKN yang berjalan hari ini memang belum bisa dikatakan sempurna, baik secara konsep maupun implementasinya. Kekurangan ini perlu kita sempurnakan bersama dengan urun rembuk dan senantiasa memberikan solusi bagi pemerintah. Dari sisi sosial budaya misalnya, ada potensi terjadinya konflik horisontal antara penduduk lokal dan pendatang apabila pemerintah tidak memiliki cetak biru dalam tata kelola kependudukan di IKN. Kalimantan memiliki sejarah panjang dalam menerima arus migran pada masa lalu. Komposisi penduduk Kalimantan Timur hari ini didominasi oleh para pendatang. Namun tantangan hari ini tentu saja berbeda dengan tantangan di masa lalu. Pemerintah perlu meresponsnya dengan kebijakan yang tepat.

Kekurangan lainnya, atau lebih tepatnya kerentanan lainnya, berada pada sisi pertahanan dan keamanan. Posisi ibu kota di Kalimantan memiliki kerentanan yang lebih besar dibandingkan dengan Jakarta. Kalimantan Timur berada pada jalur ALKI II yang merupakan jalur pelayaran internasional. Traffic potensi ancaman tentu jauh lebih tinggi. Indonesia juga masih berseteru dengan Malaysia di wilayah Sebatik dan Ambalat. Manajemen perbatasan yang belum solid berpotensi menimbulkan masalah perbatasan dan konflik perbatasan yang dapat berdampak secara langsung atau tidak langsung terhadap IKN. Persolan-persoalan inilah yang harus dicermati oleh pemerintah.

Pelaut yang tangguh tidak dibentuk oleh lautan yang tenang. Demikian juga bangsa yang besar tidak dibentuk oleh dinamika yang stagnan. Indonesia sudah melewati banyak halang rintang dalam usianya yang tidak lagi muda. Pemberontakan dan gerakan separatis di awal kemerdekaan, totalitarianisme orde baru, krisis moneter yang menghancurkan fondasi ekonomi, krisis politik 1998, hingga pandemi Covid-19 pada 2020 yang memakan banyak korban jiwa. Namun demikian, semua ancaman dan tantangan tersebut dapat dilalui dengan baik berkat soliditas kebangsaan yang kuat. Ini tentu menjadi modalitas penting dalam menyongsong mimpi besar Indonesia Emas 2045. Akhirul kalam, saya mengucapkan, selamat Hari Kemerdekaan Indonesia ke-79. Dengan Nusantara baru, kita songsong Indonesia maju. Dirgahayu negeriku. □





FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

Gus Jazil, sapaan Jazilul Fawaid, mengungkapkan, Indonesia memiliki nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila. Sedangkan nilai-nilai Pancasila bisa diterapkan di manapun. “Meski hanya lima sila, tetapi Pancasila bisa merangkai kekuatan dari Sabang sampai Merauke. Dengan Pancasila, berbagai agama dan kepercayaan bisa hidup berdampingan di Indonesia. Nilai persatuan sudah ada sebelum Indonesia lahir,” katanya.

Menurut Gus Jazil, nilai-nilai dalam Pancasila merupakan atau berasal dari puncak budaya bangsa Indonesia.

“Pancasila menjadi sesuatu yang hidup dan menjadi dasar di setiap etape perjalanan bangsa Indonesia. Pancasila menjadi kekuatan yang merekatkan seluruh kehidupan masyarakat Indonesia. Ini harus selalu kita jaga. Pancasila adalah *philosophische groundslag* yang menjadi jiwa, ruh, dan pikiran seluruh masyarakat Indonesia,” papar politisi PKB ini.

Karena itu, lanjut Gus Jazil, konstitusi dan undang-undang jangan sampai melanggar Pancasila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Perikemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang

dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. “Jangan sampai membuat UU yang diskriminatif, ‘melukai persatuan’, dan memecah belah,” tuturnya.

Dia menambahkan, nilai-nilai (Pancasila) itu dibentuk dan diajarkan melalui keteladanan. Karena itu, Gus Jazil mengusulkan agar BPIP memberikan penghargaan kepada tokoh atau orang-orang yang dinilai Pancasila-lais. “Penghargaan ini penting agar menjadi teladan, patron, bahwa itulah orang yang Pancasila-lais,” ujarnya.

Gus Jazil juga mengapresiasi pembentukan Majelis Kridatama Pancasila. Para tokoh yang terlibat dalam pembentukan Majelis Kridatama Pancasila ini telah melakukan langkah penting karena mengajak masyarakat kembali pada nilai-nilai (Pancasila) dan melestarikan budaya bangsa.

“Majelis Kridatama Pancasila harus membangkitkan kembali kekayaan nilai-nilai yang dimiliki Indonesia. Majelis Kridatama Pancasila jangan hanya mendalami dan mendiskusikan Pancasila, tetapi harus bisa mempraktikkan hal-hal kecil yang bisa dilakukan sehari-hari untuk menunjukkan bahwa Indonesia sebagai negara besar memiliki jati diri dan budaya yang unggul,” pungkasnya. □



## Sosialisasi Empat Pilar MPR RI Bersama KPPI

# Bamsoet Dorong Peningkatan Kesetaraan Gender

**K**ETUA MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo menuturkan, di tengah laju modernitas dan kemajuan zaman ternyata isu ketimpangan gender masih menjadi persoalan klasik yang mengemuka. Isu ketimpangan gender bahkan hampir selalu menjadi bagian dari dinamika kehidupan berbangsa dan mewarnai setiap periodisasi pemerintahan. Upaya pengarusutamaan gender sebagai program prioritas pembangunan masih bersifat jargon yang belum membumi dalam realisasi.

Merujuk pada data statistik dalam negeri, indeks ketimpangan gender (IKG) di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir cenderung mengalami stagnasi. Tahun 2011 Indonesia mendapatkan IKG sebesar 0,481, dan pada tahun 2023 sebesar 0,447. Artinya, tidak banyak perubahan yang berarti, selama kurun waktu duabelas tahun tersebut. Meskipun ada penurunan, namun angkanya tidak terlalu signifikan.

“Selain itu, berdasarkan laporan World Economic Forum tahun 2023, Indonesia berada di peringkat 87 dari 146 negara dalam Indeks Kesenjangan Gender Global. Peringkat ini menunjukkan bahwa kita masih memiliki banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan untuk mengurangi kesenjangan gender. Terutama dalam hal partisipasi ekonomi dan politik, serta akses terhadap pendidikan dan kesehatan,” ujar Bamsoet dalam Sosialisasi Empat Pilar MPR RI bersama Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) di Jakarta, Selasa (6/8/24).

Hadir, antara lain Ketua Presidium Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Saniatul Lativa, Sekjen Lis Dedeh, Dewan Pakar Endang S. Tohari, dan Nadrah Zahari.

Ketua DPR RI ke-20 dan Ketua Komisi III DPR RI ke-7 bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, banyak faktor yang menjadi penyebab masih eksisnya fenomena ketimpangan gender. Misalnya, masih kuatnya budaya patriarki dan seksisme, serta masih berkembangnya pola pikir yang cenderung menempatkan posisi kaum perempuan berada di bawah laki-laki.

Faktor lain misalnya, adanya kesenjangan



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

dalam memperoleh akses pendidikan dan pekerjaan. BPS mencatat tahun 2023 tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan masih berada di angka 54%, jauh lebih rendah dibandingkan laki-laki yang mencapai 84%. Ini mengisyaratkan bahwa perempuan masih menghadapi berbagai hambatan untuk berpartisipasi penuh dalam dunia kerja.

Kesenjangan gender juga tercermin dari akses perlindungan hukum. Secara global, menurut catatan Bank Dunia tahun 2024, akses perlindungan hukum yang diperoleh perempuan hanya sebesar dua per tiga atau sekitar 67 persen dari yang diterima laki-laki.

“Di samping itu, masih minimnya keterwakilan perempuan dalam pemerintahan dan proses politik juga tercermin dari masih lemahnya angka keterpilihan perempuan dalam Pemilu. Di mana pada tahun 2024 hanya mencapai 21,9% dari total quota yang dialokasikan sebesar 30%,” kata Bamsoet.

Ketua Dewan Pembina Depinas SOKSI (Ormas Pendiri Partai Golkar) dan Kepala Badan Polhukam KADIN Indonesia ini menerangkan, untuk mencapai keadilan dan kesetaraan gender perlu dilakukan perubahan pada berbagai fase. Pertama, diperlukan kebijakan yang lebih inklusif untuk

memastikan bahwa hak-hak perempuan dihormati dan dilindungi. Untuk itulah representasi perempuan di parlemen yang lebih banyak dibutuhkan, sehingga dapat menghasilkan kebijakan yang pro kesetaraan gender.

Kedua, penting disadari bahwa kebijakan dan undang-undang saja tidak akan cukup. Implementasi yang efektif dan perubahan budaya yang mendukung kesetaraan gender adalah kunci untuk mencapai tujuan ini. Salah satu tantangan terbesar adalah mengubah stereotip dan norma sosial yang masih membatasi peran perempuan dalam masyarakat. Pendidikan dan kampanye kesadaran publik sangat penting untuk mengatasi hambatan ini.

“Ketiga, sektor swasta juga memiliki peran penting dalam mendukung kesetaraan gender. Banyak perusahaan di Indonesia telah mengambil langkah-langkah untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih inklusif dan ramah gender. Program-program seperti kebijakan cuti melahirkan yang lebih baik, fleksibilitas kerja, dan dukungan bagi perempuan dalam posisi kepemimpinan adalah contoh upaya positif yang dapat diadopsi lebih luas,” pungkas Bamsoet. □

**Abdul Muthalib**

Forum Guntur PB HMI

## Perlunya Edukasi Tentang Nilai Kebangsaan kepada Pelajar dan Mahasiswa



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

**S**AYA mengikuti dan memantau banyak sekali pemahaman bagus dari seorang anggota Parlemen Prof. Fadel Muhammad, terutama tentang pemerintahan daerah, seperti paradigma Collaborative Governance dan Entrepreneurial Governance yang menurut saya sangat menarik.

Satu lagi soal perlunya hubungan kolaborasi antarparlemen, seperti DPR dan DPD. Prof. Fadel Muhammad menyebutnya sebagai Collaborative Parliament. Saya merasa hal tersebut sangat penting untuk menjadi bahan pembelajaran buat generasi muda pelajar dan mahasiswa Indonesia.

Terutama nilai-nilai kebangsaan yang ada. Saya berharap, di jangka panjangnya semua itu masuk dalam mata pelajaran dan mata kuliah, sehingga wawasan generasi muda akan terangkat sehingga dampaknya akan muncul sumber daya manusia yang bagus untuk pembangunan nasional.

Karena, sangat disayangkan jika pemikiran dari tokoh nasional, seperti Prof. Fadel itu hanya sekedar tema diskusi tanpa penjabaran dan implementasi kepada generasi muda bangsa. □

DER

**Putera Ansa Gaora**

Indonesia Student & Youth Forum

## Berkunjung Ke Parlemen Menambah Wawasan Pelajar

**S**AYA sangat menghargai, memberikan apresiasi serta menikmati kesempatan yang diberikan oleh MPR RI kepada kami, para pelajar Indonesia, untuk berkunjung. Luar biasanya lagi, bukan hanya sekedar berkunjung tapi juga diperkenankan berdiskusi, bertanya langsung dengan salah satu Pimpinan Lembaga Negara, MPR.

Hal ini sangat penting buat kami, sebab hampir semua pelajar belum tentu bisa mendapat kesempatan berdiskusi langsung dengan Pimpinan lembaga tinggi negara. Ini akan menambah wawasan buat kami, terutama tentang ketatanegaraan dan semua tentang kebangsaan, serta nilai-nilainya.

Saya sangat terkesan ketika Pimpinan MPR, Bapak Hidayat Nur Wahid, memberikan semangat dan gairah kepada kami bahwa kami adalah generasi penerus untuk duduk di kursi parlemen ini. Hal itu sangat menambah semangat kami untuk belajar lebih giat lagi.

Saya berharap, terbukanya akses parlemen kepada generasi muda ke depannya lebih ditingkatkan lagi. Dan, kerjasama antarpelajar dengan parlemen lebih banyak lagi dengan berbagai metode yang bagus. □



DER

**Oemah Kantjil**

# Warung Makan **Gratis** Samping Pintu Tol *Kukusan Kota Depok*



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

**F**AKTOR pengangguran, minimnya kesempatan kerja dan masalah kemiskinan masih menghantui bumi Indonesia. Pada saat yang sama, harga-harga kebutuhan pokok terus meroket membuat kehidupan sebagian masyarakat terasa berat. Karena itu, setiap kali digelar bazar murah, apalagi pembagian sembako gratis, masyarakat yang rela berpanasan datang berbondong-bondong ikut mengantri.

Begitupun dengan pembagian makanan gratis, yang jumlah porsi terus bertambah. Momen Jumat berkah yang digelar di masjid-masjid setelah salat Jumat laris manis, jatah yang disediakan tak pernah tersisa. Demikian pula rumah makan-rumah makan gratis selalu dipenuhi oleh mereka yang membutuhkan. Seperti yang dialami oleh Oemah Kantjil, rumah makan gratis yang berada sekitar 100 m dari pintu tol Kukusan Kota Depok, Provinsi Jawa Barat.

Beberapa waktu lalu ketika Majalah *Majelis* datang ke tempat itu, sekira pukul 11.00 WB, kami mendapati pemandangan yang cukup mengharukan. Terdapat puluhan sepeda motor terparkir, bukan hanya di halaman depan Oemah Kantjil itu sendiri, tapi sudah melebar ke toko yang ada di sebelahnya dan merembet ke sebelahnya lagi. Bahkan, ada yang

terpaksa parkir di seberang jalan, meski di situ tidak ada trotoarnya, sehingga terpaksa memakan bahu jalan.

Sedangkan di dalam warung gratisnya sendiri, antrian sudah mengular. Mereka menunggu giliran mendapatkan jatah nasi, sayur, dan lauk pauknya. Sementara di kanan-kiri tempat mereka mengantri, terdapat meja-meja lesehan yang kesemuanya penuh, ditempati oleh orang-orang yang sedang menikmati hidangan santap siang.

Di antara mereka yang mengantri, mayoritas adalah kalangan pengendara ojol. Itu bisa diketahui dari jaket kerja yang

mereka kenakan. Kemudian terdapat beberapa wanita dewasa dengan pakaian yang lusuh. Ada juga pengamen, bahkan seorang bapak dengan dua anaknya yang masih mengenakan baju seragam, penanda bahwa anak-anaknya baru pulang sekolah.

Selain yang mengantri, mereka yang datang dan pergi terus bergantian. Praktis dua relawan yang melayani, masing-masing Dimas Prayuda alias Kibow dan Ramdi, tidak dapat beristirahat meski untuk sesaat. Dia terus mengambilkan jatah sayur dan lauk, sepantasnya. Karena, untuk urusan nasi setiap orang bisa mengambilnya sendiri-sendiri.





FOTO-FOTO: ISTIMEWA

Pemandangan tersebut berlangsung tak sampai satu jam lamanya. Sekira pukul 11.45 WIB, salah satu pintu gerbang mulai di tutup. Itu pertanda stok makanan makin menipis. Lalu, tak sampai sepuluh menit kemudian, dipasanglah selebar kertas yang sudah dilaminating. Dikertas itu tertulis satu kata: "habis." Meski begitu ada saja yang datang seakan belum percaya stok makanan sudah habis, dengan mengajukan sekedar pertanyaan: 'sudah habis ya', 'gak ada sisa mas,' dan ada pula dengan nada mengeluh 'wah terlambat ya.'

### Penerima Manfaat

Bagi Majalah *Majelis*, suana dan kebersamaan yang tercipta di Oemah Kantjil sangat mengharukan. Betapa tidak, di jalanan sana ternyata masih sangat banyak saudara-saudara sebangsa dan se tanah air yang butuh perhatian. Bahkan, karena merasa senasib sepenanggungan, mereka yang datang ke Oemah Kantjil tampak seperti

saudara. Ungkapan terima kasih yang disampaikan kepada para relawan demikian tulus, tanpa pamrih. Sementara relawan sendiri menanggapi ketulusan para penerima manfaat dengan penuh keikhlasan.

"Beberapa orang sudah menjadi pelanggan di sini, kami tidak masalah, dilayani laiknya yang lain. Biasanya, kalau pertama datang akan ketahuan, sikapnya terlihat ragu-ragu dan kikuk. Tapi kalau pernah ke sini mereka sudah tahu aturannya. Datang, cuci tangan, lepas alas kaki, mengantri, isi daftar tamu, selesai makan menempatkan piring di tempat yang sudah disediakan," kata Dimas Prayuda sembari mengelap meja dari kotoran yang tertinggal di sana.

Oemah Kantjil sendiri relatif baru berdiri, sekitar 3 bulan lalu. Tepatnya, sejak 15 Juni 2024. Inisiatornya bernama Ari Wibowo, seorang pengusaha rumah sakit. Selain Oemah Kantjil, Ari Wibowo ini juga sudah biasa menjadi donatur bagi kegiatan sosial

kemanusiaan yang lain. Dinamakan Oemah Kantjil, karena di sana terselip harapan, meski kecil laksana kancil tapi bisa memberi manfaat pada sesama.

Saat awal dibuka tidak banyak orang yang datang. Sehingga 50 porsi makan siang yang disediakan, waktu itu, baru habis setelah siang menjelang sore. Baru setelah tiga hari, mulai banyak yang datang. Sekarang setiap hari Oemah Kantjil menyediakan 100 porsi makan siang, dan habis dalam 30 menit sampai 1,5 jam. Hidangan makan siang yang disediakan berupa nasi beserta lauknya, seperti telur, ayam, ikan, dan daging, serta lauk pendamping (tempe atau tahu) sayur, dan buah

"Mereka yang mau makan sudah menunggu sejak pukul 10.00 WIB, sebelum warung buka. Mendekati pukul 11.00 WIB, menjelang warung dibuka, antrian sudah mengular. Jadi, pas warung buka pelanggan langsung menyerbu," ungkap Dimas lagi.

Penambahan porsi dilakukan, menurut Dimas, karena jumlah penerima manfaat yang datang terus meningkat dan semakin banyak. Saat bersamaan, ada masyarakat sekitar yang turut membantu menyediakan sajian makan siang. Baik dalam bentuk tenaga maupun bahan-bahan makanan.

"Karena memang ada yang mau membantu, ya kami terima saja, apapun bentuknya dan bagaimanapun caranya, intinya tidak ada yang kami tolak, baik makan matang, mentah maupun dalam bentuk uang," kata Dimas lagi.

Intinya, siapa saja boleh makan. Terkadang ada orang yang dari penampilannya terlihat mampu juga ikut makan. "Pernah ada orang tampaknya mampu ikut makan, namun setelah tahu dagangnya habis, dia tidak jadi, padahal sudah ikut mengantri," pungkas Dimas. □

MBO

## Bisakah Ormas Keagamaan Mengelola Tambang?

Terjadi pro dan kontra terhadap kebijakan pemerintah memberikan jatah pengelolaan tambang kepada organisasi masyarakat (ormas) keagamaan. Ormas keagamaan yang selama ini lebih banyak mengurus pemberdayaan masyarakat, namun ketika diberi jatah mengelola sektor padat modal dan potensi merusak alam, mampukah mereka menjawab semua itu. Berikut pendapat wakil rakyat menyikapi masalah itu.

**Nasyirul Falah Amru** Anggota MPR Fraksi PDIP

### Mau Mengambil Tambang Silahkan, Kita Awasi Secara Ketat



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

**P**EMBAGIAN tambang untuk ormas itu sesungguhnya ada niatan agar tambang tidak dikuasai oleh orang-orang tertentu saja. Soal konsesi tambang ini pernah disampaikan Presiden Joko Widodo saat Pembukaan Mukhtamar NU di Lampung Tahun 2021. Meski demikian, mengurus tambang itu susah, karena ketika sudah ada IUP harus ada jaminan mampu mereklamasi pasca menambang, modal usaha, dan sebagainya.

Banyak pengelolaan tambang yang sampai sekarang juga masih ruwet dengan berbagai macam persoalannya. Kalau diberikan ke ormas, ormas kan tidak pernah memegang tambang. Saya pikir kebijakan memberikan konsesi tambang kepada ormas dari satu sisi ada baiknya. Baiknya, supaya ada pemerataan, tidak hanya dikuasai oleh konglomerasi dan orang-orang tertentu saja. Di sisi lain, seperti yang

dikatakan Ketua Umum PDI Perjuangan bahwa yang dibutuhkan masyarakat sekarang adalah swasembada pangan. Beras kita masih impor dan sebagainya. Nah, ini yang harus lebih diperhatikan.

Bila banyak ormas yang mau menerima pembagian tambang, itu hak mereka. Mau mengambil silahkan, tidak ya silahkan. Fungsi kita di DPR adalah pengawasan. Jangan sampai membagi-bagi, kemudian ormas mengelolanya serampangan, tidak berpihak pada lingkungan, merusak alam, dan sebagainya. Ini justru menambah parah pertambangan yang ada Indonesia.

Soal kebijakan bagi-bagi tambang yang dikeluarkan sekarang, saya pikir itu haknya pemerintah. Tapi, kalau bicara bijak atau tidak bijak harusnya ditimbang lebih matang. Dampak dan mudaratnya seperti apa. Sekarang sudah terjadi, NU mengambil, Muhammadiyah mengambil, dan ada ormas

lain yang mau mengambil, ya *monggo* terserah saja. Kita sebagai anggota DPR melakukan fungsi pengawasan yang secara ketat. Akan kita awasi. Kalau dari PDI Perjuangan kita lebih memfokuskan kesejahteraan rakyat.

Sumber daya manusia (SDM) dari ormas untuk mengelola tambang yang saat masih berkuatnya dengan bidang yang terkait dengan keagamaan, pendidikan, mengurus umat. Bila mengurus tambang mungkin mereka mampu dan mungkin juga tidak. Kita tidak bisa mengatakan ormas tidak mampu, kita juga tidak bisa mengatakan mampu, tergantung kesiapan masing-masing ormas. Di PBNU, saya melihat SDM-nya mumpuni, bisa melaksanakan dan menjalankan pengelolaan tambang, tetapi di ormas lain saya tidak mengerti apakah mereka mempunyai SDM-nya ada atau tidak. Namun, ketika ormas diberi pilihan kemudian mengambil, saya pikir mereka mampu. Kalau tidak mampu pasti tidak mengambil.

Hasil dari pengolahan tambang (uang), pembahasannya belum sedetail itu. Saya pikir hasil tambang untuk kemaslahatan umat. Untuk *ngompeni* pesantren, karena kita tidak boleh terus-menerus meminta bantuan kepada pihak-pihak sponsor, CSR, atau sumber pemberi dana lainnya. Kita harus mandiri dan berdikari.

Soal dampak yang terjadi, dari awal saya sudah menyampaikan bahwa persoalan tambang ini rumit. Ketika ormas sudah mengelola pasti ormas sudah berpikir soal kelestarian alam yang harus dijaga. Saya pikir pikiran ormas lebih maju dari pada pengusaha yang pikirannya semata-mata rupiah saja. □

AWG

**Mulyanto** Anggota MPR Fraksi PKS

## Merusak Aturan Tata Kelola Pertambangan

**S**AYA khawatir tata kelola tambang mineral ke depan kian berantakan menyusul kian banyak ormas agama yang ingin mendapat hibah konsesi pertambangan. Kebijakan ini akan bermasalah di kemudian hari, setidaknya akan menimbulkan kecemburuan antar-ormas dan membuat aturan perizinan tambang tidak objektif.

Setelah ormas keagamaan besar menerima tawaran konsesi tambang dari pemerintah, bahkan MUI tengah mengkaji untuk memanfaatkan peluang ini, kini Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI) tengah mengkaji kesiapan mereka terkait soal pengelolaan tambang.

Khawatir ormas yang ingin mendapat izin usaha pertambangan terus bertambah dan kalau Pemerintah menyetujui semua justru akan merusak aturan yang selama ini berlaku. Saya memperkirakan kebijakan pemberian izin pengelolaan tambang kepada ormas akan berdampak negatif pada tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Pemerintah tidak bisa membedakan lagi tugas, fungsi, dan program kegiatan antara sektor usaha, yang mengurus ekonomi, dengan ormas sebagai sektor ketiga, yang mengurus masyarakat sipil. Ujung-ujungnya terjadi tumpang tindih dan memicu kekacauan di lapangan. Itu sebabnya, dalam UU Minerba amanat 'pengusahaan' mineral diberikan kepada badan 'usaha', termasuk koperasi. Karena ini masalah pengusahaan, ya harus dilakukan oleh ahlinya, mereka yang memiliki spesialisasi dan kompetensi.

Kebijakan pemberian izin pengelolaan tambang kepada ormas sebagai cara pemerintah memperbaiki citra yang makin merosot. Tapi, sayangnya cara yang ditempuh salah. Lebih miris lagi, melalui revisi PP Minerba, Pemerintah memberikan prioritas



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

secara khusus kepada ormas keagamaan, yang jelas-jelas bertentangan dengan UU Minerba yang memberikan prioritas hanya kepada BUMN/BUMD. Sebaiknya, Pemerintah yang berumur kurang dari dua bulan lagi ini mempertimbangkan untuk mencabut aturan baru tersebut.

Menjelang purna tugas, *mandeg pandhita*, Pemerintah semestinya bersiap-siap pamit mundur dan memberi jalan kepada Presiden Terpilih. Bukan malah *ngegas* kejar tayang saat *injuri time cawe-cawe* mengintervensi ormas. Ungkapan demikian dikatakan dalam rilis yang beredar di kalangan wartawan pada awal Agustus/*fraksi.pks.id*.

Dalam web yang sama, *fraksi.pks.id*, ia menyatakan terkejut atas keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang akhirnya menyetujui mengambil izin konsesi pertambangan yang diberikan oleh pemerintahan Joko Widodo. Keputusan ini tentunya menjadi pertanyaan publik atas sikap Muhammadiyah yang selama ini dikenal kritis.

Saya terkejut dengan keputusan Muhammadiyah tersebut. Sikap Muhammadiyah

seperti ini kan tidak biasanya. Biasanya Muhammadiyah dan para tokohnya cukup kritis terhadap kebijakan Pemerintah yang ada, apalagi kebijakan yang terjadi pro-kontra di dalam masyarakat.

Dengan penerimaan atas konsesi tambang tersebut, tentunya masyarakat menangkap sinyal, bukan saja berarti Muhammadiyah menyetujui substansi norma yang terkandung dalam regulasi pemberian izin tambang kepada Ormas keagamaan tersebut, tetapi bahkan mendukungnya.

Dengan sikap tersebut, Muhammadiyah terkesan mulai turun dari wilayah *high politics* ke wilayah *low politics*. Tentu ini akan ada resiko politiknya, baik dari internal maupun dari pihak masyarakat umum. Hal ini, menurutnya, penerimaan konsesi tambang tersebut rawan bagi Muhammadiyah, karena bisa saja Peraturan Pemerintah (PP) yang menjadi dasar hukum pemberian prioritas konsesi tambang tersebut dijudisial review dan dibatalkan oleh Mahkamah Agung. □

AWG

## Mencari Titik Temu Pengaturan **Hubungan** Pemerintah Pusat dan Daerah



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

Hubungan antara pemerintah pusat dan daerah banyak menimbulkan perdebatan yang berakibat pada tarik-menarik kepentingan antara keduanya. Upaya pemerintah pusat untuk selalu memegang kendali seluruh pemerintahannya merupakan masalah yang masih berlangsung di Indonesia. Untuk solusinya, MPR mencari titik temu dengan melibatkan akademisi dari Universitas Ibnu Khaldun.

**B**ERTEMPAT di Kota Bogor, Jawa Barat, Juli 2024, Badan Pengkajian MPR menggelar *focus group of discussion* (FGD) bersama dengan akademisi Universitas Ibnu Khaldun (Bogor). FGD yang digelar mulai pukul 14.00 WIB itu bertema: *Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah*. Dari pihak MPR hadir Drs. H. Hasan Basri Agus, M.M., (Fraksi Partai Golkar), IGN Kesuma Kelakan, S.T., M.Si., (Fraksi PDI Perjuangan), Ir. H. Tifatul Sembiring (Fraksi PKS), Drs. H. Guntur Sasono, M.Si., (Fraksi Partai Demokrat), Dr. Darmadi Duriyanto, S.E., M.MBA., (Fraksi PDI Perjuangan), dan Hj. Andi Yuliani Paris (Fraksi PAN).

Sedang dari pihak kampus Ibnu Khaldun, hadir dua akademisi yakni: Prof. Dr. H.E. Mujahidin, M.Si., dan Assoc Prof. Dr. Renea Sinta Aminda, SE., MM.

Dalam makalah yang tertulis dua nama akademisi (*prepared by*) tersebut memaparkan secara panjang lebar mengenai hubungan pemerintah pusat dan daerah. Sebagian materi makalah kami sajikan di sini: Indonesia, sebagai negara kepulauan, menghadapi tantangan

dalam memastikan standar hidup yang memadai, koordinasi kebijakan, ataupun pengelolaan keuangan yang efektif. Untuk mengatasi hal ini, Indonesia menerapkan konsep desentralisasi.

Desentralisasi memberikan kesempatan kepada daerah-daerah untuk mengelola wilayah mereka sendiri sesuai dengan kebutuhan dan karakteristiknya. Tanpa disadari sistem desentralisasi di Indonesia digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Keberagaman agama di Indonesia mendorong berbagai bidang untuk menerapkan sistem desentralisasi, salah satunya pada sistem pendidikan. Mekanisme desentralisasi pada pendidikan agama bertujuan untuk memberikan kewenangan kepada pihak sekolah untuk membuat kebijakan pada kurikulum sesuai nilai-nilai pada daerahnya.

Desentralisasi juga memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih dekat dengan pelaksanaan di lapangan. Meskipun sistem desentralisasi pada pendidikan agama memiliki dampak positif, namun pemerintah pusat harus tetap melakukan pengawasan guna mencegah penyalahgunaan wewenang yang dapat menguntungkan



beberapa golongan.

Begitu pun pada sisi keuangan pemerintah, desentralisasi fiskal tidak hanya mendorong kemandirian daerah sebagai fondasi otonomi daerah, tetapi juga bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dalam penggunaan sumber daya lokal. Namun, tingkat kemandirian keuangan daerah di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Hal ini dapat dilihat dari data yang menunjukkan bahwa Transfer ke Daerah terus meningkat setiap tahunnya.

Menurut teori "ketergantungan fiskal" (*fiscal dependency*), situasi ini menggambarkan ketergantungan yang tinggi dari daerah-daerah pada transfer dana dari pemerintah pusat.

Ketergantungan fiskal ini menunjukkan bahwa banyak daerah masih bergantung pada sumber pendapatan dari pemerintah pusat untuk memenuhi kebutuhan keuangan. Teori Ketergantungan Fiskal bertolak

belakang dengan apa yang dikatakan oleh Teori Wagner: Kenaikan TKD setiap tahunnya mencerminkan pertumbuhan ekonomi secara positif. Alasannya, peningkatan TKD bisa saja menggambarkan kebutuhan masyarakat yang terus naik. Oleh karena itu, terdapat dua kemungkinan yang belum tetap pada saat TKD mengalami kenaikan. Solusinya adalah pemerintah pusat harus sering mengontrol dan mengidentifikasi apakah pemerintah daerah mengelola dana yang diberikan oleh APBN sudah efisien dan tepat sasaran.

Transfer ke daerah mengalami kenaikan dari tahun 2014 hingga 2019 dan 2020 hingga 2023. Menurunnya TKD dari 2019 ke 2020 disebabkan oleh Pandemi Covid-19. Pada saat itu pemerintah pusat melakukan relokasi anggaran untuk menangani krisis kesehatan dan pemulihan ekonomi. Keputusan pemerintah dalam merelokasi anggaran sesuai dengan efek pergeseran

dan konsentrasi pada Teori Peacock dan Wiseman, di mana peristiwa besar memaksa pemerintah untuk meningkatkan pengeluarannya dan memusatkan anggaran pada area tertentu yang paling membutuhkan. Artinya, anggaran belanja pemerintah pusat merupakan fokus utama pada saat terjadinya Covid-19.

Jika Transfer Ke Daerah (TKD) yang diterima oleh suatu daerah terus meningkat tanpa adanya upaya serius untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) maka daerah tersebut cenderung menjadi lebih bergantung pada transfer tersebut. Hal ini dapat mengurangi insentif untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan daerah dan mengoptimalkan potensi sumber daya lokal. Akibatnya, kemandirian keuangan daerah dalam jangka panjang dapat terganggu karena bergantung pada stabilitas dan kebijakan transfer dari pemerintah pusat.



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

Untuk mengatasi dampak negatif tersebut, penting bagi pemerintah pusat dan daerah untuk bekerja sama dalam memperkuat kapasitas pengelolaan keuangan daerah, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, serta memastikan bahwa dana transfer digunakan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Selain itu, bagi daerah dengan kemandirian keuangan yang relatif tinggi, proporsi transfer yang berasal dari APBN dapat dikurangi secara progresif. Pemerintah daerah juga perlu mengurangi ketergantungannya pada TKD dengan meningkatkan PAD melalui peluang pengembangan ekonomi lokal (Alvaro, 2022).

Untuk meningkatkan PAD, pemerintah daerah dapat mengatur ulang pos-pos dana yang didapatkan melalui TKD untuk pembangunan yang lebih produktif. Misalnya, pemerintah daerah dapat mengalokasikan lebih banyak TKD ke pembangunan infrastruktur (Andriana, 2020). Oleh karena itu, dalam tulisan ini akan dianalisis lebih lanjut bagaimana dinamika pengaturan ideal antara hubungan pemerintah pusat dan daerah, khususnya efektivitas dalam pengelolaan TKD, tantangan yang dihadapi, dan dampaknya terhadap pembangunan ekonomi daerah.

### Pengaturan Ideal Hubungan Pusat dan Daerah

Perubahan Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengubah cara pandang mengenai hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Penekanan pada prinsip otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab tidak hanya tertulis dalam undang-undang, tetapi juga harus benar-benar dijalankan. Perpindahan kewenangan, kelembagaan, keuangan, dan pengawasan dari pemerintah pusat ke daerah dalam aspek ekonomi maupun politik merupakan substansi



penting agar pembangunan di Indonesia memiliki keberlanjutan yang adil dan merata. Dengan demikian, perubahan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 mempertajam konsep otonomi daerah.

Hubungan antara Pusat dan Daerah banyak menimbulkan perdebatan yang berakibat pada Tarik-menarik kepentingan antara keduanya. Upaya pemerintah pusat untuk selalu memegang kendali seluruh pemerintahannya merupakan masalah yang masih berlangsung di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada Maret 2020, Virus Covid-19 mulai melanda Indonesia, di mana pada saat itu pemerintah yang memiliki wewenang, tugas, dan tanggung jawab untuk mengambil strategi pencegahan dan penanganan justru mengalami ketimpangan wewenang antara pusat dan daerah. Ketimpangan timbul akibat dari kurangnya informasi dan data terkait Covid-19. DKI Jakarta merupakan salah satu provinsi dengan populasi terbanyak menjadi sorotan terkait hubungan pemerintah pusat dan daerahnya. Salah satu penyebab ketegangan diakibatkan oleh perbedaan persepsi, di mana pemerintah pusat memutuskan untuk menyimpan data terkait Covid-19 secara tertutup agar masyarakat tidak merasa khawatir, sedangkan PemProv

DKI Jakarta justru memilih keterbukaan kepada masyarakat terkait informasi maupun data dengan tujuan transparansi dan meningkatkan kepercayaan masyarakat. Penyebab ketegangan adalah Pemerintah Pusat menolak pengajuan lockdown dari PemProv DKI Jakarta dengan alasan tidak adanya UU yang mengatur pembatasan sehingga Pemerintah Pusat menganggap sulit untuk menerapkan peraturan tersebut di daerah-daerah.

Secara teoritis, sudah seharusnya hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemprov DKI pada saat itu menggunakan model interaksi (*Interaction Model*), namun model agensi (*Agency Model*) yang justru mendominasi sistem desentralisasi. Dalam model ini, Pemerintah Pusat satu-satunya pihak yang bisa menetapkan kebijakan, sementara Pemprov DKI hanya bertugas untuk melaksanakan kebijakan sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan. Dalam sistem pemerintahan seperti ini, pengontrolan dari pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah masih sangat dominan, sehingga menimbulkan ketidakmampuan kemandirian pemerintah daerah dalam mengelola wilayahnya. Selain itu, kebijakan dalam penanganan Covid-19 hanya bersifat top down. Keputusan Pemprov DKI untuk melakukan lockdown tidak bisa berjalan tanpa persetujuan dari Pemerintah Pusat. Dalam situasi darurat, kecepatan dan ketepatan pemerintah provinsi justru dibutuhkan dengan cara penerapan sistem local selfgovernment. Dibandingkan dengan pendekatan top down justru wewenang yang dimiliki pemerintah daerah, yaitu pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan yang justru dibutuhkan pada saat situasi Covid-19 (Ryan, 2022).

Perjalanan untuk menemukan pengaturan ideal antara pemerintah pusat dan daerah memang tidak mudah. Oleh karena itu, keseimbangan merupakan kata kunci paling penting dalam hubungan keduanya. Mengacu pada Undang-Undang Pasal 1 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, yang tertulis bahwa kedaulatan dan kekuasaan utama tetap berada pada pemerintah pusat untuk



menjaga integritas nasional, sementara pada Pasal 18 ayat (1) mengakui dan memberikan ruang bagi otonomi daerah untuk mengelola urusan lokal secara mandiri, tetapi tetap dalam kerangka kesatuan negara. Kedua pasal ini menunjukkan bahwa sistem pemerintahan Indonesia berusaha mencapai keseimbangan antara sentralisasi dan desentralisasi.

Ke depannya, diperlukan pengelolaan hubungan dan posisi pemerintah pusat dan daerah secara komprehensif. Sistem ini diperlukan untuk memberikan jaminan dan kekuatan bagi kelangsungan pemerintahan dan tata kelola pemerintahan daerah. Ketentuan yang jelas dapat membantu mencegah terciptanya ego dari kedua belah



pihak untuk saling mendominasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, serta mencegah keberpihakan dan afiliasi politik antara kepala pemerintahan pusat dan kepala pemerintahan daerah (Ropii, 2015).

### **Pengelolaan Sistem Otonomi Daerah Diiringi Keberlanjutan SDA**

Dalam konsep desentralisasi fiskal, pemerintah mentransfer sejumlah dana perimbangan yang di antaranya adalah Dana Bagi Hasil (DBH) atas tujuan penguatan otonomi daerah. Nyatanya, mekanisme perhitungan DBH berhasil mengurangi kesenjangan vertikal antara pemerintah pusat dan daerah. Dapat dilihat bahwa peningkatan DBH dalam 4 tahun terakhir diiringi oleh penurunan DAU secara signifikan. Peningkatan DBH dapat menyebabkan penurunan DAU, karena peningkatan DBH meningkatkan kapasitas fiskal daerah. Pemerintah pusat mungkin mengalokasikan lebih sedikit DAU ke daerah tersebut untuk menjaga keseimbangan dan mendorong pemerataan antardaerah.

Meskipun DBH dapat memperbaiki masalah vertikal antarpusat daerah, namun perhitungan DBH masih belum optimal dalam memperbaiki sistem horisontal antardaerah ke daerah lainnya. Di mana perhitungan DBH tidak memihak daerah yang memiliki pemasok SDA yang kecil. Pada tahun 2023, jumlah DBH paling besar di Indonesia ditempati oleh Provinsi Kalimantan Timur, yaitu sebesar 42.020,83M. Di sisi lain, DBH Provinsi Sulawesi Barat hanya sebesar 0.16%-nya saja dari DBH Kalimantan Timur (DJPK, 2024). Hal ini menandakan bahwa ketimpangan DBH antardaerah masih perlu. Memang benar sistem perhitungan DBH sudah diperbaiki melalui pergantian Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Namun, masih ada yang perlu ditekankan terkait ketergantungan perhitungan DBH yang didasari oleh SDA. Perhitungan



tersebut juga berdampak pada banyaknya kasus eksploitasi di pemerintah daerah, salah satu contoh eksploitasi SDA di Kalimantan Timur yang semakin marak dilakukan, yaitu penambangan liar, penangkapan ikan secara ilegal, dan pembakaran hutan berskala besar untuk lahan sawit.

Berdasarkan hal ini, pemerintah pusat memiliki yurisdiksi untuk mengawasi persyaratan perizinan daerah. Pengawasan pemerintah pusat terhadap peraturan daerah di sektor perizinan dimaksudkan untuk menjamin bahwa kebijakan yang diatur oleh peraturan daerah di sektor perizinan tidak berbenturan dengan kebijakan pemerintah pusat (Arisandi & Pudjiastuti, 2017). Penyerahan perizinan pertambangan kepada Pemerintah Pusat sepenuhnya juga sudah tertulis di UU Minerba No. 3 Tahun 2020, namun masih ada beberapa hal yang perlu ditekankan terkait di mana pemerintah daerah tidak bisa lagi menjadi mediator apabila masyarakat sekitar daerah pertambangan berdampak kerugian. Selain itu, Pasal 162 UU Minerba No. 3 Tahun 2020 yang mengatakan bahwa masyarakat yang mencoba mengganggu aktivitas pertambangan dalam bentuk apapun bisa dilaporkan oleh perusahaan dan dijatuhi pidana, bahkan denda hingga sebesar 100 juta rupiah. Meskipun UU No. 3 Tahun 2020 dapat mencegah pemerintah daerah menyalahgunakan wewenangnya dalam hal eksploitasi, namun justru UU perbaikan

tersebut seperti tombak yang tumpul ke atas namun tajam ke bawah. Maka dari itu, rekomendasi saran yang dapat diberikan adalah pemerintah pusat sudah seharusnya menata kembali UU Minerba No.3 Tahun 2020 agar ketiga pihak, yaitu pemerintah, perusahaan, dan masyarakat tidak merasa dirugikan dan memiliki keterbatasan dalam bertindak. Di sisi lain, penataan kembali juga harus dilakukan pada prosedur penyampaian aspirasi maupun keluhan terkait pertambangan oleh masyarakat kepada Pemerintah Daerah agar aspirasi dapat tersampaikan dengan baik hingga ke pusat.

Di sisi lain, Kab. Bojonegoro dapat menjadi salah satu contoh konkret antara keberhasilan hubungan vertikal antara Pemerintah-Pusat-Provinsi-Kab maupun horisontal PemKab Bojonegoro-Pemkab Blora-PemProv Jatim-PemProv Jateng.

Keadaan geografis Kab. Bojonegoro yang tandus serta keadaan sosial-ekonomi yang buruk seketika berubah setelah ditemukannya sumber minyak bumi oleh LEMIGAS. Keberhasilan tersebut mampu membawa pertumbuhan ekonomi Kab. Bojonegoro melambung tinggi dari hanya 2,36% di tahun 2014 menjadi 19,47% pada tahun 2015.

LEMIGAS sudah menemukan sumber minyak jauh dari tahun 2015, namun



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI



pengelolaan minyak bumi baru berhasil didongkrak secara fantastis pada saat di bawah pemerintahan Bupati Suyoto (2008-2013, 2013-2018). Hal ini membuktikan bahwa keberhasilan tersebut tidak hanya semata-mata, karena wilayah tersebut kaya akan SDA-nya, namun juga harus diiringi oleh hubungan pemerintah yang harmonis dan manajemen SDM yang berkualitas.

Di mana pada saat itu, Pemerintah Pusat membantu dalam hal perizinan, penyertaan modal, dan pembagian DBH kepada daerah penghasil. Pada pasca keberhasilan, Pusat menyetujui PemKab dan DPRD dalam menerbitkan PerDa terkait pengelolaan Migas. Selain itu, PemDa lebih memilah tawaran pendanaan dari pihak swasta untuk tetap mempertahankan prinsip tata kelola yang baik. Selama jalannya proyeksi, perlakuan pemerintah juga didasari oleh Teori Hubungan Pengawasan. DPRD Jatim terus melakukan pengawalan dan pengawasan sebagai akselerator, regulator, maupun mediator. Adapun visi misi Pemerintah Kab. Bojonegoro pasca proyeksi adalah untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Kab. Bojonegoro, sehingga ke depannya masyarakat di Kabupaten Bojonegoro dapat andil dalam mengambil keputusan mengenai keberlanjutan eksploitasi penggalian minyak bumi di kabupaten tersebut dan dapat mengembangkan penelitian maupun inovasi untuk menghindari ketergantungan terhadap SDA (Sholikin, 2018). □



# Kiprah Pimpinan MPR RI Periode 2019-2024 *Setelah Lima Tahun* Memimpin MPR RI, Inilah Kisahnya

Pimpinan MPR RI periode 2019-2024 beberapa pekan mendatang atau awal Oktober 2024 akan mengakhiri masa pengabdianya, dan akan dilanjutkan oleh Pimpinan MPR RI periode 2024-2029. Lima tahun mengemban tugas konstitusional yang diberikan oleh Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) dalam rangka mengawal Ideologi Pancasila dan Kedaulatan Rakyat.

Sebagai Rumah Kebangsaan, selain mengemban tugas konstitusional, MPR juga menjalankan tugas diamanatkan oleh Undang-Undang MD3 (MPR, DPR, DPD, dan DPRD), yaitu melaksanakan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI, serap aspirasi masyarakat, dan kajian ketatanegaraan yang melibatkan berbagai elemen masyarakat dari Sabang sampai Merauke, dari Talaud hingga Pulau Rote.

Berikut ini kami tampilkan pengalaman tiga orang Pimpinan MPR dalam menjalankan tugas konstitusional dan juga tugas yang diamanatkan oleh UU MD3 selama periode 2019-2024, yang dituangkan dalam bentuk tulisan.

**H. Ahmad Muzani, S.Sos.,**  
Wakil Ketua MPR RI Periode 2019-2024

## Keberpihakan Pemimpin pada Rakyat, Awal Kemajuan Bangsa



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

**P**ENTINGNYA pemimpin yang memiliki kehendak untuk selalu berpihak kepada rakyat. Tujuannya agar Indonesia bisa betul-betul melindungi rakyat serta memberikan jaminan kesejahteraan kehidupan masyarakat kecil. Tugas pemimpin adalah melindungi rakyat, melindungi segenap tumpah darah, menguatkan NKRI, Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika. Seperti apa yang diamanatkan pada UUD bahwa kekayaan negara digunakan sepenuhnya untuk kemakmuran rakyat. Negara juga bertanggung jawab untuk mengurus fakir miskin dan rakyat kecil pada umumnya.

Kita membutuhkan pemimpin yang berkomitmen untuk memenuhi kebutuhan rakyat, mengurus fakir miskin, mengurus anak yatim, mengurus janda janda, mengurus rakyat kecil seperti nelayan,

petani. Falsafah demokrasi yang sudah berjalan pasca reformasi semua pemimpin harus menjalankan proses demokrasi yang sudah ditetapkan dan menjadi kesepakatan bersama.

Bangsa Indonesia telah bersepakat dengan sistem pemerintahan demokrasi Pancasila. Demokrasi yang memilih pemimpin setiap 5 tahunan melalui proses pemilu. Itu sejalan dengan semangat reformasi yang harus kita jaga dan kita jalankan dengan baik. Memilih pemimpin di setiap tingkatan pemerintah yang mengetahui kebutuhan rakyatnya. Itu sebabnya proses pemilu lima tahunan itu menjadi penting karena akan dijadikan sebagai arah baru bagi kemajuan bangsa, negara, dan rakyatnya.

Di sini pentingnya pengamalan Pancasila sebagai dasar berbangsa dan bernegara dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila adalah milik bangsa Indonesia, milik semua

rakyat Indonesia, bukan milik penguasa atau golongan tertentu. Pancasila adalah milik kita semua, milik rakyat Indonesia. Pancasila bukan milik penguasa, bukan pula milik golongan tertentu. Setiap orang Indonesia pada dasarnya menerima Pancasila. Sejatiannya kita adalah pancasilais. Perbedaannya lebih pada cara mengamalkan Pancasila itu adalah hal wajar dalam menafsirkan sebuah ideologi. Sebagaimana juga penafsiran ajaran agama yang sering kali berbeda. Namun, apa karena itu kita tidak bersatu.

Ada yang menginginkan semangat dan nilai moral agama dijadikan sebagai nilai pengamalan kehidupan bernegara. Tapi, ada juga yang menginginkan nilai moral agama diformalkan dalam konstitusi negara. Perdebatan itu dari dulu sampai sekarang tidak selesai, namun masalahnya bagaimana pandangan berbeda tetap dalam koridor Pancasila. Yang menjadi tugas kita semua,

termasuk penyelenggara negara agar perbedaan itu dikembalikan kepada cita-cita pendiri bangsa.

Generasi muda penting belajar dari peristiwa Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Para pemuda yang datang mewakili berbagai kesultanan di Nusantara, tetapi mereka berikrar mendirikan negara Indonesia dengan satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, yakni Indonesia.

Apa artinya itu semua? Para pemuda sudah menatap Indonesia ke depan dan visioner mereka luar biasa. Bahasa yang disepakati berasal dari rumpun Melayu. Bukan bahasa Jawa yang merupakan bahasa mayoritas. Orang Jawa juga rela bahasanya tidak digunakan sebagai bahasa persatuan. Kerelaan itulah yang berujung pada persatuan. Demikian juga dengan kerelaan para pemimpin bangsa yang sejak awal menginginkan Islam sebagai dasar negara, akhirnya komprominya pada Pancasila sebagai dasar negara.

Dari sejarah itu maka kebersamaan, persatuan, dan kegotongroyongan sejak awal sangat dijunjung tinggi oleh para pemimpin bangsa kita untuk mengatasi perbedaan. Perbedaan adalah keniscayaan dari bangsa Indonesia, baik suku, etnis, bahasa, wilayah termasuk agama. Maka tugas saat ini adalah menyatukan keragaman itu dalam persatuan. Berharap nilai-nilai Pancasila terus ditumbuhkembangkan dalam banyak praktik kehidupan sehari-hari dengan menimba ilmu dan semua kreativitas dan inovasi yang tinggi.

Kita tidak pernah terbayang 20 atau 10 tahun lalu ada mobil tanpa bensin, mobil yang menggunakan tenaga listrik. Melek seperti ini yang diharapkan mengisi penguatan negara Pancasila. Diharapkan saudara semua bisa menjadi seperti itu, yakni terus mengasah ilmu dengan inovasi dan kreativitas, apakah bisa? Tentu bisa, karena 10 atau 20 tahun ke depan generasi muda akan menjadi pemimpin dan mudah-mudahan akan menjadi orang sukses di Indonesia.

Untuk itu, pentingnya implementasi Empat Pilar Kebangsaan dalam perhelatan demokrasi di Indonesia. Karena demokrasi

merupakan cara untuk mempertahankan dan mempergilirkan kekuasaan. Oleh sebab itu masyarakat perlu memahami pentingnya demokrasi. Karena, demokrasi adalah cara pemimpin untuk mempertahankan kekuasaan dan mempergilirkan kekuasaan.

Itu sebabnya, penting bagi rakyat untuk memahami kualitas, kapasitas, dan kapabilitas setiap calon pemimpin yang akan dipilihnya. Karena di era demokrasi yang modern ini, ada banyak cara bagi seorang calon pemimpin untuk mempertunjukkan pencitraan daripada kepedulian dan pengetahuannya tentang masalah yang sesungguhnya dihadapi rakyat.

Ada kecenderungan bahwa kita dipertontonkan dengan calon-calon pemimpin yang hanya memenuhi kepuasan

Indonesia harus memiliki pemimpin yang kuat dengan memahami permasalahan substansi kerakyatan dan ancaman global. Ancaman resesi dan perang nuklir saat ini harus disikapi dengan cermat. Karena implikasi dari perang Rusia-Ukraina saat ini sudah melanda negara-negara Eropa Barat.

Saya mengajak para mahasiswa dan juga anak-anak muda untuk cermat dalam memilih calon pemimpin. Karena, program-program pemerintah yang akan dijalankan nantinya adalah janji-janji selama masa kampanye berjalan. Dulu, sebelum diamandemen, MPR yang memilih presiden dan menyusun program kerja Pemerintah melalui GBHN. Tapi, sekarang setelah diamandemen program kerja Pemerintah dibentuk melalui apa-apa saja yang dikampanyekan lewat janji-



rakyat sesaat. Misalnya, dengan membuat fasilitas yang hanya menjadi tempat-tempat selfie. Dengan cara-cara seperti itu, maka hampir semua sisi negatif dari calon pemimpin itu tidak kelihatan.

Dan, saat ini semua calon pemimpin akhirnya memilih jalan itu, tanpa betul-betul memahami apa yang menjadi masalah bangsa hari ini, apa yang menjadi masalah substansi dan kebutuhan rakyat saat ini. Ketika rakyat memilih calon pemimpin seperti ini, pada akhirnya harapan rakyat menjadi fatamorgana karena ketidakmampuan pemimpin tersebut untuk menjadi pemimpin yang ideal.

janjinya calon presiden. Itu sebabnya penting bagi rakyat Indonesia, termasuk adik-adik, untuk cermat dalam memilih pemimpin. Jangan sampai salah memilih pemimpin, karena itu akan berimplikasi pada program kerja yang dijalankan oleh pemerintah yang berkuasa nantinya.

Pemerintah sampai saat ini dalam menjalankan amanat Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi: Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Siapapun pemimpin yang akan datang harus betul-betul menjalankan amanat UUD. □

**Dr. H. M. Hidayat Nur Wahid, Lc., MA.,**

Wakil Ketua MPR RI Periode 2019-2024

## **Kiprah MPR 2019-2024: Vaksinasi Ideologi Terkait Covid-19, Kolaborasi Forum MPR Se-Dunia dan Mempertahankan Spirit Reformasi**



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

**A**DA banyak kegiatan dan tantangan yang dihadapi oleh para Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) periode 2019-2024, di antaranya adalah munculnya wabah Covid-19 yang menghantam semua sendi kehidupan berbangsa dan negara di awal periode 2019-2024, inisiasi serta perhelatan pembentukan Forum MPR se-Dunia di mana Indonesia sebagai tuan rumah dan salah satu inisiator utama, dan usaha MPR dalam menjaga spirit Reformasi dan praktik demokrasi dari adanya wacana liar amandemen konstitusi untuk memperpanjang masa jabatan presiden melebihi dua periode.

*Pertama*, terkait dengan Covid-19, MPR sebagai satu-satunya lembaga negara yang

berwenang menghasilkan suatu konstitusi negara, yakni UUD NRI Tahun 1945, maka Pimpinan MPR selalu berupaya untuk memastikan bahwa konstitusi tersebut benar-benar dijalankan secara konsekuen, dan tetap disosialisasikan dengan mempertimbangkan kedaruratan akibat wabah Covid-19. Oleh karena itu, saya bersama dengan Pimpinan MPR RI lainnya selalu berusaha untuk mengingatkan pemerintah agar menjalankan tugasnya untuk 'melindungi seluruh tumpah darah bangsa Indonesia' secara berkeadilan dan tanpa diskriminasi, sebagaimana amanat dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, maka pemerintah agar tetap mendukung kegiatan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI, justru sebagai bentuk vaksinasi, agar jangan

sampai secara fisik rakyat didera wabah Covid-19, dan secara ideologi dirusak juga oleh virus-virus semacam Covid-19.

Sekalipun demikian, dan sebagaimana juga lembaga negara lainnya, MPR RI juga terdampak dengan pandemi Covid-19 tersebut, baik dari segi pelaksanaan kegiatan maupun relokasi anggaran. Kami seluruh Pimpinan MPR RI pun sepakat dan mengikhhlaskan adanya pengurangan anggaran terhadap MPR RI, misalnya sebesar Rp 27 miliar pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 untuk keperluan penanganan Covid-19. Hal tersebut kami sadari sebagai bentuk dukungan memberikan perlindungan kepada masyarakat Indonesia dari dampak Covid-19 yang semakin meluas ketika itu. Tetapi,

kami tetap menyelenggarakan kegiatan sosialisasi ideologi berbangsa dan bernegara, dengan menyelenggarakan sosialisasi via zoom/on line. Dan, Alhamdulillah, bangsa Indonesia telah bisa melewati pandemi Covid-19 yang sangat memilukan tersebut. Semoga sebagaimana mereka selamat secara fisik, semoga selamat secara ideologis juga.

*Kedua*, pasca Covid-19 mereda, Pimpinan MPR RI langsung tancap gas untuk merealisasikan ide pembentukan Forum MPR se-Dunia. Gagasan ini sebenarnya sudah saya sampaikan pada MPR RI saat saya menjabat sebagai Ketua MPR pada periode 2004-2009 yang lalu. Dan, Alhamdulillah pada periode ini bisa disepakati bersama pimpinan lain, sehingga kami me-lobi sejumlah pimpinan lembaga MPR atau setingkatnya di negara-negara lain untuk berkolaborasi membentuk forum tersebut. Akhirnya, pembentukan MPR atau Majelis Syura se-Dunia tersebut terealisasi pada 24-26 Oktober 2022 di Bandung yang bertepatan dengan peringatan Konferensi Asia Afrika.

Dalam pertemuan tersebut, sejumlah perwakilan dari lembaga sejenis MPR di banyak negara-negara muslim hadir. Mereka berasal dari Bahrain, Maroko, Pakistan, Yordania, Yaman, Arab Saudi, Malaysia, Mesir, Palestina, Aljazair, Mozambik, Iran, Turki, Irak. Selain itu hadir pula perwakilan dari organisasi internasional, seperti the Parliamentary Union of the OIC Member States dan Liga Muslim Dunia.

Pertemuan internasional antar MPR se-Dunia itu juga menghadirkan Deklarasi Bandung yang berisikan tujuh poin penting, di antaranya adalah kesepakatan untuk ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial sebagaimana terinspirasi dari Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 dan juga menjadikan kemerdekaan Palestina sebagai isu sentral dari forum tersebut hingga berdirinya negara Palestina merdeka dengan Yerusalem sebagai ibukotanya, sesuai kerangka hukum internasional. Fondasi dari Forum MPR se-Dunia ini telah ditetapkan, dan forumnya bahkan secara resmi telah dideklarasikan, sehingga sangat penting untuk pimpinan MPR selanjutnya memaksimalkan forum ini

untuk meningkatkan diplomasi internasional melalui lembaga MPR.

Ketiga, yang tidak kalah penting dari kinerja dari MPR periode 2019-2024 adalah komitmen bersama Pimpinan MPR RI untuk mempertahankan dan menyelamatkan spirit Reformasi dari wacana liar yang ingin mengamendemen UUD NRI Tahun 1945 untuk memperpanjang masa jabatan presiden. Sebagaimana diketahui, Pasal 7 UUD NRI Tahun 1945 telah memberikan batasan bahwa masa jabatan seorang presiden adalah maksimal dua periode. Namun, di akhir pemerintahan Presiden Joko Widodo yang sudah mencapai dua periode, ada sejumlah wacana yang terus digaungkan, yakni upaya mengamendemen Pasal 7 tersebut, sehingga Presiden Joko Widodo dapat berlaga kembali di kali ketiganya sebagai

dengan berbagai alasan, termasuk alasan pandemi Covid-19.

*Alhamdulillah*, upaya kami untuk menjaga demokrasi dan amanat reformasi ini dapat berhasil dengan tidak diganggunya UUD NRI Tahun 1945 melalui amandemen menjelang Pemilu 2024. Bahkan, sebagai konsekuensinya, MPR juga mengurungkan untuk mengamandemen terbatas UUD NRI Tahun 1945 terkait Pokok-Pokok Haluan Negara agar tidak ditumpangi oleh penumpang gelap yang menginginkan dihapusnya pembatasan masa jabatan Presiden maksimal dua periode. Hingga, dengan segala kelebihan dan kekurangannya, Pemilu 2024 akhirnya bisa diselenggarakan dengan aman, dengan terpilihnya Presiden yang baru untuk menggantikan Presiden Joko Widodo yang



calon Presiden melalui Pemilu 2024.

Saya bersama dengan sejumlah Pimpinan MPR RI lainnya terus mengingatkan kepada masyarakat dan fraksi-fraksi di MPR RI bahwa kehadiran pembatasan masa jabatan dalam Pasal 7 merupakan amanat inti Reformasi dan juga ciri khas dari demokrasi agar tidak tercipta lagi kekuasaan yang otoriter. Oleh karena itu, kami juga terus mengingatkan agar segala upaya yang bertujuan ingin 'membongkar kembali' Pasal 7 UUD NRI Tahun 1945 sebaiknya dihentikan, dan fokus kepada pergantian kekuasaan melalui Pemilu 2024. Hal itu juga sejalan dengan penolakan kami terhadap wacana yang menginginkan penundaan Pemilu 2024

telah menjabat selama dua periode.

Semoga MPR RI ke depannya dapat terus memainkan perannya dalam ikut serta melindungi seluruh tumpah darah bangsa Indonesia, ikut serta dalam percaturan global dalam menciptakan perdamaian dunia dan memperjuangkan Palestina merdeka, dan menjaga demokrasi serta amanat reformasi dari pihak-pihak yang akan membawa Indonesia mundur ke belakang. Termasuk bisa melaksanakan amanah terkait hasil kajian atas UUD NRI Tahun 1945 dan pelaksanaannya yang sudah berusia lebih dari 20 tahunan, dengan mengkaji secara seksama tuntutan kembali melakukan amandemen terhadap UUD NRI 1945. □

**Dr. K.H. Jazilul Fawaid, S.Q., M.A.,**  
Wakil Ketua MPR RI Periode 2019-2024

# MPR RI: Ruang Berkhidmat untuk Bangsa dan Negara



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

**P**ADA 1 Oktober 2019, kurang lebih 5 tahun yang silam, saya dilantik sebagai Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) periode 2019-2024. Pelantikan tersebut diikuti oleh seluruh anggota DPR RI dan DPD RI periode 2019-2024, total sejumlah 711 orang. Momen tersebut menjadi titik awal pengabdian yang saya jalani hari ini di lembaga tinggi negara yang acapkali disebut sebagai rumah kebangsaan. Saya merasa sangat terhormat diberikan amanah dan tanggung jawab untuk menjalankan tugas kelembagaan bersama dengan unsur pimpinan dan anggota MPR RI lainnya. Tentunya, ini tidak mudah. Meskipun tidak lagi berstatus sebagai lembaga tertinggi negara, sebagai

konsekuensi logis amandemen terhadap konstitusi, MPR RI memiliki tugas dan tanggung jawab yang berat.

*Pertama*, MPR RI bertugas untuk memasyarakatkan Ketetapan MPR yang merupakan produk kelembagaan. *Kedua*, MPR RI memikul tanggung jawab untuk memasyarakatkan Empat Pilar Kebangsaan yang terdiri atas Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta konsepsi Bhinneka Tunggal Ika. *Ketiga*, MPR RI bertugas untuk mengkaji sistem ketatanegaraan, UUD NRI Tahun 1945, beserta pelaksanaannya. Keempat, MPR RI bertugas untuk menyerap aspirasi masyarakat berkaitan dengan pelaksanaan UUD NRI Tahun 1945. Apa garis besar dari keempat tugas tersebut? Garis besar atau

konklusinya adalah MPR RI bertugas untuk menjaga dan memelihara agar praktik kebangsaan dan kenegaraan yang dilakukan oleh pemerintah sebagai kepanjangan tangan negara dan masyarakat senantiasa dilandasi oleh nilai-nilai luhur yang terkandung dalam konsensus dasar kebangsaan Indonesia. Bagi saya pribadi, ini tugas yang sangat berat yang membutuhkan komitmen dan integritas dalam pelaksanaannya.

## Komitmen Pengabdian

Dalam menjalankan tugas dan amanah sebagai unsur Pimpinan MPR RI, hal pertama yang saya lakukan adalah melakukan pencermatan terhadap dinamika sosial masyarakat beserta tantangannya yang

memengaruhi secara langsung atau tidak langsung terhadap eksistensi Empat Pilar Kebangsaan. Pancasila yang menjadi falsafah kebangsaan (*philosophische grondslag*) dan pandangan hidup (*weltanschauung*) bangsa Indonesia kehilangan elan vitalnya karena tergerus oleh ideologi asing, seperti liberalisme politik, kapitalisme pasar, fundamentalisme agama, dan sosialisme komunisme yang perlahan tapi pasti memengaruhi pola pikir dan pola sikap masyarakat. Demikian juga halnya dengan konstitusi UUD NRI Tahun 1945. Konstitusi yang memiliki kedudukan sebagai sumber hukum positif tertinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan tidak selalu dipedomani dalam pembuatan kebijakan. Konsepsi NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika juga mengalami ancaman dan tantangan yang tidak mudah. Pelanggaran kedaulatan di wilayah perairan Indonesia, seperti Laut Natuna Utara, tuntutan pemisahan diri oleh KKB di Papua, merupakan persoalan-persoalan serius yang mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Singkat kata, masing-masing pilar kebangsaan memiliki ancaman dan tantangannya masing-masing.

Ancaman dan tantangan tersebut menjadi mudah untuk disikapi ketika MPR RI sebagai lembaga tinggi negara dilengkapi dengan instrumen sosialisasi empat pilar untuk memasyarakatkan nilai-nilai kebangsaan. Bagi saya, hal ini merupakan modal sosial dan institusional yang besar, karena tidak semua lembaga memiliki instrumen seperti ini. Kami selaku unsur Pimpinan MPR RI diberikan kehormatan untuk berdialog langsung dengan masyarakat, berdialog dan meneguhkan komitmen kembali untuk memegang teguh nilai-nilai Pancasila dan konstitusi, serta bersetia pada NKRI. Bagi saya pribadi, ketika menjalankan tugas sosialisasi empat pilar tersebut, saya tidak mendudukkan diri saya sebagai guru yang paham akan semua persoalan. Saya berupaya melebur dengan masyarakat, memahami hati dan pikiran mereka, menyelami persoalan mereka, dan mengajak mereka untuk kembali pada nilai-nilai luhur

kebangsaan yang terkandung dalam Empat Pilar Kebangsaan sebagai solusi atas persoalan mereka. Nilai-nilai yang terkandung dalam Empat Pilar Kebangsaan adalah nilai-nilai yang digali dari kehidupan bangsa kita sendiri. Sayangnya, bangsa Indonesia dewasa ini kerap merasa ahistoris dan tercerabut dengan nilai-nilai tersebut, karena lebih terpengaruh oleh budaya asing yang masuk secara masif. Inilah yang menyebabkan masyarakat terjebak pada praktik hedonis, sekuler, dan individualis, serta mengabaikan kepentingan kolektif masyarakat, bangsa, dan negara.

### **Pengalaman Empirik**

Pelaksanaan sosialisasi empat pilar di masyarakat bukanlah persoalan yang mudah, meskipun secara kelembagaan, MPR RI menyediakan banyak metode

dan menggunakan contoh-contoh yang faktual dengan kehidupan mereka. Kedua, Empat Pilar Kebangsaan kerap kali dianggap sebagai sesuatu yang abstrak, sesuatu yang tidak membumi. Oleh karenanya, menjadi tantangan untuk menyampaikannya kepada masyarakat, khususnya kelompok yang tidak terdidik dengan mengaitkannya secara langsung dengan persoalan mereka sehari-hari, seperti kelangkaan pupuk bagi para petani, keterbatasan alat penangkapan ikan bagi nelayan, hingga kebutuhan untuk melanjutkan pendidikan bagi kelompok masyarakat miskin. Ketiga, internalisasi nilai-nilai kebangsaan terkadang berbenturan dengan kognitif masyarakat perkotaan (kaum urban) yang sudah dipenuhi oleh pola pikir kapitalisme pasar dan liberalisme berpendapat. Untuk mengatasi situasi ini, diperlukan kecermatan dan ketajaman dalam



penyampaian, mulai dari metode konvensional berbasis tatap muka, hingga metode berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Pengalaman saya, persoalannya terletak pada beberapa hal. Pertama, ada segmentasi di masyarakat, sehingga penyampaian harus disesuaikan dengan segmentasi tersebut. Ketika berhadapan dengan generasi muda, urgensi nilai-nilai kebangsaan harus disampaikan dengan bahasa yang mudah mereka pahami

penyampaian, sehingga anasir-anasir ideologi asing yang memengaruhi pola pikir masyarakat dapat dikikis secara perlahan. Sebagai contoh, adalah tugas berat untuk mengembalikan model hidup paguyuban dan penuh musyawarah kepada masyarakat perkotaan yang cenderung sekuler dan individualis. Inilah tantangan-tantangan yang kerap saya jumpai dalam pelaksanaan sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan.

Sebagai bentuk komitmen dan totalitas

saya menjalankan tugas dan amanah di rumah kebangsaan, saya menggunakan instrumen akademik untuk berkontribusi bagi kelembagaan tempat saya berkhidmat. Ketika menyelesaikan pendidikan doktoral saya di IPDN, saya mengangkat tema kepemimpinan kolektif dan kolegial di MPR RI sebagai judul disertasi saya. Bagi saya pribadi, ditinjau dari kacamata akademik, keberhasilan Pimpinan MPR RI dalam memimpin lembaga yang besar tidak dapat berjalan secara maksimal tanpa adanya sistem kepemimpinan yang bersifat kolektif dan kolegial yang mengutamakan musyawarah mufakat dalam pengambilan keputusan yang selaras dengan nilai Pancasila, pemungutan suara untuk memecah kebuntuan, serta senantiasa mengedepankan prinsip kebersamaan. Hal ini tidak terlepas dari karakteristik MPR RI sendiri sebagai rumah kebangsaan yang menaungi keberagaman dan pluralisme bangsa, serta memikul tanggung jawab mulia untuk selalu memasyarakatkan nilai-nilai kebangsaan Indonesia. Spirit kepemimpinan kolektif dan kolegial menjauhkan kelembagaan MPR RI dari praktik kepemimpinan yang berbasis kepentingan individu, sektoral, kelompok atau golongan yang dapat menggerogoti persatuan dan kesatuan bangsa.

## Saran Kebangsaan

Di akhir periode tugas selaku unsur pimpinan di MPR RI, saya hendak menyampaikan saran dan masukan sebagai komitmen kebangsaan. Ada tiga hal utama yang saya soroti. *Pertama*, pentingnya untuk menjaga proses demokratisasi yang kita mulai sejak era reformasi. *Kedua*, urgensi untuk memiliki haluan negara sebagai pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara. *Ketiga*, urgensi untuk meningkatkan daya saing Indonesia di kancah global. Demokratisasi menjadi kunci untuk mewujudkan tujuan nasional Indonesia, utamanya terciptanya masyarakat adil, makmur, dan sejahtera. Kesejahteraan masyarakat tidak bisa tercipta dalam situasi totalitarian dan militeristik seperti era orde

baru. Kesejahteraan hanya dapat tercipta di alam demokrasi, yang mana demokrasi menjadi alat (*means*) untuk mencapainya. Oleh karena itu, setiap komponen masyarakat, pemerintah ataupun rakyat, wajib meletakkan demokrasi sebagai pedoman bersama (*the only game in town*). Arus konsolidasi demokrasi harus dijaga agar terwujud demokrasi yang matang (*mature democracy*), dalam hal mana pilar-pilar demokrasi seperti partai politik, pers, masyarakat madani, dan lainnya memiliki komitmen yang sama dalam mewujudkan tujuan nasional sebagaimana termaktub



dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945.

Hal kedua adalah pentingnya memiliki haluan negara. Saya pribadi berpandangan bahwa perlu untuk menghadirkan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) sebagai pedoman dan peta jalan dalam melaksanakan pembangunan nasional di Indonesia. Ketiadaan haluan negara sebagai konsekuensi amandemen UUD NRI Tahun 1945 yang menghapus keberadaan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) berdampak pada tersandernya pembangunan nasional oleh periodisasi pemerintahan berbasis politik elektoral, ketiadaan sinergitas antara pembangunan di level pusat dan pembangunan di level daerah, serta inefisiensi tata kelola

pemerintahan yang disebabkan oleh perbedaan orientasi dan prioritas pembangunan yang dilakukan antarpemerintah. Saya sepakat dengan hasil kajian dari Badan Pengkajian MPR RI yang melakukan penyusunan substansi PPHN berdasarkan paradigma Pancasila sebagai kerangka operasional dalam pembangunan tiga ranah kehidupan berbangsa yang meliputi pembangunan karakter dan kualitas manusia, pembangunan kelembagaan sosial dan politik, serta pembangunan ekonomi dan kesejahteraan, yang mana ketiga ranah ini saling terkait dan berinteraksi satu sama lain.

Terakhir, penting bagi bangsa Indonesia untuk meningkatkan daya saing di panggung global. Indonesia adalah warga dunia. Kita terhubung dengan negara lain dalam komunitas global. Apa yang terjadi di lingkup global dan regional akan berpengaruh secara langsung terhadap kepentingan nasional Indonesia. Perang antara Rusia dan Ukraina menimbulkan kelangkaan energi di Asia Tenggara dan kelangkaan pupuk di dalam negeri. Rivalitas Amerika dan Tiongkok di Indo Pasifik telah membelah Asia Tenggara menjadi proksi-proksi politik (*backyard policy*) kedua negara adidaya tersebut. Agresi militer Israel di Palestina telah memantik aksi boikot, divestasi, dan sanksi dari masyarakat domestik Indonesia yang memandang pemerintah kurang aktif dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Isu-isu ini perlu dikelola secara cermat oleh pemerintah, khususnya pemerintahan baru yang akan dilantik pada Oktober 2024 nanti. Daya saing Indonesia di kancah global tidak ditentukan oleh faktor kapasitas ekonomi saja, tapi juga ketangguhan dan kelihaihan dalam berdiplomasi. Oleh sebab itu, penting bagi bangsa Indonesia saat ini juga untuk kembali mempedomani nilai-nilai kebangsaan dan menjadikannya sebagai landasan dalam pengelolaan keunggulan komparatif Indonesia seperti keanggotaan di forum internasional, keunggulan agraria, keunggulan maritim, dan bonus demografi, agar Indonesia keluar sebagai negara unggul di masa-masa mendatang. Semoga. □

## Peringatan Hari Konstitusi dan HUT Ke-79 MPR RI



Pada bulan Agustus tercatat tiga peristiwa penting yang sangat menentukan sejarah perjalanan negara dan bangsa Indonesia. Pertama, Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Kedua, sehari setelah Proklamasi Kemerdekaan RI, yakni tanggal 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) atau Dokuritsu Junbi In kai mengesahkan UUD 1945 sebagai Konstitusi Negara. Atas dasar itu, pada 10 September 2008, Presiden Susilo Yudhoyono mengeluarkan Kepres No. 18 Tahun 2008, yang isinya menetapkan tanggal 18 Agustus sebagai Hari Konstitusi.

Lalu, ketiga, tanggal 29 Agustus diperingati sebagai Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-79 Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR RI). Sejarahnya, pada 29 Agustus 1945 dibentuklah Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP), yang kemudian menjadi embrio terbentuknya MPR RI. Pertama kali, MPR dibentuk berdasarkan Konstitusi RIS 1949, yang kemudian diatur lebih lanjut dalam UUD Sementara 1950. Pada masa itu, MPR berfungsi sebagai lembaga perwakilan yang memiliki kewenangan konstitusional memilih Presiden dan Wakil Presiden. Namun, setelah Dekrit Presiden 5 Juli yang mengembalikan UUD 1945, MPR mengalami transformasi signifikan dengan lembaga tertinggi negara yang memiliki kekuasaan menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN).



## Bagian I: Peringatan Hari Konstitusi

**S**ETELAH tanggal 18 Agustus ditetapkan sebagai Hari Konstitusi pada 10 September 2008, untuk pertama kalinya MPR RI menggelar peringatan Hari Konstitusi pada hari Selasa, 18 Agustus 2009, di Gedung Nusantara IV, Komplek Parlemen, Jakarta. Saat itu, peringatan Hari Konstitusi dihadiri oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Peringatan Hari Konstitusi itu dimenangkan dengan acara Final Cerdas Cermat UUD NRI Tahun 1945. Dan, hingga kini, peringatan Hari Konstitusi telah menjadi agenda besar Ketatanegaraan,

anggota MPR dari Kelompok DPD yang juga pakar hukum tata negara Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, cendekiawan Yudi Latief, Ph.D., dan staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Udayana, Dr. Jimmy Z. Usfunan, SH., MH. Seminar ini dibuka secara resmi Ketua MPR Bambang Soesatyo.

Hadir dalam seminar ini, antara lain Wakil Ketua MPR Fadel Muhammad, Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid, anggota MPR, Pimpinan Alat Kelengkapan MPR, Pimpinan Komisi Kajian Ketatanegaraan, Plt. Sekretaris Jenderal MPR Siti Fauziah, dan Pimpinan Sekretariat Jenderal MPR, serta diikuti civi-

depan. “Kita senantiasa terbuka atas perkembangan ketatanegaraan Indonesia di masa depan,” tuturnya.

Menurut Siti Fauziah, perubahan kedudukan, wewenang, dan tugas MPR sebagai akibat perubahan UUD NRI Tahun 1945 tidak mengurangi peran MPR sebagai lembaga negara yang mengemban visi sebagai Rumah Bangsa, Pengawal Ideologi Pancasila dan Kedaulatan Rakyat. “MPR tetap memiliki tugas yang mulia, yaitu membangun karakter bangsa melalui sosialisasi Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika,” katanya.



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

diselenggarakan setiap tahun.

Pada tahun 2024 ini, MPR memperingati Hari Konstitusi pada Ahad, 18 Agustus 2024. Ada dua agenda dalam peringatan Hari Konstitusi kali ini. Pertama, MPR menggelar seminar dengan tema “Refleksi Ketatanegaraan: Quo Vadis MPR RI” yang berlangsung di Gedung Nusantara V, Komplek Parlemen, Jakarta, pada pukul 09.00 hingga pukul 12.00 WIB. Kedua, seremoni peringatan Hari Konstitusi di Gedung Nusantara IV, Komplek Parlemen, Jakarta, pada pukul 16.00 WIB sampai selesai. Peringatan Hari Konstitusi ini dihadiri Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin.

Pada pagi hari, seminar ketatanegaraan dengan tema “Refleksi Ketatanegaraan: Quo Vadis MPR RI” menghadirkan pembicara

tas akademika perwakilan dari 13 perguruan tinggi di Jabodetabek.

Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Jenderal MPR, Siti Fauziah, menjelaskan, penyelenggaraan seminar dalam rangka memperingati Hari Konstitusi bertema: “Refleksi Ketatanegaraan: Quo Vadis MPR RI” ini dimaksudkan sebagai refleksi sekaligus proyeksi eksistensi MPR di masa depan. “Melalui proses refleksi dan proyeksi ini diharapkan, kita dapat mengetahui apa yang menjadi kelebihan dan kekurangan MPR, pelajaran baik di masa lalu yang harus kita pertahankan, dan pengalaman buruk yang harus kita tinggalkan,” ujarnya.

Selain itu, kata Bu Titi, sapaan Siti Fauziah, melalui seminar ini juga diharapkan kita dapat mengetahui kemana arah MPR di masa

Namun, Bu Titi mengungkapkan, setelah perjalanannya lebih dari 20 tahun sejak perubahan UUD, muncul berbagai aspirasi masyarakat yang menghendaki adanya pedoman dalam pembangunan nasional dalam bentuk Pokok-Pokok Haluan Negara, menghadirkan kembali unsur Utusan Golongan dalam komposisi keanggotaan MPR, dan lain sebagainya, yang layak dipertimbangkan.

“Dari seminar ini diharapkan melahirkan pemikiran yang komperatif dalam membahas arah serta masa depan MPR di dalam dinamika kebangsaan yang terus berkembang, memperkuat komitmen untuk menjaga konstitusi dan memperkokoh MPR sebagai lembaga negara yang dapat mengawal arah masa depan bangsa dengan lebih baik,” ucapnya. □

Wakil Presiden RI, Ma'ruf Amin:

# Konstitusi Menjadi Jembatan Antara Cita-cita dan Realitas



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

**P**ERINGATAN Hari Konstitusi dan Hari Ulang Tahun Ke-78 MPR RI yang digelar di Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Ahad (18/8/2024) dihadiri Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Bersama Wapres juga hadir para Pimpinan MPR RI, antara lain Ketua MPR RI Bambang Soesatyo dan Para Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah, Hidayat Nur Wahid, Sjarifuddin Hasan, Lestari Moerdijat, Jazilul Fawaid, Amir Uskara, Yandri Susanto, Fadel Muhammad, serta Plt. Sekretaris Jenderal MPR RI Siti Fauziah.

Jaga turut hadir Ketua DPD RI La nyala Mattalitti, Ketua KY Amzulian Rifai, Wakil Ketua DPR Rahmat Gobel, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno, Pimpinan Badan-Badan MPR, para Anggota MPR, Pimpinan Fraksi MPR dan Kelompok DPD, Pimpinan dan Anggota Komisi Kajian Ketatanegaraan serta perwakilan organisasi keagamaan dan kemasyarakatan.

Dalam sambutannya, Wapres mengungkapkan bahwa Hari Konstitusi yang diperingati setiap tahun menjadi momen penghormatan setinggi-tingginya kepada

para pendiri bangsa atau *The Founding Fathers* yang telah merumuskan dasar-dasar konstitusi sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam kehidupan bermasyarakat.

Konstitusi adalah hierarki tertinggi dalam peraturan perundang-undangan untuk menjaga nilai-nilai hukum, keadilan, kebebasan dan kesetaraan dalam berdemokrasi. Untuk itu, kehadiran konstitusi harus dijadikan sebagai pedoman dalam menjalankan pemerintahan yang menjamin perlindungan terhadap hak asasi manusia dan hak-hak warga negara.

"Dalam perjalanan sejarah, bangsa kita telah melewati berbagai ujian dalam berkonstitusi. Ujian kepatuhan dan ketaatan dalam berkonstitusi. Oleh karena itu, ke depan kita wajib menjaga ketahanan berkonstitusi, sekaligus memastikan agar konstitusi kita tetap responsive dalam menghadapi dinamika sosial, politik, dan ekonomi," ujarnya.

Ma'ruf Amin juga menegaskan, konstitusi harus mampu menjawab tantangan masa depan. Menjadi jembatan antara cita-cita dan

realitas, serta jembatan antara harapan dan kenyataan. Konstitusi juga harus menciptakan arah baru dengan semangat inovasi, keadilan dan membuka ruang partisipasi yang lebih luas bagi seluruh elemen masyarakat.

Dalam momen tersebut, Wapres Ma'ruf Amin memberikan pesan, agar seluruh masyarakat Indonesia harus bersyukur Pemilu 2024 telah berjalan dengan baik. Selanjutnya, bangsa ini akan melaksanakan Pilkada serentak pada tanggal 27 November 2024.

"Saya berpesan kepada kita semua agar membantu kesuksesan Pilkada serentak di wilayahnya masing-masing, serta menjunjung tinggi konstitusi dalam pelaksanaan Pilkada serentak itu," tandasnya.

Gelar acara Peringatan Harkons sekaligus HUT MPR Ke-79 ini sendiri berlangsung meriah dan khidmat. Di sesi terakhir, didampingi para Pimpinan MPR dan Ketua Lembaga Negara, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo memotong tumpeng sebagai simbol rasa syukur dalam perayaan Hari Konstitusi dan HUT MPR Ke-79. Potongan tumpeng pertama diberikan langsung kepada Wapres Ma'ruf Amin. □

Ketua MPR RI Bamsuet:

# Konstitusi Jangan Ditafsirkan Menurut Selera



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

**K**ETUA MPR RI ke-16 sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo mengingatkan, peringatan Hari Konstitusi adalah momentum penting untuk menyegarkan kembali memori kolektif bangsa, serta mengevaluasi praktik penyelenggaraan kehidupan ketatanegaraan. Selain, merefleksikan perjalanan kehidupan bangsa, apakah sudah selaras dengan tujuan negara, sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi.

Dalam perjalanan selanjutnya, sebelum terjadinya amendemen UUD 1945 pertama hingga keempat 1999-2002 implementasi konstitusi dalam praktik penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara mulai mengalami deviasi, tidak lagi dilaksanakan secara murni dan konsekuen. Konstitusi ditafsirkan menurut selera, dan bukan lagi merujuk pada tujuan awal (original intent) dan itikad / niat baik (good intent) dari rumusan naskah UUD. Hingga pada akhirnya, hantaman krisis moneter menjadi pintu masuk bagi amendemen terhadap konstitusi.

Amendemen terhadap konstitusi merupakan bagian dari jawaban atas arus deras Reformasi yang menuntut pembenahan dan penataan kembali sistem

ketatanegaraan, salah satunya UUD NRI Tahun 1945, agar tidak ditafsirkan, diterjemahkan, dan diimplementasikan secara sepihak dan sewenang-wenang.

Namun, ironisnya kini setelah 26 tahun reformasi menghantarkan euforia demokrasi, kini mulai muncul wacana untuk mengkaji kembali opsi amendemen terhadap UUD NRI Tahun 1945, untuk mengoreksi kembali hasil amendemen konstitusi yang telah dilakukan selama periode 1999 hingga 2002.

“Dalam konsepsi ini konstitusi jangan hanya dimaknai sebagai lembaran dokumen hukum. Karena sejatinya ia mengandung pandangan hidup, cita-cita, dan falsafah nilai-nilai luhur bangsa yang hanya akan bermakna ketika membumi dalam ruang realita,” ujar Bamsuet dalam perayaan Hari Konstitusi dan HUT ke-79 MPR RI di Gedung Parlemen Jakarta, Ahad (18/8/24).

Ketua DPR RI ke-20 dan Ketua Komisi III DPR RI ke-7 bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini ini memaparkan, sepanjang perjalanan bangsa Indonesia, implementasi konstitusi sebagai hukum dasar telah melewati pergumulan sejarah dan dinamika peradaban. Mulai dari pemberlakuan UUD Tahun 1945, UUD Republik Indonesia Serikat,

UUD Sementara, UUD 1945 hasil Dekrit Presiden 5 Juli 1959, hingga saat ini UUD NRI Tahun 1945 yang telah diamendemen pada periode 1999 – 2002.

“Pengalaman sejarah di atas mengisyaratkan bahwa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, perubahan adalah sebuah keniscayaan. Kita tidak akan mungkin berhenti stagnan pada satu titik terminal sejarah. Setiap preodisasi pemerintahan akan dihadapkan pada tantangan zamannya masing-masing. Baik yang dilahirkan oleh

perubahan sosial, politik, ekonomi, kemajuan teknologi, maupun yang disebabkan dari perbedaan cara pandang kita dalam memaknai arus perubahan,” kata Bamsuet.

Ketua Dewan Pembina Depinas SOKSI (Ormas Pendiri Partai Golkar) dan Kepala Badan Polhukam KADIN Indonesia ini menjelaskan, setelah 26 tahun era reformasi sudah waktunya untuk merenungkan kembali, bermawas diri, dan mengevaluasi, bagaimana konstitusi sebagai sumber tertib hukum yang fundamental, diimplementasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Serta bagaimana memaknai kembali peran dan kedudukan MPR, khususnya pasca

empat kali amendemen konstitusi.

Memaknai konstitusi sebagai sumber tertib hukum yang fundamental harus dikonstruksikan dalam konsepsi bahwa sebuah konstitusi harus “hidup” (living constitution), yang mampu menjawab setiap tantangan dan dinamika zaman. Konstitusi juga harus “bekerja” (working constitution) yang benar-benar dijadikan rujukan dan diimplementasikan secara nyata dalam praktik kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

“Demikian pula memaknai kembali kedudukan dan peran MPR, harus dirujuk dari perspektif MPR sebagai satu-satunya

lembaga negara yang memiliki kewenangan konstitusional tertinggi, antara lain mengubah dan menetapkan UUD. Di samping sebagai satu-satunya lembaga negara yang paling merepresentasikan daulat rakyat, dalam bentuk aspirasi politik dan kepentingan daerah. Karena, MPR terdiri dari anggota DPR dan anggota DPD,” papar Bamsuet.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila dan Wakil Ketua Umum FKPPi ini menguraikan, dalam konteks konstitusi banyak negara yang mentransformasikan semangat perubahan melalui perubahan konstitusi. Negara-negara demokrasi terbesar di dunia

pun tidak anti dengan amendemen konstitusi. Amerika Serikat telah mengubah konstitusi sebanyak 27 kali. India telah mengubah konstitusi sebanyak 106 kali selama periode 1950 hingga 2023.

“Pada hakikatnya sedemokratis apapun pemerintahan dijalankan dan setinggi apapun komitmen kita jalankan, tidak akan pernah menemui titik kesempurnaan. Seruit apapun dinamika politik yang kita jalani, tidak boleh mengorbankan pilar-pilar fundamental dalam kehidupan berbangsa kita, yaitu Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan sesanti Bhinneka Tunggal Ika,” pungkas Bamsuet. □

**Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat**

## Hari Konstitusi Pengingat Anak Bangsa Agar tidak Kehilangan Arah



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

**P**ERINGATAN Hari Konstitusi harus mampu menjadi pengingat setiap anak bangsa bahwa setiap proses perjalanan berbangsa dan bernegara harus berlandaskan konstitusi, UUD NRI Tahun 1945, yang di dalamnya mencantumkan arah dan tujuan bernegara yang telah disepakati para pendiri bangsa.

“Setiap anak bangsa harus mematuhi apa yang diamanahkan para pendiri bangsa melalui konstitusi yang telah disepakati bersama ketika negara ini merdeka,” kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat pada keterangan tertulisnya, Ahad (18/8), dalam rangka Hari Konstitusi yang diperingati setiap 18 Agustus.

Lestari berpendapat, jangan sampai nilai-nilai kebangsaan yang diamanahkan konstitusi kita tidak mampu diamanahkan dan diwariskan kepada setiap anak bangsa, sehingga kita terancam kehilangan arah dalam membangun negeri.

Rerie, sapaan akrab Lestari, berpesan agar arah dan cita-cita pembangunan yang digariskan dalam konstitusi kita jangan sampai terkikis oleh perkembangan zaman.

Karena itu, Rerie yang juga legislator dari Dapil II Jawa Tengah itu, menegaskan, setiap anak bangsa harus benar-benar memahami apa yang diamanatkan para pendiri bangsa melalui konstitusi.

Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu mengajak setiap anak bangsa, tokoh masyarakat dan para pemimpin di setiap daerah memberi teladan kepatuhan dalam menjalankan sejumlah aturan yang ditetapkan konstitusi.

Rerie sangat berharap, penanaman nilai-nilai kebangsaan dan amanah para pendiri bangsa melalui konstitusi UUD 1945 dapat dipahami generasi penerus bangsa demi mewujudkan keadilan dan kemakmuran yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia. □

## Seminar Hari Konstitusi

### Sambutan Plt. Sesjen MPR RI, Siti Fauziah

**P**ERINGATAN Hari Konstitusi 2024 ini ditandai pula dengan kegiatan Seminar Hari Konstitusi. Tampil sebagai narasumber adalah Jimly Asshiddiqie, Yudi Latief, dan Jimmy F. Usunan. Hadir pula Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid dan Fadel Muhammad,

mengetahui apa yang menjadi kelebihan dan kekurangan MPR, pelajaran baik di masa lalu yang harus kita pertahankan, dan pengalaman buruk yang harus kita tinggalkan,” ujarnya.

Selain itu, katanya, melalui seminar ini juga diharapkan kita dapat mengetahui

NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika,” katanya.

Namun, Siti Fauziah mengungkapkan, setelah perjalanannya lebih dari 20 tahun sejak perubahan UUD, muncul berbagai aspirasi masyarakat yang menghendaki adanya pedoman dalam pembangunan nasional dalam bentuk Pokok-Pokok Haluan



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

Pimpinan Fraksi dan Kelompok DPD RI, Pimpinan Setjen MPR RI, serta civits akademika perguruan tinggi di Jabodetabek. Dan, seminar ini dibuka oleh Ketua MPR RI Bambang Soesatyo.

Dalam laporannya, Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Jenderal MPR, Siti Fauziah, mengatakan, penyelenggaraan seminar dalam rangka memperingati Hari Konstitusi yang bertema: “Refleksi Ketatanegaraan: Quo Vadis MPR RI” ini dimaksudkan sebagai refleksi sekaligus proyeksi eksistensi MPR di masa depan. “Melalui proses refleksi dan proyeksi ini diharapkan, kita dapat

kemana arah MPR di masa depan. “Kita senantiasa terbuka atas perkembangan ketatanegaraan Indonesia di masa depan,” tuturnya.

Menurut Siti Fauziah, perubahan kedudukan, wewenang dan tugas MPR sebagai akibat perubahan UUD NRI Tahun 1945 tidak mengurangi peran MPR sebagai lembaga negara yang mengemban visi sebagai Rumah Kebangsaan, Pengawal Ideologi Pancasila dan Kedaulatan Rakyat. “MPR tetap memiliki tugas yang mulia, yaitu membangun karakter bangsa melalui sosialisasi Pancasila, UUD NRI Tahun 1945,

Negara, menghadirkan kembali unsur Utusan Golongan dalam komposisi keanggotaan MPR, dan lain sebagainya, yang layak dipertimbangkan.

Menurut Siti Fauziah, dari seminar ini diharapkan melahirkan pemikiran yang komperatif dalam membahas arah serta masa depan MPR di dalam dinamika kebangsaan yang terus berkembang, memperkuat komitmen untuk menjaga konstitusi, dan memperkokoh MPR sebagai lembaga negara yang dapat mengawal arah masa depan bangsa dengan lebih baik,” ucapnya. □

Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo:

# UUD Pasca Reformasi Tidak Memiliki Pintu Darurat



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

**K**ETUA MPR RI ke-16 sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo menuturkan, amendemen terhadap UUD 1945 telah mengubah sistem ketatanegaraan secara fundamental. Salah satunya adalah reposisi MPR yang tidak lagi berkedudukan sebagai lembaga tertinggi negara dengan segala kewenangan superlatif yang melekat sebelumnya. Meskipun demikian, MPR masih memiliki kewenangan konstitusional tertinggi dalam hal mengubah dan menetapkan UUD, termasuk memberi putusan akhir pada proses pemakzulan (impeachment) terhadap presiden/wakil presiden.

“Setelah 26 tahun reformasi menghantarkan euforia demokrasi, kini mulai muncul wacana untuk mengkaji kembali opsi amendemen terhadap UUD NRI Tahun 1945, termasuk dari para tokoh bangsa. Tujuannya, untuk mengoreksi kembali hasil amendemen konstitusi yang telah dilakukan selama periode 1999 hingga 2002. Untuk itu, MPR periode 2019-2024 akan merekomendasikan kepada MPR yang akan datang agar melakukan kajian mendalam dan menyeluruh terhadap usulan amendemen UUD NRI Tahun 1945,” ujar Bamsoet saat membuka Seminar Hari Konstitusi di Gedung Parlemen Jakarta, Ahad (18/8/24).

Ketua DPR RI ke-20 dan Ketua Komisi III DPR RI ke-7 bidang Hukum, HAM, dan

Keamanan ini menjelaskan, terkait wacana amendemen UUD NRI Tahun 1945, MPR telah mendapatkan beberapa aspirasi. Pertama, amendemen terbatas terkait kewenangan MPR membentuk PPHN. Kedua, penyempurnaan atau pengkajian menyeluruh terhadap UUD NRI Tahun 1945 hasil amendemen sebelumnya.

“Ketiga, kembali ke UUD 1945 sesuai Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Keempat, kembali ke UUD 1945 yang asli, kemudian disempurnakan melalui adendum. Kelima, tidak diperlukan adanya amendemen konstitusi karena UUD NRI Tahun 1945 yang saat ini berlaku masih relevan,” urai Bamsoet.

Ketua Dewan Pembina Depinas SOKSI (Ormas Pendiri Partai Golkar) dan Kepala Badan Polhukam KADIN Indonesia ini menerangkan, urgensi untuk meninjau kembali konstitusi salah satunya berangkat dari kekhawatiran bahwa masih ada banyak celah yang ditinggalkan UUD NRI Tahun 1945 yang berlaku saat ini. UUD pasca reformasi tidak memiliki pintu darurat jika terjadi dispute atau kebuntuan konstitusi dan kebuntuan politik.

Sampai saat ini UUD NRI Tahun 1945 belum memiliki ketentuan hukum yang mengatur tentang tata cara pengisian jabatan publik yang disebabkan hasil Pemilu tidak tepat waktu. Yakni, pergantian anggota DPR dan DPD tanggal 1 Oktober untuk Pileg dan 20 Oktober untuk Pilpres setiap lima

tahunnya.

“Bagaimana jika keadaan darurat negara menyebabkan pelaksanaan Pemilu tidak dapat diselesaikan tepat waktu sesuai perintah konstitusi? Maka secara hukum, tentunya tidak ada anggota legislatif, presiden dan atau wakil presiden yang terpilih sebagai produk Pemilu. Dalam keadaan demikian, timbul pertanyaan, siapa yang memiliki kewajiban atau kewenangan hukum untuk mengatasi keadaan-keadaan bahaya tersebut?” kata Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila dan Wakil Ketua Umum FKPPi ini menambahkan, idealnya UUD NRI Tahun 1945 dapat memberikan jalan keluar secara konstitusional untuk mengatasi kebuntuan ketatanegaraan atau ‘constitutional deadlock’. Jika situasi seperti itu benar-benar terjadi, prinsip kedaulatan rakyatlah yang harus dikedepankan untuk mengatasi keadaan-keadaan bahaya.

“Sebagai representasi dari prinsip kedaulatan rakyat, maka seharusnya MPR kembali memiliki kewenangan subjektif superlatif. Sehingga, dengan kewenangan tersebut dapat mengambil keputusan atau penetapan-penetapan yang bersifat regeling guna mengatasi dampak dari suatu keadaan kahar fiskal maupun kahar politik yang tidak dapat diantisipasi dan tidak bisa dikendalikan secara wajar,” pungkas Bamsoet. □

Wakil Ketua MPR RI, Fadel Muhammad:

# MPR Rekomendasikan Perubahan UUD NRI Tahun 1945



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

**W**AKIL Ketua MPR Prof. Dr. Ir. Fadel Muhammad menyebutkan, Pimpinan MPR periode ini (periode 2019-2024) akan merekomendasikan perubahan (amandemen) UUD NRI Tahun 1945 kepada MPR periode yang akan datang. Selain merekomendasikan perubahan UUD, MPR periode ini juga telah menyelesaikan penyusunan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) yang akan diserahkan kepada MPR periode 2024-2029.

"Kita akan merekomendasikan perubahan (amandemen) UUD NRI Tahun 1945 atau amandemen yang kelima kepada MPR yang akan datang. Perubahan (amandemen) UUD ini diharapkan bisa mengakomodir pemikiran-pemikiran yang berkembang dari semua pihak. Untuk itu, MPR yang baru (periode 2024-2029) kita harapkan bisa mengambil langkah (perubahan atau amandemen UUD) itu," kata Fadel Muhammad usai mengikuti seminar dalam rangka memperingati Hari Konstitusi di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen Jakarta, Ahad (18/8/2024).

Lebih lanjut, Fadel Muhammad

mengungkapkan, berkaitan dengan perubahan konstitusi, Indonesia sedang menerapkan demokrasi di sebuah negara yang plural atau majemuk. Berbeda dengan demokrasi di negara-negara lain, tidak banyak negara yang menerapkan demokrasi di sebuah negara yang plural. Indonesia menjadi percontohan penerapan demokrasi di masyarakat majemuk. "Jadi, kita sekarang ini berada dalam proses menuju demokrasi yang majemuk itu," jelas senator dari Provinsi Gorontalo ini.

Dalam demokrasi di negara yang plural, kata Fadel Muhammad, perlu mengakomodir pikiran-pikiran yang berkembang. "Karena itu, MPR berkeinginan keras agar terjadi perubahan UUD yang kelima sehingga bisa mengakomodir semua pihak dan pikiran-pikiran yang berkembang. Untuk itu, MPR yang baru nanti kita harapkan bisa mengambil sebuah sikap baru (melakukan amandemen atau perubahan UUD). Kita akan merekomendasikan kepada Pimpinan MPR berikutnya," katanya.

Fadel Muhammad menambahkan,

rekomendasi dari MPR periode 2019-2024 ini juga dilengkapi dengan naskah PPHN yang telah selesai disusun. "Kita juga merekomendasikan kepada MPR berikutnya untuk merealisasikan PPHN. Kita juga merekomendasikan pikiran-pikiran yang plural dan majemuk dari para tokoh bangsa ini," imbuhnya.

Menyinggung soal penataan lembaga MPR, Fadel Muhammad menerangkan bahwa keanggotaan MPR juga akan diperbaiki, dengan memasukkan unsur Utusan Golongan. Pada era reformasi, Utusan Golongan dihapuskan dari keanggotaan MPR. Sekarang anggota MPR terdiri dari anggota DPR (perwakilan partai politik) dan anggota DPD (perwakilan atau representasi daerah). "Keanggotaan MPR kita akan perbaiki di masa akan datang. Utusan Golongan bisa menjadi salah satu unsur keanggotaan MPR. Dari aspirasi banyak pihak, ada juga yang menginginkan MPR kembali menjadi lembaga tertinggi, seperti pesan di dalam UUD 1945 sebelum amandemen," tutupnya. □

**Jimly Asshiddiqie, Anggota MPR Kelompok DPD:**

## Perlu Evaluasi Menyeluruh Konstitusi

**A**NGGOTA MPR dari Kelompok DPD Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie mengharapkan, anggota MPR periode 2019-2024 yang akan segera mengakhiri masa jabatannya membuat rekomendasi kepada MPR Periode 2024-2029 untuk melakukan perubahan atau amandemen UUD NRI Tahun 1945. Perubahan (amandemen) UUD NRI Tahun 1945 itu bukan hanya menyangkut menghidupkan kembali PPHN, tetapi menjadi

2024).

Jimly memberi contoh, MPR yang diidealkan para pendiri bangsa adalah penjelmaan seluruh rakyat yang merupakan penggabungan dari tiga sistem perwakilan, yaitu perwakilan politik (melalui partai), utusan daerah (perwakilan daerah di DPD), dan Utusan Golongan. Pada masa reformasi, Utusan Golongan ditiadakan. "Eksistensi Utusan Golongan jangan dihilangkan. Karena itu muncul ide baru untuk menghidupkan

diperbaiki. Misalnya, kewenangan melantik presiden dan wakil presiden dalam sidang paripurna. "Padahal selama ini MPR tidak melantik Presiden dan Wakil Presiden. Pimpinan MPR hanya membuka sidang paripurna dan mempersilahkan Presiden dan Wakil Presiden mengucapkan sumpahnya sendiri. Seharusnya, Pimpinan MPR juga memandu pelantikan dan pengucapan sumpah Presiden dan Wakil Presiden," katanya.



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

evaluasi konstitusi menyeluruh, termasuk penataan kembali kelembagaan MPR, DPR, dan DPD.

"Pimpinan MPR perlu membuat rekomendasi kepada Pimpinan MPR yang akan datang mengenai pentingnya agenda perubahan UUD ini. Perubahan (amandemen) itu jangan hanya menyangkut soal menghidupkan kembali PPHN (GBHN) yang sudah disepakati fraksi di MPR selama dua periode terakhir. Tetapi, harus mengevaluasi konstitusi secara menyeluruh, termasuk pentingnya penataan kembali kelembagaan MPR, DPR, dan DPD," katanya dalam seminar dalam rangka memperingati Hari Konstitusi di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen Jakarta, Minggu (18/8/

kembali Utusan Golongan agar MPR benar-benar menjadi penjelmaan seluruh rakyat," kata Guru Besar Hukum Tata Negara ini.

Selain itu, lanjut Jimly, kedudukan MPR bisa diperkuat sebagai forum aspirasi rakyat Indonesia. Dengan menjadi forum aspirasi rakyat maka rakyat tidak akan menggelar demo atau unjuk rasa di mana-mana, melainkan datang ke MPR untuk menyalurkan aspirasinya. "Ini menjadi pekerjaan MPR yang akan datang sebagai Rumah Rakyat supaya aspirasi rakyat bisa tersalurkan, karena MPR adalah Rumah Rakyat," jelas mantan Ketua MK ini.

Jimly juga menyebutkan, kewenangan MPR yang ada sekarang ini pun perlu

Selain kewenangan yang sudah ada dalam UUD, Jimly memberikan saran mengenai Sidang Tahunan MPR yang sudah menjadi konvensi ketatanegaraan. Sidang Tahunan MPR harus dipisahkan dengan sidang paripurna DPR mendengarkan Nota Keuangan APBN. "Sidang Tahunan ini berisi pidato kenegaraan Presiden menyambut HUT Kemerdekaan RI. Presiden pidato kenegaraan di depan sidang paripurna MPR. Sedangkan sidang penyampaian Nota Keuangan APBN yang menjadi forum DPR perlu dipisah waktunya dengan Sidang Tahunan MPR, bukan di waktu yang sama pada 16 Agustus. Ini tidak perlu diatur dalam UU, tetapi bisa menjadi praktik ketatanegaraan," ujarnya. □

## Bagian II: Peringatan HUT MPR RI

### Sejarah Terbentuknya MPR RI:

**T**ANGGAL 18 Agustus 1945, sehari setelah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) menetapkan UUD 1945. Mulai saat itu penyelenggaraan negara didasarkan pada ketentuan menurut UUD 1945. Namun, mengingat masih dalam masa peralihan, pelaksanaan sistem pemerintahan negara dan kelembagaan negara yang ditentukan UUD 1945 belum dapat dilakukan. Menyadari hal ini, pembentuk UUD telah menyediakan Aturan-aturan Peralihan di dalam UUD 1945 yang terdiri dari 4 Pasal.

Pada Pasal IV Aturan Peralihan menyebutkan, sebelum Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Pertimbangan Agung, dibentuk menurut Undang-Undang Dasar segala kekuasaan dijalankan oleh Presiden dengan bantuan sebuah Komite Nasional. Maka,

pada 29 Agustus 1945 dibentuklah Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) yang keanggotaannya terdiri dari para pemuka masyarakat berbagai golongan, dan daerah-daerah, termasuk mantan Anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia.

Untuk pertama kali keanggotaan KNIP ditunjuk oleh Presiden, yang keanggotaannya mencerminkan tokoh-tokoh Indonesia, berjumlah 135 orang. Setelah dilantik, pada 29 Agustus 1945, untuk pertama kalinya KNIP bersidang di Gedung *Schouwburg* (sekarang Gedung Kesenian Jakarta) di Jalan Gedung Kesenian Jakarta, Jakarta Pusat. Sidang pertama KNIP menghasilkan susunan Pimpinan Komite Nasional Indonesia Pusat sebagai berikut: Ketua Mr. Kasman Singodimedjo, Wakil Ketua Mr. Sutardjo Kartohadikusumo, Wakil Ketua Mr. J. Latuharhary, dan Wakil Ketua Adam Malik.

Hal paling esensial saat itu adalah munculnya keinginan untuk menegaskan prinsip pembagian kekuasaan dalam negara RI yang menjunjung tinggi prinsip kedaulatan rakyat. Kenyataan tersebut mendorong diterbitkannya Maklumat Wakil Presiden No. X (eks) tanggal 16 Oktober 1945, yang menyebutkan: Sebelum terbentuknya MPR dan DPR, KNIP disertai kekuasaan legislatif dan ikut serta menentukan Garis-Garis Besar Haluan Negara.

Maka, sejak diterbitkan Maklumat Wakil Presiden itu terjadi perubahan mendasar atas kedudukan, tugas, dan wewenang KNIP. Sejak saat itulah dimulai lembaran baru dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia, yakni KNIP disertai kekuasaan legislatif dan ikut menetapkan GBHN. Terbentuknya KNIP inilah yang kemudian menjadi embrio MPR. Dan, setiap tanggal 29 Agustus diperingati sebagai Hari Ulang Tahun (HUT) MPR RI. □

### HUT Ke-79 MPR RI

**P**ADA 29 Agustus 2024, MPR RI merayakan hari jadinya yang ke-79. Sekretariat Jenderal MPR RI sebagai penyelenggara menggelar berbagai acara yang berlangsung selama tiga hari

berturut-turut, sejak Kamis hingga Sabtu (29-31 Agustus 2024). Kegiatannya, mulai dari Seminar dan Pameran Perpustakaan, Lomba Naskah dan Foto Jurnalistik, Bicara Buku Bersama Wakil Rakyat, dan Donor Darah.

Semua kegiatan ini berlangsung di kompleks Legislatif atau lebih dikenal sebagai Rumah Kebangsaan.

Puncak acara HUT Ke-79 MPR RI tahun ini terjadi pada Sabtu (31 Agustus 2024). Tak



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

kurang dari 2000 peserta ambil bagian dalam kegiatan yang diberi nama Fun Walk 3 kilometer dan Fun Run menempuh jarak 5 kilometer. Para peserta berasal dari lingkungan Setjen MPR RI dan masyarakat umum. Mereka, para peserta, sejak pagi-pagi benar sudah memenuhi Plasa Utara, Komplek MPR Senayan, Jakarta.

Usai melakukan senam pemanasan beberapa saat, Ketua MPR RI Dr. H. Bambang Soesatyo, SH., MBA., bersama Wakil Ketua MPR RI Dr. H.M. Hidayat Nur Wahid, Lc, MA., Anggota MPR Fraksi Partai Demokrat H.

Anton Sukartono Suratto, M.Si., Plt. Sesjen MPR Siti Fauziah, SE., M.M., mengangkat bendera start, dan serta merta ribuan peserta langsung bergerak ke arah utara melewati rute yang telah ditentukan, yaitu melewati jalan yang melingkari kompleks MPR/DPR, lalu melintasi Jalan Gerbang Pemuda Senayan. Setelah menempuh perjalanan sekitar setengah jam, baik peserta Fun Run maupun Fun Walk, tiba kembali di tempat semula (start).

Tak kalah memikatnya, pada hari itu, pihak panitia penyelenggara menyediakan 180

jenis hadiah door prize untuk para peserta fun run dan fun walk. Doorprize-nya cukup menarik, mulai dari berbagai jenis peralatan rumah tangga, sepeda listrik, sepeda motor, kulkas, televisi, dan sebagainya. Penarikan undian dilakukan oleh Ketua MPR RI Bamsoet, Plt. Setjen MPR Siti Fauziah, SE., MM., Deputi Setjen MPR, serta para Kepala Biro di lingkungan Setjen MPR RI. Para peserta sangat antusias dan tentunya berharap ada keberuntungan buat mereka.

Pada acara yang juga dihiburi musik itu, diselingi pula dengan pengumuman



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

pemenang Lomba Karya Jurnalistik dan Lomba Foto Jurnalistik. Peserta Lomba Karya Jurnalistik dan Karya Foto Jurnalistik ini adalah para wartawan dan fotografer yang terhimpun dalam Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP).

Untuk Lomba Karya Jurnalistik, pemenangnya adalah: Juara I Eko Cahyono (Suara Investor), dengan karya berjudul: 'Judi Online, Kedaulatan Digital dan Komitmen MPR Bangun Generasi Emas Indonesia.' Juara II Sugandi (Realita Rakyat), dengan karya berjudul: 'Menuju Generasi Emas Indonesia

2045, Marwah Konstitusi dan Peran MPR di Era Kekinian.' Kemudian untuk juara III dimenangkan oleh Daniel DD (Jakarta News), dengan karya berjudul: 'Jelang Indonesia Emas, MPR RI Optimalkan Peran Pemuda Jaga Eksistensi NKRI.'

Sedangkan untuk lomba Foto Jurnalistik, pemenangnya adalah: Juara I, Didik Setiawan (Merahputih.com), dengan caption: 'Bantuan Pimpinan MPR untuk Penyandang Disabilitas'; Juara II, M. Taufan (Tempo) dengan caption: 'Belajar Sambil Mengetahui Pahlawan'; dan Juara III, Elvis

Sandauw (Berita Nasional) dengan caption: 'Ketua MPR Cium Tangan Wapres ke-6 Tri Sutrisno..'

Selain kegiatan fun walk dan fun run, serta lomba karya jurnalistik dan karya foto jurnalistik, pada hari yang sama Poliklinik MPR bekerjasama dengan PMI DKI Jakarta menggelar aksi donor darah. Dari target 75 orang pendonor tercatat 63 orang calon pendonor yang mendaftar. Namun, 11 orang di antaranya dinyatakan gagal mendonorkan darahnya. Dan, dari aksi donor darah itu diperoleh 52 kantong darah. □

# Upacara Peringatan HUT Ke-79 MPR RI



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

**U**PACARA bendera memperingati HUT Ke-79 MPR RI tahun 2024 berlangsung 29 Agustus 2024 di halaman Gedung Nusantara IV Komplek MPR/DPR RI. Bertindak selaku inspektur upacara adalah Plt. Sekretaris Jenderal MPR Siti Fauziah SE., MM. Dihadiri oleh Sekretaris Jenderal DPR RI, Perwakilan Sekretaris Jenderal DPD RI, para deputi, pejabat, dan pegawai di lingkungan Setjen MPR, DPR, dan DPD RI.

Dalam sambutannya, Siti Fauziah antara lain mengatakan, 79 tahun bukanlah waktu

yang pendek. Dalam jangka waktu 79 tahun itu, MPR telah menempuh perjalanan sejarah yang panjang. Melewati berbagai momen penting dalam mengawal demokrasi dan menjaga konstitusi bangsa.

Menurut Bu Titi, begitu Siti Fauziah biasa disapa, pasca perubahan UUD 1945, secara teoritis, normatif dan prosedur, Indonesia dapat disebut sebagai negara demokrasi yang sudah terkonsolidasi.

“Kita rakyat Indonesia mesti bersyukur, di usia ke-79 ini MPR dan DPR tetap teguh berdiri sebagai pilar demokrasi dan penjaga

konstitusi di Indonesia. Demikian juga dengan lembaga DPD, yang lahir dari rahim reformasi, terus menemukan bentuk dalam mengagregasi kepentingan daerah untuk diperjuangkan dalam perumusan kebijakan di tingkat nasional,” ungkapnya.

Dalam kesempatan itu, Bu Titi berpesan kepada seluruh pejabat dan pegawai Sekretariat Jenderal MPR, DPR, dan DPD, untuk terus memberikan pelayanan terbaik dengan menjaga integritas, profesionalisme, dan semangat kebangsaan dalam setiap tugas dan fungsi yang diemban. □

## Pameran Perpustakaan



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

**S**ELAIN seminar, di hari pertama perayaan HUT Ke-79 MPR dimeriahkan dengan Pameran Perpustakaan. Perpustakaan MPR bekerjasama dengan Perpustakaan Nasional, Perpustakaan BPK-RI, Perpustakaan Jakarta, Perpustakaan

Kementerian Kelautan dan Perikanan, Komisi Yudisial, serta DPD RI menggelar Pameran Perpustakaan di Plasa Nusantara IV. Acara itu berlangsung sejak 29 hingga 31 Agustus 2024.

Selama pameran berlangsungnya, seluruh tenan nyaris tak pernah sepi pengunjung.

Menariknya, hampir setiap pengunjung selalu singgah di setiap stan yang ada di arena pameran tersebut. Selain ingin memperoleh informasi, yang pasti setiap pengunjung tergiur untuk mendapatkan souvenir yang disediakan oleh masing-masing peserta pameran. □

## Seminar Perpustakaan



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

**S**ETELAH memimpin upacara peringatan HUT Ke-79 MPR, Plt. Sekretaris Jenderal MPR Siti Fauziah menghadiri Seminar Perpustakaan dengan tema: 'Membangun Personal Branding Pustakawan di Era Digital'. Acara tersebut berlangsung di Ruang Delegasi, Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Tiga orang pustakawan hadir sebagai narasumber dalam seminar tersebut. Mereka

adalah Pustakawan Ahli Utama Perpustakaan Nasional RI Drs. Muhammad Syarif Bando, M.M.; Pustakawan Madya Perpustakaan Universitas Indonesia, Dra. Kalarensi Naibaho, M.Hum., CDILS.; Serta Pustakawan Madya Perpustakaan MPR RI, Surya Yudha Hartanto, SE. Bertindak sebagai moderator adalah Pustakawan Madya Perpustakaan Kementan RI, Ir. Juznia Andriani, M.Hum.

Saat membuka seminar, Siti Fauziah memuji

pilihan tema untuk seminar tersebut. Menurut Siti Fauziah, personal branding menjadi satu keniscayaan yang harus ada dan menyatu dalam diri pustakawan. Apalagi, di era modernisasi digital, tidak akan terlihat lagi perpustakaan yang hanya menjadi tempat meminjam buku dengan model administrasi manual, seperti mencari buku dan mencatat pada lembar peminjaman yang diselipkan di dalam sampul belakang buku.

Kini, tandas Bu Titi, zaman telah berubah.

Saat ini, katanya, seluruh isi perpustakaan berada di dalam genggaman tangan, melalui smart phone atau gawai yang dimiliki. Sistem administrasinya pun *full high tech*. Jadi, tandasnya, peran Pustakawan tidak lagi terbatas pada pengelolaan buku atau sumber daya informasi fisik saja, tapi Pustakawan kini dihadapkan pada tantangan untuk

menjadi fasilitator informasi yang aktif, inovatif, dan dapat dipercaya.

“Untuk itu, Pustakawan harus mengikuti kemajuan digital agar tidak tertinggal oleh zaman. Masa kini personal branding menjadi satu kebutuhan dan tidak bisa diabaikan,” terangnya.

Seminar akhirnya menyimpulkan, setiap

Pustakawan wajib membangun personal branding. Karena, dengan personal branding, Pustakawan akan mampu membangun citra positif perpustakaan di mata pemustaka. Citra yang kuat menjadikan perpustakaan sebagai pusat informasi yang dapat dipercaya dan dihormati, demikian pula sebaliknya. □

## Bicara Buku Bersama Wakil Rakyat



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

**M**ASIH dalam rangkaian acara HUT Ke-79 MPR juga digelar acara “Bicara Buku bersama Wakil Rakyat.” Dengan tema “Parlemen Kolaboratif, Parlemen Efektif, dan Partisipatif,” acara tersebut berlangsung di Ruang Delegasi, Lantai 2, Gedung Nusantara V, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (30/8/2024).

Hadir sebagai pembicara pada acara tersebut adalah Wakil Ketua DPD Sultan Bakhtiar Najamudin, serta dua anggota MPR dari kelompok DPD, yaitu Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie dan Dr. Abdul Kholik, SH., M.Si.

Acara ini dihadiri oleh Plt. Sekretaris Jenderal MPR Siti Fauziah, Kepala Biro Humas

dan Sistem Informasi Anies Mayangsari Muninggar, perwakilan mahasiswa UI, mahasiswa Perguruan Tinggi Hukum Militer, alumni Universitas Jenderal Soedirman, dan pejabat struktural dan fungsional di lingkungan Sekretariat Jenderal MPR.

Anggota MPR RI dari Kelompok DPD RI, Abdul Kholik, menyatakan, tiga lembaga parlemen, yaitu MPR, DPR, DPD, bisa saling berfungsi dan tidak saling menegasikan. Ketiganya bisa saling berkolaborasi. “DPR dan DPD juga bisa menjaga ruang partisipasi rakyat yang lebih maksimal lagi,” katanya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPD Sultan Bakhtiar Najamudin berpendapat, DPD tetap dibutuhkan dan kewenangannya perlu

diperkuat. “Tidak boleh ada benturan DPR dan DPD. DPD jangan menjadi subordinat, DPD jangan menjadi kompetitor dari DPR, melainkan berkolaborasi. Jadi, jangan saling mengambil domain. DPD lebih pada kepentingan daerah,” katanya.

Sultan Najamudin meyakini, politik dinamis dan setiap saat bisa terjadi momentum untuk penguatan DPD. “Sekarang track sudah berjalan, berkolaborasi dengan DPR. Suatu saat momentum datang, DPD memang harus diperkuat untuk menyempurnakan sistem ketatanegaraan kita, untuk check and balances, aspirasi dan kepentingan daerah bisa dieksekusi,” katanya. □

(tim majelis)

Empat Pilar MPR Bersama Tanoto Scholars Gathering 2024

# Bamsoet Pentingnya **Wawasan** Kebangsaan bagi Generasi Muda



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

**K**ETUA MPR RI ke-16 sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar yang juga Dosen Tetap Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Borobudur, Universitas Trisakti, Universitas Pertahanan RI (UNHAN), Universitas Jayabaya, dan Pendiri Universitas Perwira Purbalingga (UNPERBA) Bambang Soesatyo mengingatkan bahwa kemajuan artificial intelligence (AI) memberikan disrupsi pada dunia pendidikan. Masifnya AI Generatif seperti ChatGPT, Gemini, dan lainnya, membuat siswa/mahasiswa bisa dengan mudah mendapatkan berbagai pengetahuan akademik, bahkan tanpa perlu bertanya kepada guru/dosen di kelas.

“Grand View Research melaporkan, pasar teknologi AI di dunia pendidikan meningkat dari USD 36,37 juta pada tahun 2020 menjadi USD 556,9 juta pada tahun 2021, dan mencapai USD 2,5 miliar pada 2022. Temuan lain dari Deloitte, nilai pasar AI Generatif mencapai USD 44 miliar pada 2023, dan USD 66 miliar pada 2024. Allied Market Research memprediksi pasar teknologi AI di dunia pendidikan akan mencapai USD 88,2 miliar pada tahun 2032,” ujar Bamsoet dalam Pembekalan Kebangsaan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI kepada Tanoto Scholars Gathering 2024, secara virtual dari Ruang Kerja Ketua MPR RI, Jakarta, Senin (29/7/24).

Hadir, antara lain CEO Tanoto Foundation dan Executive Vice President Royal Golden Eagle for External Affairs Benny Lee, Coun-

try Head Tanoto Foundation Indonesia Inge Kusuma, Head of Leadership Development and Scholarship Tanoto Foundation Indonesia Michael Susanto, serta Head of Strategic and Impact Communication Tanoto Foundation Indonesia Deviani Wulandari.

Ketua DPR RI ke-20 dan Ketua Komisi III DPR RI ke-7 bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, sebagai dosen, dirinya perlu kerja keras mengoreksi berbagai tugas maupun disertasi mahasiswa, karena harus bisa membedakan mana yang tugasnya dikerjakan oleh AI mana yang dikerjakan oleh kemampuan mahasiswa sendiri. Karenanya, ia mendorong para peserta didik harus bijaksana menggunakan AI, jangan hanya memanfaatkannya untuk copy paste mengerjakan tugas. Kehadiran AI harusnya bisa memperluas jangkauan pengetahuan, bukan justru menjadikan peserta didik kehilangan jati dirinya sebagai pencari ilmu.

“Daripada menghalangi kemajuan AI, dunia pendidikan kita justru harus adaptif. AI bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan aktifitas pembelajaran, hingga manajemen pendidikan. Di sisi lain, orientasi pendidikan tidak boleh hanya fokus pada melahirkan generasi yang memiliki kecerdasan akademik, melainkan juga harus memiliki karakter. Karenanya, pemahaman terhadap wawasan kebangsaan harus dikedepankan, bersamaan dengan sikap berpikir kritis, analitis, kreatif, dan imajinatif,” jelas Bamsoet.



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

Ketua Dewan Pembina Depinas SOKSI (Ormas Pendiri Partai Golkar) dan Kepala Badan Polhukam KADIN Indonesia ini menerangkan, urgensi penanaman wawasan kebangsaan semakin penting, mengingat

banyak hasil survei mengindikasikan melemahnya penghargaan generasi muda terhadap nilai-nilai luhur bangsa. Misalnya tahun 2017, survei CSIS menemukan, sekitar 9,5% generasi milenial setuju mengganti

Pancasila dengan ideologi yang lain. Tahun 2018, survei LSI menemukan fakta bahwa hanya 6,2% siswa yang berhasil menjawab pertanyaan dengan benar tentang materi wawasan kebangsaan.

Tahun 2020, hasil survei Komunitas Pancasila Muda mencatat, masih ada sekitar 19,5% responden yang merasa tidak yakin bahwa nilai-nilai Pancasila penting, atau relevan bagi kehidupan mereka. Pancasila hanya dianggap sekedar istilah yang tidak benar-benar dipahami makna filosofisnya.

"Tahun 2022, hasil survei Litbang Kompas dan Pusat Studi Kebangsaan Indonesia, melaporkan hanya 28,6% siswa yang memahami Pancasila di ruang kelas, sementara 2,7% siswa memahaminya dari media sosial. Berbagai hasil survei tersebut menjadi gambaran betapa Pancasila semakin terealisasi dan terpinggirkan dari diskursus kebangsaan generasi muda bangsa," pungkas Bamsuet. □

Sosialisasi Empat Pilar MPR & PGMI

# Yandri Susanto : Pendidikan Kunci Sukses Indonesia Emas 2045



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

**W**AKIL Ketua MPR Yandri Susanto menyampaikan pentingnya mengenyam pendidikan bagi setiap anak bangsa. Kesempatan untuk mendapatkan pendidikan memberikan pengetahuan kepada anak-anak untuk menjalani kehidupan di dunia dan akhirat.

“Pendidikan merupakan kunci sukses dalam menjalani kehidupan di dunia dan akhirat. Pendidikan juga berperan penting dalam mencapai Indonesia Emas 2045,” ungkap Yandri Susanto dalam acara Sosialisasi 4 Pilar MPR yang di Pondok Pesantren Modern Asa’adah Cikeusal Kabupaten Serang, Banten, Sabtu (3/8/2024).

Kegiatan Sosialisasi Empat Pilar MPR yang diselenggarakan oleh MPR bekerjasama dengan Persatuan Guru Madrasah Indonesia (PGMI) Kabupaten Serang itu dihadiri juga Anggota Komisi X DPR Desi Ratnasari, Ketua Yayasan Bai Mahdi Sholeh Ma’mun Ratu Rachmatuzakiyah, Pimpinan Ponpes Modern Asa’adah KH. Mujiburohman, serta seluruh Pengurus dan Anggota PGMI Kabupaten Serang.

Madrasah dan Pondok Pesantren (Ponpes) merupakan lembaga pendidikan yang sudah ada sebelum Indonesia merdeka. Banyak tokoh bangsa yang lahir dari madrasah dan pesantren. Karena itu, menurut Yandri, tak dapat dipungkiri Ponpes dan Madrasah merupakan tulang punggung pendidikan di Indonesia. “Pendidikan karakter dan pengetahuan agama ditanamkan semenjak dini di madrasah,” sambung Yandri. Lebih lanjut Yandri menjelaskan, selama

ini keberlangsungan Ponpes dan Madrasah berjalan secara tradisional yang hanya ditopang oleh kemampuan yayasan dan pengasuh. Maka dari itu, Yandri mendorong adanya perhatian dari pemerintah daerah untuk mengeluarkan Perda terkait pemberian honor guru madrasah.

“Kami paham betul denyut nadi perjuangan guru madrasah, sehingga kami berharap adanya peningkatan kesejahteraan guru madrasah,” tutup Yandri. □



FGD bersama Forum Aspirasi Konstitusi

# Bamsoet Ingatkan Kembali UUD 1945 Bukan Kitab Suci

**K**ETUA MPR RI ke-16 sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Bambang Soesatyo, sepakat dengan Ketua Forum Aspirasi Konstitusi sekaligus Anggota DPD RI dan Pakar Hukum Tata Negara, Prof. Jimly Asshiddiqie, bahwa UUD NRI Tahun 1945 bukanlah kitab suci yang tabu untuk diubah. Justru, harus terus menerus dilakukan evaluasi secara mendalam agar UUD NRI Tahun 1945 dapat menjawab tantangan zaman.

Setelah melakukan empat kali amandemen, terakhir pada tahun 2002 dibutuhkan penataan kembali sistem politik ketatanegaraan pasca 25 tahun reformasi untuk melihat sejauh mana konstitusi telah bekerja untuk kemajuan bangsa. Berkaca pada negara lain, Amerika Serikat yang telah 27 kali melakukan amandemen konstitusi, saat ini tengah menyiapkan kembali amandemen konstitusinya untuk ke-28 kali.

Evaluasi konstitusi bukan semata pada penataan kewenangan lembaga negara, seperti halnya penguatan MPR RI, baik dari sisi kewenangan maupun keanggotaan. Melainkan juga pada perbaikan redaksional dalam penulisan konstitusi. Oleh Prof. Jimly disebut dengan merakit, merajut dan menjahit kembali naskah konstitusi pasca reformasi.

"Hasil kajian tentang perubahan kelima UUD NRI tahun 1945 ini akan menjadi bahan rekomendasi Pimpinan MPR RI sekarang kepada Pimpinan MPR RI periode 2024-2029," ujar Bamsoet usai membuka Focus Group Discussion (FGD) bersama Forum Aspirasi Konstitusi tentang Penataan dan Penguatan Kelembagaan MPR-DPR-DPD melalui Perubahan kelima UUD di MPR RI, Jakarta, Senin (29/7/24).

Dalam acara FGD itu hadir, antara lain Wakil Ketua MPR RI Prof. Fadel Muhammad, Ketua Forum Aspirasi Konstitusi sekaligus Anggota DPD RI Prof. Jimly Asshiddiqie, Ketua Komite II DPD RI Yorrys Raweyai, serta Ketua Komite III DPD RI Hasan Basri. Hadir pula para anggota DPD RI, antara lain Teras Narang, Abdul Kholik, dan Filep Wamafma.



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

Ketua DPR RI ke-20 dan Ketua Komisi III DPR RI ke-7 bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, terkait penataan kewenangan lembaga negara, Forum Aspirasi Konstitusi sudah menyerap aspirasi dari berbagai kalangan yang menginginkan agar MPR bisa kembali menjadi Lembaga Tertinggi Negara, sehingga bisa berperan aktif menyelesaikan berbagai dispute kebuntuan politik dan hukum yang terjadi di negeri ini. Dari sisi keanggotaan, selain diisi anggota DPR sebagai representasi politik, dan anggota DPD RI sebagai representasi golongan, keanggotaan MPR RI juga perlu diisi kembali oleh Utusan Golongan.

"Kehadiran Utusan Golongan sejak awal kemerdekaan telah diinisiasi oleh para founding fathers kita, dengan semangat tidak boleh ada satupun elemen bangsa yang ditinggalkan. Reformasi justru menghapuskan keberadaannya. Tidak heran jika kini banyak kelompok masyarakat yang tidak puas terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satunya karena mereka merasa tidak dilibatkan, bahkan merasa ditinggalkan," jelas Bamsoet.

Ketua Dewan Pembina Depinas SOKSI (Ormas Pendiri Partai Golkar) dan Kepala

Badan Polhukam KADIN Indonesia ini menerangkan, keberadaan Utusan Golongan yang mewakili golongan tertentu juga terdapat di berbagai parlemen negara maju. Seperti di Inggris melalui House of Lords yang diisi para bangsawan dan kalangan agamawan. Maupun di Parlemen India, Rajya Sabha, diisi orang-orang yang memiliki keahlian atau pengalaman khusus dalam berbagai bidang, seperti seni, sastra, sains, dan pelayanan sosial.

Esensi dari demokrasi, menurut Bamsoet, bukan hanya tentang keterpilihan melainkan juga tentang keterwakilan. Tidak semua yang dipilih melalui Pemilu bisa mewakili aspirasi rakyat. Untuk itu perlu dilengkapi dengan Utusan Golongan yang bisa mewakili kelompok masyarakat tertentu, seperti Golongan Seniman, Golongan Budayawan, Golongan Adat, Golongan Agamawan, hingga Golongan Profesi seperti guru, wartawan, dan dokter.

Jadi, "Keberadaan Utusan Golongan bisa memastikan bahwa setiap kelompok masyarakat dapat memberikan perspektif dan masukan yang berharga dalam proses legislatif maupun dalam proses kehidupan kebangsaan dalam arti yang lebih luas," pungkas Bamsoet. □

## Parliament Visit: Forum Pelajar Indonesia ke MPR RI

**S**EKITAR 150-an pelajar tingkat SMA/SMK/MA dari berbagai provinsi di Indonesia, yang tergabung dalam Forum Pelajar Indonesia 2024 melaksanakan kegiatan Parliament Visit ke Gedung MPR, dan diterima oleh Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid, di Gedung Nusantara V, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (1/8/2024).

Acara tersebut merupakan agenda tahunan Indonesia Student Youth Forum (ISYF), yang melibatkan pelajar tingkat sekolah menengah atas dari seluruh Indonesia yang memiliki kapasitas dan integritas. Forum ini membuka ruang bagi pelajar untuk

Pemuda Jong Java, Jong Batak, Jong Celebes, Jong Sumateranen Bond, Jong Islamieten Bond, Jong Ambon, Pemuda Betawi, dan lainnya berkumpul dan menyuarakan kebulatan tekad bersama untuk menuju dan mewujudkan Indonesia merdeka.

HNW, begitu Hidayat Nur Wahid biasa disapa, diundang secara khusus sebagai narasumber utama untuk menyampaikan pandangannya terhadap kegiatan positif yang melibatkan para pelajar Indonesia ini. Terutama, memberikan penjelasan bahwa semua kiprah sukses tersebut tidak ujug-ujug terjadi. Persiapan Indonesia merdeka

dalam komunitas adalah pada tahun 1924. Ketika Bung Hatta dan kawan-kawannya di Belanda membuat satu perhimpunan bernama Perhimpunan Indonesia. Perhimpunan itu menyebarkan sebuah kata tentang tuntutan Indonesia Merdeka. Dan, kemudian, merekapun pulang ke Indonesia pada tahun 1928, dan pada tanggal 28 Oktober 1928 mereka membuat Soempah Pemoeda," papar HNW.

Jadi, lanjut HNW, Indonesia Merdeka tahun 1945, sudah dipersiapkan jauh-jauh hari oleh para pemuda terpelajar itu. Saat ini, Indonesia telah mengeluarkan sebuah gagasan besar yang bertujuan untuk menjadikan Indonesia



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

berdiskusi dan berbagi pengalaman antarsesama, serta bertemu berbagai pemangku kebijakan untuk menyampaikan aspirasi kebijakan yang mendukung kemajuan pelajar di Indonesia.

Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid dalam sambutannya mengungkapkan bahwa peran pelajar dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia, dari era perjuangan dan kebangkitan bangsa, sangatlah besar dan menentukan. Mereka menjadi tonggak penting dalam menghadirkan Indonesia Merdeka tahun 1945.

Contoh yang paling terlihat jelas adalah saat peristiwa fenomenal Soempah Pemoeda 1928. Waktu itu, para pemuda dari berbagai latarbelakang suku, ras, dan agama, seperti

waktu itu, tentunya melalui sebuah proses panjang yang didesain secara matang oleh mereka, para generasi muda, yang terpelajar, bukan mereka yang buta huruf, buta politik atau buta sosial.

"Mereka bersatu padu membiasakan diri bersatu dalam keberagaman di rentang waktu yang panjang. Sejak 1920-an dan bertemu di gelar Sumpah Pemuda di tahun 1928," ujar Wakil Ketua MPR RI dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.

Selanjutnya, HNW menceritakan, semua dimulai dari banyak pelajar Indonesia setelah menempuh pendidikan di Belanda dan Mesir, kemudian pulang ke Indonesia dan mulailah mereka menyebut soal Indonesia.

"Pertama kali kata-kata Indonesia disebut

sebagai bangsa yang berdaulat, maju, adil, dan makmur pada tahun 2045, yakni Visi Indonesia Emas 2045. Target dari gagasan ini adalah tahun 2045, yakni pada peringatan 100 tahun Kemerdekaan Indonesia.

"Dalam menyongsong Indonesia Emas 2045 itu juga harus dipersiapkan mulai dari sekarang oleh generasi milenials, generasi Z terpelajar. Kenapa generasi terpelajar sangat penting, sebab kita tidak mungkin bisa merancang satu kreasi besar kalau perancangnya sendiri tidak punya visi besar tentang Indonesia. Maka, sekali lagi, persiapkan diri kalian menjadi generasi muda terpelajar sehingga bisa mewujudkan Indonesia Emas itu," tandasnya. □

DER

## Peresmian Cap Telapak Tangan Kedua PWP 45

# Siti Fauziah: Wanita Indonesia Tegur Berperan dalam Kemerdekaan dan Pembangunan Bangsa



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

**P**ELAKSANA Tugas (Plt) Sekretaris Jenderal MPR RI, Siti Fauziah, mengungkapkan bahwa perjuangan kemerdekaan Indonesia tak bisa lepas dari peran dan keterlibatan kaum wanita Indonesia. Bahkan, peran dan kiprah para wanita ini terus mewarnai perjalanan bangsa pasca kemerdekaan hingga era pembangunan nasional.

"Alhamdulillah, dengan munculnya kesetaraan gender di era keterbukaan seperti sekarang ini, menempatkan posisi wanita dan pria setara dalam hak dan kewajibannya," tutur Bu Titi, begitu dia biasa disapa. Dampaknya, menurut Bu Titi, wanita bisa meraih posisi karier yang baik di segala bidang.

"Menurut saya, ini adalah hasil perjuangan keras kaum wanita Indonesia dulu dan kini," katanya, usai acara Peresmian Cap Telapak Tangan Kedua Wanita Pejuang 45 dan Pengisi Pembangunan Nasional, yang digelar Perkumpulan Wanita Pejuang (PWP) 45, di Gedung Pustaloka, Nusantara IV, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (6/8/2024).

Selanjutnya, Bu Titi menjelaskan, acara Peresmian Cap Telapak Tangan Wanita Pejuang 45 ini merupakan kelanjutan dari

acara Aksi 1000 Cap Telapak Tangan Pertama yang digelar di Gedung Joang 45, Menteng, Jakarta, bulan Desember 2016. "Saya pribadi sangat mendukung kegiatan positif yang melibatkan wanita-wanita luar biasa Indonesia. Acara ini mengingatkan kembali akan peran dan kiprah bersejarah wanita Indonesia dan perannya di era kekinian," imbuhnya.

Bu Titi berharap, melalui kegiatan dan acara tersebut bisa membangkitkan semangat para wanita atau perempuan In-

donesia agar bisa lebih berjaya lagi ikut membangun bangsa, di berbagai lembaga atau instansi, baik pemerintah atau swasta di semua bidang profesi. Termasuk lebih berjaya di bidang hukum, politik, pendidikan, hingga seni dan budaya.

Acara Peresmian Cap Telapak Tangan Kedua ini berlangsung lancar dan meriah. Ketua PWP 45, Melani Leimena Suharli, mengatakan, tujuan acara ini untuk menggelorakan semangat masyarakat, senantiasa tidak melupakan sejarah perjuangan bangsa, mengenang perjuangan para tokoh wanita dan membangkitkan spirit revitalisasi perjuangan wanita di era kekinian.

Terlihat hadir dalam acara itu wanita-wanita hebat Indonesia, antara lain: Menteri PPPAI RI I Gusti Ayu Bintang Darmawati (hadir secara daring); Anggota Watimpres RI, Putri Kus Wisnu Wardani; Ketua Umum Kowani, Giwo Rubianto Wiyogo; Ketum Ikatan Keluarga Pahlawan Nasional Indonesia (IKPNI), Meutia F. Hatta Swasono; Kepala Unit Pengelola Museum Kesejarahan Jakarta, Esti Utami; Hana Hasanah Fadel Muhammad; anggota DPR Fraksi Gerindra Mulan Jameela; serta seluruh pengurus PWP 45. □



DER

**MPR Gelar Sidang Tahunan dan Berbagai Acara**

**Siti Fauziah: Perlu Sinergi Antar Unit Kerja Agar Acara Sukses**



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

**S**ELURUH pegawai di lingkungan Kesetjenan MPR, dari Eselon I, II, III, hingga IV, serta pegawai struktural dan fungsional lainnya, Jumat (9/8/2024) memenuhi ruangan Gedung Nusantara V, Komplek MPR/DPR/DPD Senayan, Jakarta. Hari itu, di gedung bersejarah itu, berlangsung briefing sehubungan akan berlangsungnya berbagai kegiatan diselenggarakan oleh MPR RI tahun ini, khususnya pada bulan Agustus 2024.

Plt. Sesjen MPR, Siti Fauziah, SE., MM., dalam pengarahannya di hadapan seluruh

pegawai Setjen MPR RI mengatakan, MPR pada tahun ini menggelar berbagai kegiatan berupa: Sidang Tahunan MPR Tahun 2024, Sidang Akhir Masa Jabatan MPR Periode 2019-2024, Sidang Awal Masa Jabatan MPR Periode 2024-2029, Sidang Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Periode 2024-2029, Peringatan Hari Konstitusi, HUT MPR, serta kegiatan pendukung lainnya. Kegiatan, jelas Siti Fauziah, dimulai 16 Agustus 2024 dengan agenda Sidang Tahunan MPR.

Menurut perempuan yang akrab disapa

Bu Titi ini, Sidang Tahunan digelar pada hari Jumat, 16 Agustus 2024, mulai Pukul 09.30 hingga 11.28 WIB di Gedung Nusantara. Sidang dihadiri oleh seluruh anggota MPR dan undangan lainnya. Kepada seluruh pegawai, Bu Titi mengingatkan, meski MPR sudah biasa melaksanakan Sidang Tahunan, namun semua harus tetap mencermati, sebab situasi bisa berubah.

Usai rangkaian Sidang Tahunan, lebih lanjut Bu Titi menjelaskan, Ketua dan Wakil Ketua MPR menuju ke Gedung Nusantara IV. Di ruangan ini, Ketua dan Pimpinan MPR akan menyerahkan buku-buku karyanya kepada Perpustakaan MPR. "Ketua MPR berpesan agar buku yang akan diserahkan kepada perpustakaan sudah ada di tempat acara sehingga bisa dibaca oleh para undangan," tutur Siti Fauziah.

Kemudian, pada 18 Agustus, MPR akan memperingati Hari Konstitusi dan HUT MPR. Di Hari Konstitusi, MPR menggelar dua kegiatan, yaitu: Pertama, di Gedung Nusantara V, pukul 10.00 WIB diadakan Seminar Hari Konstitusi; Kedua, di Gedung Nusantara IV, pukul 19.00-21.00 WIB digelar puncak Peringatan Hari Konstitusi. "Terkait Hari Konstitusi, seluruh pegawai wajib hadir dalam semua acara," tegas Siti Fauziah.



Usai memperingati Hari Konstitusi berlanjut ke acara Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) MPR RI pada 29 Agustus 2024. Untuk HUT MPR RI digelar berbagai acara, seperti Seminar (digelar oleh Perpustakaan MPR) dan pembukaan Lomba Karya Jurnalistik dan Pameran Foto.

Lalu, di akhir bulan Agustus, atau tepatnya 31 Agustus 2024, diselenggarakan acara Fun Walk dan Fun Run dengan peserta seluruh pegawai dan umum yang total jumlah peserta 2.000 orang. Untuk kegiatan ini, menurut Bu Titi, pihak panitia menyediakan

door prize yang menarik.

Di hari yang sama (31 Agustus), juga digelar kegiatan donor darah. Siti Fauziah berharap kepada pegawai yang memenuhi syarat sehat agar berdonor darah. "Kita tunjukkan kepedulian kita kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan darah," tuturnya. Kegiatan ini melibatkan Unit Poliklinik Pratama Setjen MPR dan PMI.

Menghadapi Sidang Tahunan MPR dan berbagai acara sebagaimana telah disebutkan, Bu Titi berharap, seluruh pegawai melakukan kerja dengan penuh kekompakan

dan tak ada sekat antarunit dan bagian. "Jadi, ini kerja bersama, kerja tim, dan bukan kerja personal. Dan, kerjasama ini harus kita laksanakan demi nama baik MPR," tambahnya.

Dalam kesempatan tersebut, Bu Titi juga mengingatkan agar semua pegawai tidak terlibat urusan judi online. "Jangan sekali-kali main judi online," tegasnya. Bila ada yang terlibat dalam permainan ini, dia tak segan-segan memberi sanksi dan hukuman. "Kita tindak tegas sesuai aturan yang berlaku bagi pegawai yang main judi online," ujarnya. □

## Forum Bakohumas

# Plt. Sesjen MPR Ajak Kabarkan Sidang-Sidang MPR Tahun 2024

JAJARAN kehumasan dari berbagai lembaga negara, kementerian, TNI, Polri, BUMN, dan pemerintah daerah, pada Senin, 12 Agustus 2024, memenuhi Ruang Delegasi, Komplek MPR/DPR/DPD Senayan, Jakarta. Kehadiran mereka di ruangan yang berada di lantai 2 itu untuk mengikuti Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Bakohumas).

Bakohumas yang digelar oleh MPR dengan acara seminar bertema: 'Serba-Serbi Sidang MPR Tahun 2024' itu dihadiri oleh Plt. Sesjen MPR Siti Fauziah, SE., MM.; Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika yang sekaligus Ketua Bakohumas, Usman Kansong, S.Sos., M.Si; Kepala Biro Humas dan Keterbukaan Informasi Publik UI, Dra. Amelita Lusua, MSi., CPR.; Kepala Biro Komunikasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Dr. I Gusti Ayu Dewi Hendriyani, A.Par., M.Par., CHE.; Kepala Biro Humas dan Sistem Informasi Setjen MPR, Anies Mayangsari Muningsar, S.IP., M.E.; Serta jajaran Eselon I dan II di lingkungan Setjen MPR.

Dalam sambutannya, Plt. Sesjen MPR, Siti Fauziah, mengatakan, Bakohumas memiliki peran sangat strategis, sarana kolaborasi antarlembaga dan institusi dalam bidang kehumasan. "Bakohumas tidak hanya strategis untuk memperkuat citra dan reputasi, tetapi juga meningkatkan kepercayaan publik terhadap informasi yang disampaikan oleh biro kehumasan dari lembaga negara, kementerian, TNI, Polri, dan



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

institusi lainnya," ujarnya.

Sebagai forum yang strategis, menurut Siti Fauziah, maka MPR secara rutin mengadakan dan mengikuti kegiatan Bakohumas. "Kali ini kita sebagai tuan rumah kegiatan Bakohumas," ujar perempuan yang akrab disapa Bu Titi itu. MPR mengadakan Bakohumas, katanya, karena di Tahun 2024 ini lembaga negara ini menggelar berbagai sidang, yaitu: Sidang Tahunan MPR pada tanggal 16 Agustus, Sidang Akhir Masa Jabatan MPR Periode 2019-2024 pada tanggal 25 September, Sidang Awal Masa Jabatan MPR Periode 2024-2029 pada tanggal 1 Oktober, dan Sidang Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Periode 2024-2029 pada 20 Oktober.

Dengan mengundang jajaran kehumasan dari berbagai lembaga negara, kementerian, TNI, Polri, dan institusi lainnya dalam Bakohumas, Siti Fauziah berharap, jajaran-jajaran kehumasan itu ikut memublikasikan dan menyosialisasikan sidang-sidang yang digelar oleh MPR. "Dengan harapan, selain informasi sidang tersebar masif, masyarakat juga paham dan memahami tentang sidang-sidang yang diadakan oleh MPR", tegasnya.

Sidang MPR tahun ini, menurut Bu Titi, sangat spesifik sebab ada pelantikan Presiden hasil Pilpres 2024. Dalam sidang pelantikan presiden baru, biasanya masyarakat ingin datang dan melihat langsung acara itu di Gedung Nusantara, Komplek MPR/DPR/DPD Senayan, Jakarta.



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

Menghadapi antusiasme masyarakat tentu perlu tenaga ekstra untuk menjaga ketertiban sidang.

Demi ketertiban dan kelancaran sidang-sidang, terutama pelantikan presiden, ada proses pengamanan yang bertingkat. Untuk itu, bagi masyarakat yang tidak bisa

menyaksikan langsung sidang-sidang yang ada, diharap mereka jangan kecewa sebab dengan kemajuan teknologi informasi, MPR akan menyiarkan langsung sidang-sidang itu, baik lewat saluran televisi, live streaming, maupun saluran media sosial lainnya. "Dengan siaran langsung, seluruh rakyat

Indonesia bisa menyaksikan berbagai sidang tanpa perlu datang ke Senayan, Jakarta," tuturnya.

Untuk itu, Bu Titi mengajak semua jajaran kehumasan untuk ikut menyiarkan secara langsung kepada masyarakat. Dia menaruh harapan pada jajaran kehumasan, sebab kredibilitas mereka tidak perlu diragukan lagi. "Jangan sampai ada berita hoax dari pelaksanaan sidang-sidang MPR," tegasnya. Untuk itu Bu Titi berharap, jajaran Bakohumas untuk bersama menjaga informasi yang benar dan baik," tambahnya.

Anies Mayangsari dalam kesempatan yang sama menyebut, forum Bakohumas merupakan salah satu metode untuk menyebarkan informasi publik. "Cara ini merupakan sarana yang efektif sebagai sarana koordinasi, integrasi, dan sinergi, bagi seluruh insan kehumasan," paparnya. "Bakohumas merupakan wadah yang solid dalam penyebaran dan diseminasi informasi yang kredibel," tambahnya. □

## MPR RI Raih Posisi Runner Up

### Siti Fauziah: Penghargaan Luar Biasa dengan Predikat Baik



**M**AJELIS Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) sebagai lembaga negara meraih predikat Runner Up dalam Penerapan Sistem Merit dalam Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Tahun 2023.

Dari 17 lembaga negara yang dinilai oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), MPR RI memperoleh predikat Baik dalam Penerapan Sistem Merit dalam Pengisian JPT Tahun 2023, dengan meraih nilai 90,75.

Penghargaan itu disampaikan oleh

Komisioner Pengawasan Jabatan Pimpinan Tinggi KASN, Rudiarto Sumarwono, dan diterima langsung Plt. Sekretaris Jenderal MPR RI, Siti Fauziah, dalam suatu acara yang berlangsung di Ruang Rapat Sesjen MPR RI, Gedung Nusantara III, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (13/8/2024).

Beberapa pejabat teras Setjen MPR RI ikut menyaksikan penyerahan penghargaan berbentuk piagam tersebut. Mereka adalah Inspektur Maifrizar, Deputi Bidang Pengkajian dan Pemasarakatan Konstitusi Hendra Chyono, dan Kepala Biro SDM, Organisasi, dan Hukum, Dyastasita.

Mewakili KASN, Rudiarto menyampaikan ucapan selamat kepada MPR RI yang berhasil meraih posisi kedua tertinggi dari 17 lembaga negara. "Poinnya tipis sekali, hanya terpaut 0,25 untuk bisa mencapai predikat tertinggi. Saya yakin MPR RI ke depan akan bisa meraih predikat Sangat Baik," ujar Rudiarto.

Rudiarto menjelaskan, pemberian penghargaan tersebut menjadi salah satu upaya



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

KASN dalam mengawasi pelaksanaan sistem merit demi terwujudnya reformasi birokrasi. Pengisian JPT secara terbuka dan kompetitif merupakan bagian dari implementasi sistem merit pada aspek promosi dan mutasi.

“Aspek penilaian mencakup lima detail dimensi dalam pengisian JPT, yakni: Perencanaan, Pelaksanaan Pengisian, Pelaporan Pengisian, Inovasi Manajemen Pengisian dan Pelanggaran Pengisian JPT,” jelasnya.

Usai acara, Siti Fauziah yang biasa disapa Bu Titi, mengungkapkan kegembiraannya.

“MPR berhasil meraih penghargaan luar biasa dari KASN dengan predikat Baik. “Angkanya terpaut tipis sekali, hanya 0,25 untuk bisa mencapai predikat sangat baik. Tentu ini akan menjadi dorongan semangat untuk MPR agar ke depan mampu meraih predikat sangat baik itu,” katanya.

Bu Titi mengungkapkan, pada tahun 2023, Setjen MPR memang melakukan Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Tinggi Madya eselon I.b Deputy Bidang Administrasi dan Deputy Bidang Pengkajian dan Pemasarakatan Konstitusi. “Ternyata

semua itu mendapatkan perhatian dan dinilai oleh KASN,” kata Bu Titi.

Pada intinya, menurut Bu Titi, kita tidak mengetahui tentang penilaian tersebut. “Kami jalankan saja kegiatan tersebut dengan baik dan mematuhi segala aturan yang berlaku. Dan, *Alhamdulillah*, ternyata semua itu dipandang bagus oleh KASN dan diberikan predikat Baik dengan nilai 90,75, dan menempati posisi kedua tertinggi di antara lembaga negara lainnya,” terangnya.

Dalam kesempatan itu, Bu Titi berpesan kepada para pegawai di lingkungan Setjen MPR bahwa penghargaan tersebut bisa dijadikan penambah semangat untuk maju. Apalagi, sistem pemerintahan sekarang ini, terutama sistem pengisian jabatan, sudah melalui sistem merit, di mana kompetensi dari diri masing-masing pegawai itu akan dinilai dan penilaian itu benar-benar secara spesifik serta teliti.

“Jadi, saya mengajak seluruh pegawai, tingkatkanlah kompetensi diri kalian. Jangan malas dan tidak peduli dengan kegiatan-kegiatan peningkatan kompetensi diri, seperti diklat atau lainnya. Intinya, jika tidak mau meningkatkan kompetensi diri maka akan sangat sulit untuk bisa naik level. Artinya, sulit menduduki jabatan lebih tinggi, pada itu semestinya bisa dijangkau,” tandasnya. □



Sumbangan Buku untuk Perpustakaan MPR RI

# Ketua MPR RI Bamsoet Sumbangkan 38 Judul Buku Karyanya



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

**K**ETUA MPR RI ke-16 sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo menyumbangkan 38 judul buku dalam bahasa Indonesia dan Inggris hasil karyanya kepada Perpustakaan Sekretariat Jenderal MPR RI. Selain itu, Bamsoet juga akan memberikan 38 judul buku tersebut ke Perpustakaan Nasional, baik dalam bentuk cetak maupun *e-book*. Sumbangan buku tersebut diharapkan akan memperkaya koleksi buku yang dimiliki Perpustakaan Sekretariat Jenderal MPR dan Perpustakaan Nasional, serta menambah pengetahuan bagi pembacanya.

Bak kata perumpamaan ‘buku adalah jendela dunia,’ maknanya dengan membaca buku akan membuka dan memperluas wawasan seseorang. Karena buku merupakan sumber informasi untuk mengetahui berbagai kejadian, dan hal seperti ekonomi, sosial, politik, budaya, dan aspek kehidupan lainnya baik di dalam negeri maupun di berbagai belahan dunia,” ujar Bamsoet saat menyerahkan buku-buku hasil karyanya ke Perpustakaan Sekretariat Jenderal MPR RI di Jakarta, Sabtu (17/8/24).

Dalam kesempatan itu, juga hadir dan ikut menyumbangkan bukunya untuk Perpustakaan Setjen MPR adalah Wakil Ketua MPR dari Kelompok DPD RI, Fadel Muhammad, Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi

PPP, Amir Uskara. Sumbangan buku dari ketiga Pimpinan MPR itu diterima langsung oleh Plt. Sesjen MPR, Siti Fauziah, SE., MM.

Lebih lanjut Ketua DPR RI ke-20 dan Ketua Komisi III DPR RI ke-7 bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, dirinya memiliki hobi menulis sejak masih menjadi mahasiswa. Hingga saat ini setiap ada waktu senggang, selalu menyempatkan diri untuk menulis. Baik untuk artikel di media massa maupun untuk dijadikan buku. Termasuk merespons isu-isu aktual yang terjadi di tanah air setiap hari, kemudian dikirim ke media massa.

“Saya mempunyai prinsip ‘kalau kamu ingin hidup selamanya, maka menulislah’. Jadi, itulah yang saya lakukan agar saya tetap hidup. Minimal pikiran-pikiran saya dapat dibaca, dapat dipahami, dan dapat diketahui oleh generasi penerus yang akan datang,” kata Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila dan Wakil Ketua Umum FKPPi ini memaparkan, 38 judul buku yang disumbangkan ke Perpustakaan Sekretariat Jenderal MPR RI dan Perpustakaan Nasional, antara lain Skandal Bank Century Di Tikungan Terakhir Pemerintahan SBY-Boediono; 5 Kiat Praktis. Menjadi Pengusaha Nomor 1; Republik Komedi 1/2 Presiden; Dari Wartawan ke Senayan; Akal Sehat Bambang Soesatyo;

DPR Adem di Bawah Bamsoet; Tetap Waras Jangan “Ngeres”; Jurus 4 Pilar. Merangkul Milenial Menjaga Suhu Politik; Running the 4 Pillars. Embracing the milenials maintaining peacefull politics; dan Cegah Negara Tanpa Arah. Restorasi Haluan Negara Dalam Paradigma Pancasila, Reposisi Haluan Negara Sebagai Aspirasi Rakyat.

“Judul lain Hadapi Dengan Senyum. Catatan Ketua MPR RI Vaksinasi Covid-19 VS Vaksinasi Ideologi; Jawab Hoaks Amandemen. Negara Butuh Haluan; Bunga Rampai Opini Bambang Soesatyo 2007-2022 Jilid 1 hingga 5; Indonesia Era Disrupsi. Utak Atik Politik Negara di Era Disrupsi dan Pandemi; Vaksinasi Ideologi. Melawan Radikalisme dan Demoralisasi Bangsa; 60 Tahun Meniti Buih di Antara Karang; Solusi Jalan Tengah. Mengatasi Krisis Gagasan Menjawab Tantangan; Ngeri-Ngeri Sedap; Perang-Perangan Melawan Korupsi; Republik Galau; serta Konstitusi Butuh Pintu Darurat. Urgensi Memulihkan Wewenang Subjektif Superlatif MPR RI,” kata Bamsoet.

Ketua Dewan Pembina Depinas SOKSI (Ormas Pendiri Partai Golkar) dan Kepala Badan Polhukam KADIN Indonesia ini menambahkan, buku lainnya berjudul The Country Needs Direction; Haluan Negara Menuju Indonesia Emas 2045. Fokus Dan Orientasi Pokok-Pokok Haluan Negara; National Direction Towards Golden Indonesia 20245. Focus And Orientation Of The Basic Principles Of The State; Bambang Soesatyo News Maker. Satu Dasawarsa ‘The Politician’ Senayan; PPHN Tanpa Amandemen; PPHN Without Amendments; Mahasiswa dan Lingkaran Politik; Presiden Dalam Pusaran Politik Sengkuni; Skandal Gila Bank Century; Politik Hukum Dan Kebijakan Publik; Pembaharuan Hukum; 4 Pilar MPR RI Strategi Konsensus Kebangsaan Menyongsong Bonus Demografi dan Legacy MPR RI Periode 2029-2024 Pilar Demokrasi Dan Landasan Hukum Negara.

“Selain itu ada 15 judul buku yang dijadikan *e-book*. Antara lain, Skandal Century Di Tikungan Terakhir; Presiden Dalam Pusaran Politik Sengkuni; Bunga Rampai Opini Bambang Soesatyo 2007-2022 Jilid 1 sampai 5; Skandal Gila Bank Century; PPHN Without

## Sumbangan Buku dari Pimpinan MPR RI

# Siti Fauziah: Kami Bangga dan Akan Menjaga Buku Ini

USAI mengikuti Sidang Tahunan MPR Tahun 2024 dan Pidato Kebangsaan Presiden Joko Widodo yang digelar di Gedung Nusantara, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, siang harinya (16 Agustus 2024), Ketua MPR Dr. H. Bambang Soesatyo, SH., MBA., langsung menuju Lobi Nusantara IV, juga di Komplek Parlemen.

Dengan mengambil tempat di stan konferensi pers yang terletak di sisi kanan lobi Nusantara IV, Bamsuet bersama dua Wakil Ketua MPR RI: Dr. H.M. Amir Uskara, M.Kes., dan Prof. Dr. Ir. Fadel Muhammad, mengikuti acara serah terima buku dari Pimpinan MPR RI kepada Perpustakaan Sekretariat Jenderal MPR RI.

Disaksikan puluhan wartawan dari berbagai media cetak, elektronik, dan media online, Bamsuet menyerahkan sumbangan 38 judul buku karyanya kepada Perpustakaan Setjen MPR RI. Disusul kemudian, Amir Uskara dan Fadel Muhammad menyerahkan empat (4) judul buku karyanya masing-masing kepada Perpustakaan Setjen MPR RI.

Selain sumbangan buku dari tiga Pimpinan MPR RI itu, seorang Wakil Ketua MPR lainnya, yakni Lestari Moerdiyati yang tak hadir dalam acara itu, juga menyerahkan secara simbolis 12 judul buku karyanya. Sumbangan dari para Pimpinan MPR RI periode 2019-2024 itu diterima oleh Plt. Sesjen MPR RI, Siti Fauziah, SE., MM.

Dalam sambutannya, Siti Fauziah menyatakan, sangat bangga Pimpinan MPR mempercayakan bukunya kepada Perpustakaan MPR. Penyampaian sumbangan buku dari Pimpinan MPR, kata Bu Titi – sapaan Siti Fauziah— berlangsung pada moment yang sangat baik. Terlaksana “bertepatan dengan Sidang Tahunan MPR 2024, dan merupakan Sidang Tahunan terakhir bagi Pimpinan MPR periode 2019-2024.

“Jadi, momen yang diambil untuk menyerahkan sumbangan buku ini akan menjadi



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

kenangan terindah dari para Pimpinan MPR kepada Perpustakaan MPR,” kata Bu Titi.

Terhadap buku-buku sumbangan para pimpinan MPR RI itu, Bu Titi berjanji akan menjaganya. “Buku yang berbentuk cetak Kami simpan di perpustakaan, dan yang bentuk e-Book bisa diunduh oleh pengunjung perpustakaan dan juga oleh masyarakat lewat aplikasi yang dimiliki oleh Perpustakaan MPR,” paparnya.

Bu Siti yakin, buku karya Pimpinan MPR itu bermanfaat bagi generasi muda. Untuk itu, dia mengundang pelajar dari berbagai jenjang pendidikan dan masyarakat luas untuk datang ke Perpustakaan MPR. “Baca buku-buku karya Pimpinan MPR ini agar kita tahu pikiran, ide, dan gagasan mereka dalam membangun bangsa dan negara,” katanya.

Dalam kesempatan itu, perempuan asal Kota Bandung, Jawa Barat, ini meminta doa dan dukungan Pimpinan MPR untuk peningkatan akreditasi Perpustakaan MPR. “Perpustakaan MPR tengah berproses menuju perpustakaan yang berakreditasi, mudah-mudahan semua bisa berjalan lancar,” harapnya.

Di depan stan konferensi pers, tampak panjangan buku-buku karya Pimpinan MPR.

Buku karya Bambang Soesatyo, di antaranya berjudul: Skandal Bank Century Di Tikungan Terakhir Pemerintahan SBY-Boediono; 5 Kiat Praktis Menjadi Pengusaha Nomor 1; Republik Komed 1/2 Presiden; Dari Wartawan ke Senayan; Akal Sehat Bambang Soesatyo; DPR Adem di Bawah Bamsuet; Tetap Waras Jangan “Ngeres.”; dan Jurus 4 Pilar Merangkul Milenial Menjaga Suhu Politik.

Sedang buku-buku karya Lestari Moerdiyati, antara lain: Membedah Persoalan Bangsa; Labirin RUU PKS; Deteksi Dini Selamatkan Nyawa; Proaksi Lebih Diperlukan; Sama Sama Tegak Berdiri Berhadapan Dengan Ketidakpastian; Merawat Kebudayaan, dan Kesadaran Berbenah.

Sedang buku karya Amir Uskara berjudul: Ayo Membangun Desa, Mengelola Dana Desa Untuk Kesejahteraan Rakyat; UMKM Adalah Kunci; Pandemi COVID-19, Tragedi Lingkungan Dan Kemanusiaan; dan Transformasi Ekonomi Indonesia. Lalu, buku karya Fadel Muhammad, yakni: Fadel, Gorontalo dan Sulawesi, Sang Entrepreneur, Reinventing Local Government, Pengalaman Dari Daerah, dan Keliling Kampus Dunia. □

Rapat Gabungan MPR RI

Sepakati Perlunya Dibentuk Majelis Kehormatan MPR



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

**K**ETUA MPR RI ke-16 Bambang Soesatyo menuturkan, rapat gabungan(Ragab) Pimpinan MPR RI dengan pimpinan fraksi MPR dan kelompok DPD memutuskan, MPR RI akan menggelar Sidang Akhir Masa Jabatan MPR periode 2019-2024 yang akan diikuti seluruh anggota MPR dari unsur DPR dan DPD pada

25 September 2024.

Ragab juga memutuskan, akan dilaksanakan pembekalan anggota MPR periode 2024-2029 pada tanggal 28 dan 29 September 2024. Tujuan dilakukan pembekalan agar anggota MPR periode 2024-2029, khususnya yang baru terpilih, dapat mengetahui fungsi, wewenang, dan tugas MPR, serta agenda

sidang awal masa jabatan.

Selain itu, jelas Bamsoet, Ragab juga menyepakati rencana perlunya dibentuk Majelis Kehormatan MPR. Tapi, berkenaan pembentukan Majelis Kehormatan MPR ini apakah dalam periode ini atau MPR periode mendatang. Mengenai hal ini, kata Bamsoet, akan diputuskan dalam Sidang Akhir Masa Jabatan MPR periode 2019-2024.

“Pembentukan Majelis Kehormatan MPR ini sangat penting agar tidak terjadi kembali kriminalisasi atau pembunuhan karakter kepada pimpinan MPR, serta anggota MPR, ketika menjalankan tugas dan kewenangannya sebagai anggota MPR,” ujar Bamsoet usai memimpin Ragab Pimpinan MPR dengan Pimpinan Fraksi MPR dan Kelompok DPD secara daring dari Jakarta, Jumat (23/8/24).

Wakil Ketua MPR yang hadir dalam Ragab itu, antara lain Ahmad Basarah, Lestari Moerdijat, Hidayat Nur Wahid, Amir Uskara, Fadel Muhammad, dan Syarif Hasan. Sementara pimpinan fraksi/kelompok DPD hadir TB. Hasanuddin (Fraksi PDI





FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

Perjuangan), Ferdiansyah dan Mujib Rohmat (Fraksi Partai Golkar), Taufik Basari (Fraksi Nasdem), Neng Eem Marhamah Zulfah (Fraksi PKB), Aliyah Mustika Ilham (Fraksi Demokrat), Tifatul Sembiring dan Johan Rosihan (Fraksi PKS), Muhammad Iqbal (Fraksi PPP), M. Syukur dan Ajbar (Kelompok DPD).

Ketua DPR RI ke-20 dan Ketua Komisi III DPR RI ke-7 bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, MPR RI perlu memiliki Majelis Kehormatan MPR sendiri. Karena, sekalipun MPR terdiri dari anggota DPR dan DPD, namun MPR memiliki

kewenangan, fungsi dan tugas yang berbeda dengan DPR dan DPD.

Saat ini, DPR telah memiliki Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) dan DPD memiliki Badan Kehormatan. Sehingga, apabila ada pengaduan terkait dengan kewenangan, fungsi dan tugas sebagai anggota MPR, harus diselesaikan oleh Majelis Kehormatan MPR. Bukan oleh lembaga lain, baik MKD DPR atau Badan Kehormatan DPR.

“Cukup saya yang menjadi korban salah sasaran dari MKD DPR yang menyatakan, saya melanggar etik beberapa waktu lalu. Karena MKD DPR seharusnya tidak

memiliki wewenang mengadili saya dalam tugas-tugas saya sebagai pimpinan MPR. Jangan sampai preseden buruk ini juga menimpa pimpinan atau anggota MPR lain saat menjalankan fungsi dan tugasnya sebagai anggota MPR ke depan,” tegas Bamsuet.

Ketua Dewan Pembina Depinas SOKSI (Ormas Pendiri Partai Golkar) dan Kepala Badan Polhukam KADIN Indonesia ini menambahkan, Ragab juga membahas beberapa rekomendasi yang akan diberikan MPR RI periode sekarang kepada MPR RI periode 2024-2029. Antara lain, tentang draf Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN), pembudayaan Empat Pilar MPR, usulan amendemen UUD NRI Tahun 1945, serta penataan kelembagaan MPR RI.

“Perubahan tata tertib MPR turut menjadi pembahasan Ragab. Badan Pengkajian MPR telah menyusun materi perubahan Tata Tertib MPR yang terdiri atas 15 bab dan 174 pasal, baik bersifat substantif maupun redaksional. Perubahan tata tertib akan difinalkan rumusannya oleh tim perumus yang diketuai oleh Ketua Badan Pengkajian MPR, beranggotakan dari para anggota Badan Pengkajian MPR yang merepresentasikan keterwakilan fraksi/kelompok,” pungkas Bamsuet. □



## Ragab Pimpinan MPR

# Fadel Muhammad: Akan Berikan Legacy Terbaik untuk Bangsa



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

**W**AKIL Ketua MPR RI, Prof. Dr. Ir. Fadel Muhammad, mengungkapkan bahwa masa pengabdian MPR Periode 2019-2024 akan berakhir pada akhir bulan September 2024 mendatang.

Dalam perjalanannya selama rentang waktu lima tahun, lanjut Pimpinan MPR dari Kelompok DPD RI ini, MPR periode 2019-2024 telah melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya sesuai dengan yang diamanatkan Undang-Undang.

“Di akhir masa jabatan ini, kami tentunya ingin memberikan legacy terbaik serta berdampak baik untuk negara dan bangsa,” ujar Fadel Muhammad, usai mengikuti Rapat Gabungan (Ragab) Pimpinan MPR dengan Pimpinan Fraksi dan Kelompok DPD MPR RI, di Legian, Kabupaten Badung, Bali, Jumat (23/8/2024).

Untuk itu, lanjut Fadel Muhammad, MPR periode 2019-2024 telah menyiapkan rancangan rekomendasi untuk MPR periode selanjutnya, antara lain draf Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN), draf RUU MPR dan kajian mendalam tentang UUD NRI Tahun 1945.

“Terkait PPHN, menurut kami, sangat

penting, sehingga dengan PPHN negara ini memiliki arah rencana pembangunan nasional yang terfokus, terstruktur dari pusat ke daerah, sehingga pembangunan akan merata. PPHN ini sudah melalui kajian mendalam di MPR dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat,” terangnya.

Anggota DPD Dapil Provinsi Gorontalo ini menegaskan, rancangan Rekomendasi MPR periode 2019-2024 ini juga bertujuan agar masyarakat Indonesia mengetahui dan memahami kerja-kerja yang dilakukan MPR selama ini.

“Dari respon publik di berbagai daerah yang saya tangkap, MPR periode ini—yang dipimpin Ketua Bambang Soesatyo—dinamikanya sangat tinggi. Mendapatkan perhatian positif dari publik, sehingga menaikkan nama lembaga MPR. Itu sangat baik. Maka itu harus dijaga dan ditingkatkan oleh MPR periode selanjutnya,” kata Fadel Muhammad.

Gelar Ragab sendiri berlangsung lancar, membahas dan memutuskan beberapa hal, di antaranya MPR akan menggelar Sidang Akhir Masa Jabatan MPR periode 2019-2024 yang akan diikuti seluruh anggota MPR dari unsur DPR dan DPD.

Ragab juga memutuskan, akan dilaksanakan pembekalan anggota MPR periode 2024-2029. Tujuan pembekalan agar anggota MPR, khususnya yang baru terpilih, dapat mengetahui fungsi, wewenang, dan tugas MPR, serta agenda sidang awal masa jabatan.

Hadir dalam Ragab, pemimpin rapat Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (hadir secara online dari Jakarta), para Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah, Lestari Moerdijat, Hidayat Nur Wahid, Amir Uskara, Fadel Muhammad dan (juga hadir via zoom) Sjarifuddin Hasan.

Sedangkan Pimpinan Fraksi/kelompok DPD, hadir antara lain TB Hasanuddin (Fraksi PDI Perjuangan), Ferdiansyah dan Mujib Rohmat (Fraksi Partai Golkar), Taufik Basari (Fraksi Nasdem), Neng Eem Marhamah Zulfah (Fraksi PKB), Aliyah Mustika Ilham (Fraksi Demokrat), Tifatul Sembiring dan Johan Rosihan (Fraksi PKS), Muhammad Iqbal (Fraksi PPP), M. Syukur dan Ajar (Kelompok DPD).

Dari Sekretariat Jenderal MPR turut hadir, Plt. Sekretaris Jenderal MPR Siti Fauziah, Deputi Pengkajian dan Pemasyarakatan Konstitusi Hentoro Cahyono, dan beberapa pejabat eselon II. □

## Ragab Pimpinan MPR

# Amir Uskara: Pembentukan Badan Kehormatan MPR Jadi Kebutuhan

**W**AKIL Ketua MPR RI Dr. HM. Amir Uskara, M.Kes., mendorong percepatan pembentukan Badan Kehormatan (BK) MPR RI. Sebab, eksistensi BK MPR sudah menjadi satu kebutuhan yang semestinya ada dan menjadi satu badan tetap di lembaga tinggi negara seperti MPR RI.

“Keberadaan BK MPR ini sudah masuk kategori urgen, sebab jangan sampai terjadi lagi kasus Ketua MPR diperiksa Mahkamah Kehormatan Dewan DPR, padahal posisinya sedang menjalankan tugas sebagai Pimpinan MPR. Karena MPR tidak punya BK, sehingga ditarik MKD DPR. Dan ini menjadi masalah,” ujarnya.

Hal tersebut diungkapkan Pimpinan MPR dari PPP ini, di sela-sela mengikuti kegiatan Rapat Gabungan (Ragab) Pimpinan MPR dengan Pimpinan Fraksi/Kelompok DPD MPR, di Legian, Bali, Jumat (23/8/2024).

Lagipula, lanjut Waketum DPP PPP ini, kode etik terkait anggota MPR itu sudah ada dan sanksi penyalahgunaan atau pelanggaran kode etik pun sudah ada. Hanya saja, tidak ada lembaga atau badan dan SDM yang menjaga serta memeriksa pelanggaran kode etik itu.

Kalau memang disepakati, maka BK MPR



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

akan langsung dibentuk dan masuk di Tata Tertib (Tatib) MPR, menjadi satu badan yang ada di MPR.

“Sekarang, menurut saya, kita sepakati dulu untuk membentuk badannya, dan MPR periode selanjutnya lah yang akan mengisi

posisi dan formasinya. Dan, Alhamdulillah, di Ragab ini telah disepakati membentuk tim kecil guna pembentukan BK MPR yang akan dimasukkan dalam Tatib MPR, untuk kemudian disahkan menjadi sebuah badan baru,” tandasnya. □





FOTO-FOTO: ISTIMEWA

**Dr. Saleh Partaonan Daulay**, Anggota MPR Fraksi PAN

## Kontroversi Alat Kontrasepsi Gratis Kepada Siswa dan Remaja

**P**ENYEDIAAN alat kontrasepsi bagi siswa dan remaja memicu pro-kontra sejumlah kalangan. Pokok persoalannya adalah Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2024 sebagai turunan dari Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Dalam Peraturan Pemerintah itu, khususnya pasal 103 menyebut soal upaya kesehatan sistem reproduksi anak sekolah (pelajar atau siswa). Anak usia sekolah dan remaja diwajibkan mendapat edukasi kesehatan reproduksi mulai dari mengetahui sistem, fungsi, hingga proses reproduksi. Selain itu, anak usia sekolah dan remaja juga mendapatkan edukasi mengenai perilaku seksual berisiko serta akibatnya.

Tidak hanya itu, anak usia sekolah dan remaja dinilai penting untuk mengetahui keluarga berencana sampai kemampuan melindungi diri dari tindakan hubungan seksual atau mampu menolak ajak tersebut. "Pemberian komunikasi, informasi,

dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan melalui bahan ajar atau kegiatan belajar mengajar di sekolah dan kegiatan lain di luar sekolah," begitu bunyi PP yang diteken Presiden Joko Widodo pada Jumat, 26 Juli 2024.

Sampai di situ tidak ada persoalan. Kontroversi muncul dalam ayat berikutnya, yaitu pasal 103 ayat 4 menyebutkan, pelayanan kesehatan reproduksi bagi siswa dan remaja paling sedikit terdiri dari deteksi dini penyakit dan skrining, pengobatan, rehabilitasi, konseling, dan penyediaan alat kontrasepsi. Poin no 4 (penyediaan alat kontrasepsi secara gratis) ini menjadi bermasalah karena dimaknai membolehkan siswa dan remaja melakukan hubungan seksual atau seks bebas dengan alat kontrasepsi.

Kementerian Kesehatan menepis anggapan bahwa pemerintah akan membagikan kondom atau alat kontrasepsi kepada siswa dan remaja. Kementerian Kesehatan

mengklarifikasi bahwa pelayanan kesehatan (penyediaan alat kontrasepsi gratis) tidak untuk semua siswa atau remaja, melainkan khusus bagi mereka yang menikah usia dini. "Ditujukan untuk remaja yang sudah menikah dan akan menunda kehamilan sampai usia aman untuk kehamilan," kata Siti Nadia Tarmizi, juru bicara Kementerian Kesehatan.

Kontroversi sudah bergulir di masyarakat. Untuk mengetahui bagaimana tanggapan anggota dewan terhadap kontroversi ini, berikut penuturan **Dr. Saleh Partaonan Daulay**, anggota MPR Fraksi PAN yang juga anggota Komisi IX DPR RI yang membidangi masalah kesehatan. Petikannya.

Terjadi kontroversi dalam memaknai Peraturan Pemerintah tentang penyediaan alat kontrasepsi gratis bagi siswa atau remaja. Seperti tertuang dalam pasal 103 ayat 4 Peraturan

**Pemerintah tersebut ada klausul menyebutkan, pelayanan kesehatan reproduksi bagi siswa dan remaja, yaitu penyediaan alat kontrasepsi gratis. Bisa dijelaskan?**

Memang perlu dijelaskan dulu konstruksi dari UU tentang Kesehatan ini. Pertama, UU Kesehatan yang baru, yaitu UU No. 17 Tahun 2023 ini memiliki banyak pasal, karena UU tentang Kesehatan ini merupakan omnibus law, yang menggabungkan beberapa undang-undang terkait dengan kesehatan yang sekarang dijadikan satu dalam UU tentang Kesehatan.

Kedua, UU tentang Kesehatan yang dibahas DPR bersama pemerintah, begitu banyak amanat UU yang diberikan kepada pemerintah untuk membuat aturan turunan dalam bentuk peraturan pemerintah (PP). Dalam Peraturan Pemerintah ini ada 1.171 pasal dari 13 Bab. Salah satu di antaranya adalah pasal yang mengatur terkait dengan kesehatan reproduksi untuk siswa usia sekolah dan remaja. Pasal inilah yang menjadi perhatian banyak kalangan.

Kenapa? Semestinya PP yang baru dikeluarkan harus berbarengan dengan sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat luas sehingga tidak ada salah tafsir pada aturan yang dibuat dalam PP itu. Sebab, aturan dalam PP itu berada di wilayah atau ranah pemerintah. Sementara DPR sendiri tidak ikut serta dalam pembuatan aturan teknis ini. Termasuk soal penyediaan alat kontrasepsi seperti disebutkan dalam pasal 103 ayat 4.

Karena itu, kita mengimbau kepada pemerintah untuk segera menyosialisasikan PP ini. Sebab, sekarang sudah muncul perbedaan pandangan di kalangan masyarakat dan agak sedikit kontroversial karena pemerintah dianggap memberikan legitimasi dan legalisasi untuk pergaulan bebas atau seks bebas di kalangan siswa dan remaja kita.

**Apa tanggapan Bapak dengan munculnya kontroversi ini?**

Persoalannya ada pada sosialisasi PP itu yang kurang dan pada bunyi pasal itu. Sosialisasi PP yang kurang dari pemerintah menimbulkan salah tafsir dan salah pemaknaan atas pasal yang kontroversial itu. Karena itu, pemerintah harus menyosialisasikan PP ini secara benar.

Kedua, kalau seandainya benar bahwa pemberian alat kontrasepsi secara gratis kepada siswa dan remaja maka nanti dianggap ada upaya pemerintah untuk legalisasi pergaulan bebas atau seks bebas. Saya tidak yakin pemerintah berniat seperti itu. Tetapi, karena pasal itu perlu penjelasan dan kejelasan maka pemerintah harus melakukan upaya untuk sosialisasi PP ini.

Juru bicara Kementerian Kesehatan sudah berbicara terkait dengan pasal kontroversial ini bahwa penyediaan alat kontrasepsi secara gratis ini adalah untuk siswa atau remaja yang menikah dini. Tetapi, apakah penjelasan Kementerian Kesehatan sudah dimaknai secara utuh oleh masyarakat? Faktanya, pasal 103 ayat 4,

Pemerintah harus meluruskan kontroversi ini. Jangan sampai PP ini dimaknai secara salah oleh masyarakat kita. Atau, mungkin memang pasalnya yang salah. Kesalahan rumusan pasal ini perlu juga kita kritisi. Kalau rumusan pasalnya yang salah tentu kita harus perbaiki rumusan pasalnya. Artinya, pemerintah harus melakukan revisi terkait dengan pasal-pasal yang multitafsir seperti itu.

Memang, ketika saya pertama kali membaca rumusan pasal itu, kemudian ramai di media sosial, saya juga bertanya, mengapa bunyi pasalnya seperti itu. Setelah ada pernyataan dari juru bicara Kementerian Kesehatan bahwa yang dimaksud dalam pasal itu adalah penyediaan alat kontrasepsi gratis bagi siswa atau remaja yang sudah menikah dini.



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

khususnya penyediaan alat kontrasepsi gratis, malah ditafsirkan belum sempurna. Artinya, masih ada kesalahpahaman terhadap soal penyediaan alat kontrasepsi gratis ini di kalangan masyarakat, karena pemerintah dianggap mencoba memfasilitasi dengan menyediakan alat kontrasepsi. Dengan kata lain, boleh melakukan seks bebas asal tidak hamil di luar pernikahan.

Kalau hal itu yang terjadi maka kita akan mengkritisi pasal itu. Pasal itu harus diubah agar jangan sampai ada arah ke legalisasi terhadap pergaulan atau hubungan bebas di masyarakat kita. Padahal salah satu yang kita kampanyekan adalah larangan pergaulan bebas.

**Jadi, dimana letak kesalahannya? Apakah hal ini disebabkan karena rumusan kalimat dalam pasal tersebut?**

Pertanyaannya, apakah masyarakat yang membaca pasal itu sama seperti makna yang dimaksud oleh Kementerian Kesehatan (pemerintah)? Jika belum ada kesamaan maka perlu sosialisasi lebih luas, atau pemerintah kalau perlu harus merevisi bagaimana rumusan kalimat dalam pasal itu agar sesuai dengan apa yang dimaksudkan.

Bagi kami di DPR, paling penting adalah bagaimana memberikan pendidikan dan edukasi terkait dengan kesehatan reproduksi. Di negara-negara maju, pendidikan dan edukasi kesehatan reproduksi ini selalu diberikan kepada para siswa dan remaja. Tetapi, dengan adat ketimuran kita bahwa banyak hal yang dilarang dan tabu, jadi kita tidak boleh permisif. Kita menghormati kesakralan dan kesucian dari hubungan pernikahan yang sah. □



# Peraih Medali Perunggu di Olimpiade *Paris 2024*



## *Gregoria Mariska*

**G**REGORIA Mariska Tunjung Cahyaningsih atau biasa dipanggil Jorji, adalah atlet putri Indonesia yang berhasil menyumbang medali perunggu — satunya medali untuk cabang olahraga bulutangkis, di ajang Olimpiade Paris 2024. Sementara dua medali emas dipersembahkan atlet panjat tebing Veddriq Leonardo, dan atlet angkat besi Rizki Juniansyah.

Medali perunggu dioleh Jorji lewat diperoleh melalui cara yang cukup dramatik. Jadi, atlet kelahiran 11 Agustus 1999 itu siap-siap bertanding memperutkan juara ketiga, tiba-tiba calon lawannya, Caro-

lina Marin dari Spanyol, dinyatakan tak bisa bertanding karena cedera lutut. Maka, berdasarkan keputusan juri, Jorji ditetapkan sebagai juara ketiga tanpa bertanding.

“Terima kasih atas dukungan seluruh rakyat Indonesia. Medali ini dan juga bonus yang saya dapatkan merupakan kemenangan buat Indonesia,” ujar Jorji mengungkapkan rasa kegembiraannya. Dia berjanji, setelah ini akan lebih berkonsentrasi lagi pada laga-laga tingkat dunia selanjutnya,” ujar Jorji, usai menerima bonus dari Presiden di Istana Negara, Jakarta, 15 Agustus 2024. □

DER

# Spiderman Indonesia Boyong Medali Emas

**V**EDDRIQ Leonardo, atlet panjat tebing Indonesia, layak dijuluki 'Spiderman Indonesia.' Soalnya, dia berhasil memboyong medali emas pertama untuk Indonesia di Olimpiade Paris 2024. Medali emas untuk atlet kelahiran Pontianak, Kalimantan Barat, 11 Maret 1997, ini diraihinya setelah mengalahkan atlet panjat tebing Cina, Wu Peng, di Leguet Climbing Venue, Paris, Prancis, Kamis (8/8/2024). Dalam laga itu, Veddriq, mencatat waktu 4,75 detik, sedangkan Wu 4,77 detik.

"Yang membuat saya bangga adalah Lagu Indonesia Raya berkumandang di Olimpiade 2024 Paris. Itu kebanggaan tak terkira buat saya," ucap Veddriq, usai mengikuti Peringatan HUT ke-79 RI di Istana Negara, Ibu Kota Nusantara, Sabtu (17/8/2024). Selain dia, atlet Indonesia yang juga meraih medali emas di Olimpiade Paris 2024 adalah Rizki Juniansyah untuk cabang angkat besi.

"Saya sangat bangga, dan terima kasih dukungan masyarakat Indonesia kepada saya sebagai atlet panjat tebing yang terbilang baru di Olimpiade. Dan, medali emas ini saya persembahkan di momen yang tepat di HUT RI Ke-79," ujar Veddriq. □

DER



*Veddriq Leonardo*



*Mulan Jameela*

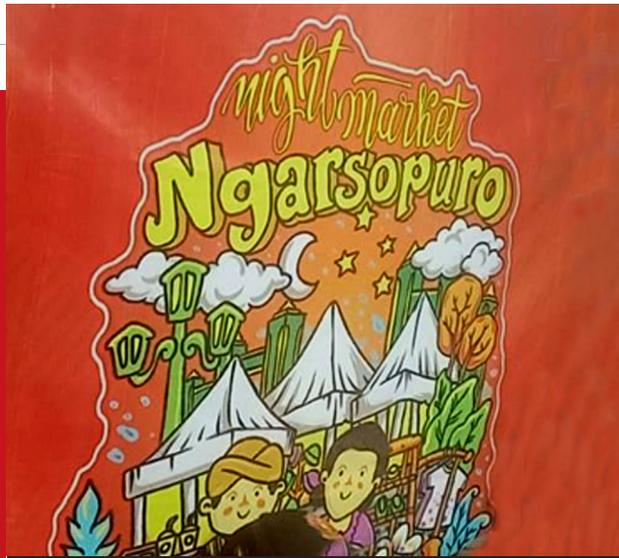
## Hibur Para Veteran Pejuang Wanita 45

**A**RTIS dan politisi **Mulan Jameela** hadir menghibur para wanita pejuang yang tergabung dalam Perkumpulan Wanita Pejuang (PWP) '45, di Gedung Nusantara IV, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (6/8/2024). Mengenakan busana kebaya merah, selendang marun, dipadu hijab hitam, dan bawahan kain batik, dia menghampiri para anggota PWP 45 dan menyanyi bersama.

Tentu saja kehadiran artis kelahiran Garut, 23 Agustus 1979, di tengah para perempuan pejuang itu cukup menyita perhatian. Apalagi, kehadirannya secara tiba-tiba. Muncul dari arah belakang, sambil berjalan ke arah depan, istri musisi Ahmad Dani ini melantunkan lagu-lagu andalannya, yaitu 'Wonder Woman.' Lalu, dilanjutkan lagu 'Bukannya Aku Takut,' dan 'Indonesia Jaya.'

"Bangga sekali berada di tengah perempuan pejuang tangguh yang dipimpin Ibu Melani Leimena. Luar biasa, semoga perempuan-perempuan Indonesia saat ini dan di masa depan akan mengikuti jejak semangat para Wanita Pejuang '45 ini," ujar anggota DPR/MPR RI Fraksi Partai Gerindra tersebut. □

DER



## Pasar Malam Ngarsopuro Cuan Sampingan Bagi yang Kreatif

LAMPU penerangan jalan mulai menyala, menggantikan sinar matahari yang semakin redup dan tenggelam, masuk ke pelukan malam. Semilir angin yang sebelumnya berselimut hawa panas, lambat laun berubah menjadi semakin sejuk. Ketika senja perlahan berganti malam, pada saat itulah ratusan pedagang di Pasar Malam Ngarsopura Surakarta bergegas menyiapkan barang-barang dagangannya.

Hanya dalam sekejap, sepanjang Jalan Diponegoro hingga gerbang Mangkunegaran sudah dipenuhi beraneka komoditas dari para pengusaha Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Solo. Mulai dari berbagai jenis serta corak pakaian, makanan, snack, sepatu dan sandal, topi, hingga pengharum ruangan. Para pedagang pun bersegera menyiapkan tenannya masing-masing dan siap menyambut pengunjung yang mulai berdatangan.

Suasana lain tampak di jalan Gatot Subroto, para pedagang pernik-pernik dan hiasan tak kalah gesitnya. Di sini terdapat puluhan penjaja jasa pembuatan tato, hingga nailis (penghias kuku). Ada juga pedagang kalung, gelang, bando hingga gantungan

kunci. Pokoknya, segala macam aksesoris diperdagangkan di sini.

Masih di jalan Gatot Subroto, juga bisa ditemukan beberapa pedagang yang menyediakan barang-barang kuno (antik) yang sudah ketinggalan zaman, tapi masih tetap dicari. Seperti jam tangan tempo dulu, kaset pita, tape recorder, mesin ketik, hingga



radio transistor generasi pertama. Di tempat ini juga ada mobil-mobilan bekas, majalah, koran hingga tabloid yang sudah termakan zaman.

Begitulah sebagian pemandangan Pasar Malam Ngarsopura Surakarta, yang bisa Majalah *Majelis* sajikan pada kesempatan ini. Di luar itu masih banyak cerita lain yang

belum sempat kami tampilkan. Seperti aneka kue dan makanan tradisional yang juga diperdagangkan di tempat ini. Juga kisah para tukang parkir yang kerepotan mengurus ribuan sepeda motor milik pengunjung.

Tidak semua penjaja dagangan di lokasi ini berprofesi sebagai pedagang beneran. Sebagian dari mereka itu adalah para kolektor, yang sengaja menyimpan koleksinya untuk diperjualbelikan pada saat tertentu saja. Satu di antaranya adalah kolektor uang lama.

Yang tak kalah asyik sembari menikmati suasana senja hingga malam di Pasar Ngadipura, adalah hadirnya beberapa seniman jalanan dengan genre musik yang berbeda-beda. Ada yang solois dengan keyboard dan lagu-lagu barat, ada pula musik grup yang terus membawakan lagu-lagu Iwan Fals, dan juga lagu-lagu Jawa, hingga yang paling tradisional adalah gendingan.

Yang pasti, kami merasa cukup beruntung bisa menikmati suasana di Pasar Malam Ngarsopura Surakarta menggunakan delman. Sang pengemudi delman bernama Kelik (37), dengan sabar mengantar kami menyusuri malam di Ngarsopuro. Dia berputar ke arah jalan Slamet Riyadi



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

kemudian menyusuri jalan Gatot Subroto untuk kemudian kembali ke perempatan Jalan Slamet Riyadi, yang di pojok jalan itu terdapat resto makanan cepat saji berupa ayam goreng.

Dengan sabar pula Kelik menjawab setiap pertanyaan yang kami ajukan, mulai dari pengalamannya bekerja sebagai sais delman, misalnya sejak kapan menarik delman di Pasar Malam Ngarsopura Suarakarta hingga suka dukanya menjadi penarik delman. Alhasil, uang Rp 50.000 mesti dikeluarkan untuk membayar jasa buat Kelik yang dengan sabar mengantar kami berkeliling, terasa cukup murah.

Jika punya cukup waktu, Anda bisa terus menikmati suasana malam di Pasar Malam Ngarsopura dengan berbagai pilihan. Anda bisa nongrong berlama-lama sembari minum kopi di sejumlah kedai kopi yang berjualan di sana. Atau sambil menikmati berbagai kudapan yang dijual dengan harga sangat bersahabat. Bisa juga hanya sekedar menyusuri jalan dari ujung Makunegaran

hingga akhir jalan Gatot Subroto, agar bisa lebih dekat bercengkerama dengan Kota Solo.

### Destinasi Wisata

Sejak pertama kali dibuka pada 2009, Pasar Malam Ngarsopura Surakarta mengalami banyak perkembangan. Salah satunya adalah menjadi kawasan wisata, baik bagi para pelancong lokal maupun mancanegara. Kehadiran pelancong di area Pasar Malam Ngarsopura Surakarta relatif mencolok. Rata-rata para pelancong itu datang dengan rombongannya. Sementara pengunjung setempat kebanyakan hadir secara sendiri-sendiri, ataupun hanya bersama anggota keluarganya.

Hadirnya Pasar Malam Ngarsopura juga membuat kehidupan malam di Kota Solo menjadi semakin meriah. Selama dua hari dalam satu minggu, Jumat dan Sabtu, pasar ini beroperasi sebagaimana mestinya. Even ini tidak hanya mencerminkan semangat masyarakat untuk terus memutar roda

perekonomian, tetapi juga bukti dukungan Pemkot Solo terhadap kesejahteraan UMKM.

Marni misalnya, salah seorang pengusaha makanan di situ merasa terbantu dengan adanya Pasar Malam Ngarsopura. Dengan adanya even tersebut maka peluang dirinya dalam mencari nafkah dengan cara berdagang menjadi bertambah, demikian pula penghasilannya.

Menurut Marni, menjajakan dagangan di Pasar Malam Ngarsopura memiliki prospek yang cukup baik, apalagi saat musim libur. Karena, pada musim libur pasar tersebut lebih ramai dari hari biasa. Datangnya musim libur juga membuat jumlah pelancong yang mampir menjadi lebih banyak.

“Setiap kali musim libur penghasilan kami, para pedagang, bisa berlipat-lipat dibanding hari biasa. Itu buktinya bahwa para pengunjung banyak membelanjakan uangnya di pasar ini. Dan, itu sangat menguntungkan bagi pengusaha kecil seperti saya,” ungkap Marni. □

MBO

## Kolaborasi DPD dan Pemda, Sinergi yang Baik

**S**EJAK era sistem pemerintahan modern banyak paradigma/pemikiran tentang bagaimana membentuk sistem pemerintahan/birokrasi yang baik. Pada era tersebut, lahir paradigma Old Public Administration (OPA) yang diperkenalkan Woodrow Wilson dalam satu tulisan pada tahun 1887. Berdasarkan paradigma OPA, model birokrasi pemerintahan cenderung mengutamakan sistem dan prosedur sehingga sangat birokratis. OPA diterapkan oleh Wilson saat menjadi Presiden AS pada 1913-1921.

Karakteristik OPA, antara lain: (1). Fokus utama pada penyediaan pelayanan publik melalui organisasi badan resmi pemerintah; (2). Kebijakan publik dan administrasi negara sifatnya politik; (3). Pelayanan publik harus diselenggarakan oleh administrator yang bertanggung jawab kepada pejabat publik (*elected officials*) dan dengan diskresi terbatas; (4). Administrator bertanggung jawab kepada pimpinan pejabat politik (*elected political leaders*) yang telah terpilih secara demokratis; (5). Program-program publik dilaksanakan melalui organisasi yang hirarkis dengan kontrol yang ketat oleh pimpinan organisasi.

Terdapat banyak kritik terhadap OPA sehingga pada tahun-tahun berikutnya memunculkan berbagai pemikiran/paradigma baru: 1900-1926 - Paradigma dikotomi politik dan administrasi (J. Goodnow dan Leonard D. White); 1927-1937 - Paradigma Prinsip-Prinsip Administrasi (Willoughby, Gullick, & Urwick); 1950-1970 - Paradigma Administrasi Negara sebagai Ilmu Politik (Morstein-Marx); 1956-1970 - Paradigma Administrasi Negara sebagai Ilmu Administrasi; dan 1970-Sekarang – Paradigma Administrasi Publik sebagai Administrasi Publik.

Kemudian pada era 1990-an lahir paradigma *New Public Management* (NPM) - Christopher Hood (1991). Di AS, NPM dikenal juga sebagai *Reinventing Government* yang diperkenalkan oleh D. Osborne dan T. Gaebler (1993). Paradigma *New Public Management* dan *Reinventing Government* muncul akibat dari ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintah.

Prinsip-prinsip paradigma NPM: Administrasi publik berorientasi pada kinerja atau hasil kerja; Pemerintahan dianjurkan melepaskan diri dari sistem birokrasi klasik dan mendorong organisasi dan pegawai agar lebih fleksibel; Menetapkan tujuan serta target organisasi secara lebih jelas sehingga mudah diukur; dan Pemerintah melakukan desentralisasi, memberi perhatian pada pasar, melibatkan swasta dan melakukan privatisasi (Hood, 1995).

Berdasarkan NPM inilah lahir UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dengan tujuan untuk: Menjalankan prinsip-prinsip demokrasi; Meningkatkan peran serta masyarakat;

Pemerataan dan keadilan; Serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah melalui pemberian kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah secara proporsional.

Pada awal 2000-an Provinsi Gorontalo menjadi satu-satunya provinsi yang mengadopsi NPM dengan mengembangkannya menjadi konsep *Reinventing Local Government* (RLG). RLG memiliki 8 agenda: (1). *Leadership*. Pemimpin yang memiliki visi yang jelas akan mendorong pengikutnya berlomba-lomba mewujudkan visi tersebut melalui daya kreatif dan daya inovasi. (2). Budaya yang ditumbuhkan pada organisasi publik. (3). Insentif untuk memotivasi melakukan inovasi. (4). Kapasitas manajemen harus ditingkatkan baik menyangkut orang maupun sistem. (5). Meningkatkan perspektif konsumen atau rakyat yang dilayani, dalam arti antara pemerintah dan rakyat ada saluran aktif untuk berkomunikasi. (6). Melakukan kolaborasi antarinstansi atau tingkat otoritas yang berbeda. (7). Mendorong eksperimen lokal, dalam arti dibutuhkan eksperimen-eksperimen di tingkat daerah untuk melahirkan inovasi-inovasi. (8). Meningkatkan investasi yang dibutuhkan untuk melakukan terobosan-terobosan.

Sekitar tahun 2003 J. V. Denhardt dan R. B. Denhardt memperkenalkan paradigma baru, *New Public Service* (NPS). Paradigma ini berpijak pada teori demokrasi yang mengajarkan adanya egaliter dan persamaan hak di antara warga negara. Birokrasi yang memberikan pelayanan publik harus bertanggung jawab kepada masyarakat secara keseluruhan dengan penekanan pada kepentingan masyarakat.

Dengan tantangan-tantangan yang baru, lahirlah konsep *Local Collaborative Governance* (LCG) yang digagas oleh Ansell dan Gash (2007). Ansell dan Gash (2007) menyebutkan, *Local Collaborative Governance* adalah bentuk *governance* yang melibatkan berbagai *stakeholders* (termasuk di dalamnya aparatur pemerintah) secara bersamaan dalam sebuah forum untuk membuat keputusan bersama.

Praktik LCG ini sesungguhnya tidak asing di Indonesia dan dilaksanakan di tingkat daerah, bahkan di tingkat pemerintahan terkecil seperti desa. Namun, saat diaplikasikan di tingkat lebih tinggi banyak hambatan yang dihadapi. Sebagai catatan, kita sudah sering mendengar bentuk kerja sama dalam sistem pemerintahan, seperti koordinasi dan kooperatif, namun kolaborasi sangat berbeda.

Secara etimologi, “collaborative” berasal dari kata “co” dan “labor” yang berarti penyatuan tenaga atau peningkatan kemampuan yang dimanfaatkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan atau yang telah disepakati bersama. Saat ini, kata “kolaborasi” sering digunakan untuk menjelaskan proses penyelesaian pekerjaan yang

Oleh:  
**Prof. Dr. Ir. Fadel Muhammad**  
Wakil Ketua MPR RI



bersifat lintas batas, lintas sektor, lintas hubungan, lintas organisasi, bahkan lintas negara.

Secara terminologi kolaborasi mendeskripsikan adanya situasi tentang terjadinya kerja sama antara dua orang atau lebih, atau dua institusi atau lebih, yang saling memahami permasalahan masing-masing secara bersama-sama dan berusaha untuk saling membantu memecahkan permasalahan masing-masing secara bersama-sama pula. Kolaborasi juga merupakan kerja sama yang intensif untuk menanggulangi permasalahan kedua pihak secara bersamaan.

Tantangan pemerintah daerah saat ini adalah mendorong terbentuknya praktik pemerintahan daerah yang modern yang menekankan pada aspek *Entrepreneurial Governance* yang memberi nuansa atau pengaruh pada praktik *Local Collaborative Governance* (LCG) yang dijalankan. Menurut kajian para ahli di dunia, LCG yang memiliki *spirit Entrepreneurial Governance* yang sudah dipraktikkan di beberapa negara bisa lebih menyejahterakan rakyat daerah. Paradigma baru LCG dapat menyelesaikan permasalahan lokal yang kompleks melalui pemberian layanan publik yang efisien.

Tantangan Masa Depan: (1). Pertumbuhan Ekonomi Lokal: Stabilitas ekonomi nasional mempengaruhi ekonomi lokal, Integrasi kebijakan pemerintah nasional dan daerah, Investasi infrastruktr daerah, Kualitas tenaga kerja daerah, Kondisi lingkungan bisnis daerah, Koneksi global dan daerah, Kondisi demografis: bonus demografi di daerah.

(2). Penurunan Kemiskinan Daerah: Peningkatan pendapatan sumber mata pencaharian, Pengembangan infrastruktur dan fasilitas daerah, Pemberdayaan masyarakat di daerah, Pengembangan sktor pertanian dan perikanan daerah, Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan daerah, Akses ke layanan sosial daerah, Peningkatan partisipasi perempuan daerah, Integrasi pasar global di daerah, Pariwisata local dan internasional.

(3). Kepemimpinan Lokal: Pengaruh budaya dan tradisi, Kemampuan komunikasi visi dan misi pemimpin lokal, Pengalaman dan Pendidikan pemimpin lokal, Kepemudaan dan energi, Kepribadian dan etika pemimpin lokal, Koneksi dan modal sosial pemimpin lokal, Kemampuan dalam tata Kelola (governance) organisasi, Kesetaraan dan keadilan keadaan sosial masyarakat daerah.

(4). Daya Saing SDM: Peningkatan kualitas Pendidikan & Kesehatan, Pengembangan sertifikasi dan program kemampuan, Pengembangan sumber daya pendidikan dan Kesehatan

Pengembangan program praktik dan kerja sama industri, Pengembangan kemampuan bahasa asing dan komunikasi, Peningkatan partisipasi perempuan, Pengembangan program pengkajian tinggi dan riset, Peningkatan kesejahteraan masyarakat.

(5). *Spirit Entrepreneurial Governance*: *Spirit Entrepreneurial Governance* bermanfaat untuk mengembangkan penilaian kritis atas perubahan pada lingkungan pemerintahan, Hubungan pertukaran antara pemerintah dan warga negara – konsumen – klien menempati tempat utama dalam *spirit Entrepreneurial Governance*, Memungkinkan dilakukannya reformasi radikal untuk menginjeksikan persaingan dan kontrol demokratis ke dalam organisasi publik.

(6). *Spirit Entrepreneurial Governance*: Inovasi dan inisiatif dalam organisasi, Kepemimpinan yang berdaya saing dan inovatif, Struktur organisasi yang fleksibel (*agile*), efektif, efisien, dan relevan, Komunikasi dan kolaborasi tim kerja dan organisasi, Pengambilan keputusan dan produktif, Pengelolaan risiko organisasi, SDM dengan *entrepreneurial spirit* yang mendukung kinerja organisasi.

Pada dasarnya *Local Collaborative Governance* untuk memecahkan permasalahan masyarakat lokal. Bagaimana melakukannya? *Local Collaborative Governance* adalah suatu sistem pemerintahan dan pengelolaan yang mengumpulkan saran, dukungan, dan pengaruh dari berbagai pihak di masyarakat lokal. Dalam konteks ini, pemerintah lokal bekerja sama dengan masyarakat, organisasi swasta, organisasi non-profit, akademisi, media, dan berbagai helix/aktor lainnya untuk mencapai tujuan bersama dalam pengelolaan sumber daya, pengembangan program dan kegiatan, dan memperbaiki kualitas hidup masyarakat.

Proses kerja sama ini mencakup komunikasi terbuka, partisipasi aktif, dan pengambilan keputusan berdasarkan konsensus atau kesepakatan yang diperoleh dari semua pihak yang terlibat. *Local Collaborative Governance* memiliki beberapa kelebihan, seperti meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan dan melaksanakan kegiatan yang relevan di daerah tersebut, kemudian memperbaiki hubungan antar-pihak, dan memperkuat komitmen dan tanggung jawab terhadap tujuan yang ditetapkan.

Peran DPD dalam Pemda Kolaboratif: Pendekatan terhadap pemerintah daerah dalam rangka kolaborasi juga harus dilakukan secara aktif oleh anggota DPD. Karena itu, anggota DPD dari provinsi setempat dengan didukung oleh komite-komite di DPD RI atau pimpinan DPD mendorong pemerintah daerah setempat membentuk forum-forum atau kegiatan kolaboratif.

Kolaborasi antara DPD dan Pemda dilakukan untuk mencapai sinergi yang baik dalam menjalankan fungsi dan tugas masing-masing. DPD dituntut aktif di daerah untuk menerima aspirasi masyarakat daerah dan memperjuangkan kepentingan daerah di tingkat pusat. □

## Bertahan dalam Gelombang Dera Gugatan dan Keraguan

Di buku yang ditulis oleh Willy Aditya menyebut, Pancasila mampu bertahan dalam gelombang dera gugatan dan keraguan terhadapnya hingga saat ini. Dasar negara ini pernah seperti pepatah “hidup segan mati tak mau.” Lewat Pancasila Di Rumahku, diharap menjadi sumbangsih bagi terus hidupnya diskursus Pancasila di Tanah Air.

**D**I TENGAH kesibukannya sebagai anggota MPR/DPR ditambah dipercaya oleh Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh sebagai juru bicara dalam berbagai peristiwa penting, Willy Aditya rupanya masih memiliki waktu menuangkan berbagai gagasan dan pikirannya dalam tulisan. Gerakan jari jemari di *keyboard* komputer dan laptop dalam kurun waktu tertentu itu akhirnya membuahkan buku.

Buku karya alumni Universitas Gadjah Mada itu bukan buku sembarangan. Ia mengupas masalah ideologi dan dasar negara. Buku setebal xxxiii + 116 halaman ini diberi judul: *Pancasila Di Rumahku*. Dengan cover didominasi warna kuning, isi bagian dalamnya terurai dalam enam bab. Sebelum pembaca menjelajahi pikiran pria kelahiran Solok, Sumatera Barat, itu kita disugahi pandangan Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat dan Pengajar FISIP Universitas Airlangga, Airlangga Pribadi Kusman (dalam pengantar, halaman xiii – xxxiii).

Lestari Moerdijat mengatakan, *Pancasila Di Rumahku* sebagai gagasan yang dicetuskan oleh Willy Aditya, seorang yang saya kenal sebagai politisi sekaligus aktivis, merupakan kelanjutan tradisi politik gagasan sekaligus wujud komitmen kebangsaan. *Pancasila Di Rumahku* adalah sebuah cara baru yang ditawarkan dalam menghidupkan Pancasila sebagai *real way of life* bangsa Indonesia.

Lebih lanjut dikatakan oleh Politikus Nasdem itu, Willy Aditya menggagas cara yang sederhana tentang esensi Pancasila. Gagasannya untuk mengembalikan Pancasila sebagai panduan hidup berbangsa ke dalam ruang sosial kita adalah inisiatif yang perlu diapresiasi dan didukung menjadi proyek kebangsaan.

Airlangga di bab yang sama, pengantar buku, menuturkan *Pancasila Di Rumahku* akan menjadi jalan baru yang inklusif dan dialogis untuk membangun pola pendidikan kewargaan bagi bangsa Indonesia untuk merestorasi mutiara gagasan progresif republik yang ada di dalamnya, dan membersihkan dari lapisan-lapisan *common sense* yang bercorak konservatif reaksioner yang selama ini

menjadi debu yang menutupi mutiara manikam warisan pendiri republik kita, yakni Pancasila.

Willy Aditya sendiri dalam buku itu mengatakan, secara politis Pancasila disebut *common denominator* atau titik temu dari berbagai pandangan dan paham politik yang berkembang kala negara Indonesia tengah dirumuskan. Ia *didaku* sebagai *philosofische grondslag* atau falsafah hidup dari bangsa-bangsa di Nusantara yang menjadi dasar dan berdirinya negara baru tersebut.

Lebih lanjut diungkap oleh Ketua Umum Liga Mahasiswa NasDem, sayap partai, Pancasila memang memiliki kelemahan. Kelemahannya bahkan disebut ada di dalam dirinya sendiri namun seiring dengan itu, ia juga telah membuktikan ‘kesaktiannya’ sedemikian rupa sehingga ia mampu bertahan dalam gelombang dera gugatan dan keraguan terhadapnya hingga saat ini.

Di masa Konstituante misalnya, Pancasila bertahan dari kehendak lama yang bersemi kembali pasca Pemilu 1955. Di masa pergolakan tahun 1965, Pancasila didengungkan kesaktiannya meski ia sekadar kamufase dari sebuah siasat politik. Setelah itu, Pancasila bahkan dimistifikasi sedemikian rupa hingga menjadi penjaga kekuasaan Orde Baru.

Tidak berhenti di masa Orde Baru. Pasca Gerakan Reformasi 1998, Pancasila terjerebkan ke pojok arena lahirnya kembali politik aliran. Pancasila

seperti pepatah, *hidup segan mati tak mau*. Ia tak bisa dibunuh, namun juga tak kuasa bergerak seperti tak punya daya hidup. Ia tak bisa disingkirkan, namun juga hanya mampu berposisi seperti *pataka* di acara-acara formal kenegaraan. Sampai ketika bangunan republik ini terancam oleh gelagat sektarianisme, nama Pancasila kembali disebut.

Anggota Komisi XI DPR itu menyebut, kehadiran *Pancasila Di Rumahku* hanyalah salah satu cara darinya dalam menyampaikan gagasan yang ada agar lebih *dedah* sebagai sebuah wacana. Buku yang ada diharap menjadi sumbangsih bagi terus hidupnya diskursus Pancasila di Tanah Air. □



MEDIA INFORMASI DAN KOMUNIKASI KONSTITUSI



# MAJELIS



**INI BARU**  
**INDONESIA**  
DARI MPR RI UNTUK NKRI





**MPR**  
RUMAH KEBANGSAAN  
PENGAWAL IDEOLOGI PANCASILA  
DAN KEDAULATAN RAKYAT



Buku Digital MPR RI  
SETJEN MPR RI